



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sanitasi yang baik dan layak merupakan salah satu faktor penunjang kesehatan masyarakat, akan tetapi belum seluruh stakeholder memberikan perhatian yang memadai terhadap sanitasi, baik dari kalangan pemerintah sendiri maupun dari kalangan dunia usaha dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan sektor sanitasi menjadi salah satu sektor yang tertinggal dalam pembangunan dibandingkan dengan sektor yang lain di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh USDP dalam Asia Pacific MDGs Report 2010, disampaikan bahwa akses sanitasi layak di Indonesia baru menempati angka ke 8 dari 10 negara di Asia Tenggara. Menyadari hal tersebut, pada RPJMN 2015-2019 pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia sudah mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi dan tidak ada lagi permukiman kumuh. Target tersebut dikenal dengan nama *Universal Access*, atau gerakan 100 – 0 -100. Salah satu pendekatan untuk mencapainya adalah dengan meneruskan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Program PPSP merupakan program yang bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan sanitasi melalui pendekatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi sebelum pelaksanaan tahap implementasi. Adapun dokumen perencanaan yang disusun oleh Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) rangkaian dokumen yaitu :

1. Buku Putih Sanitasi (BPS)
2. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
3. Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan pada tahun 2013 telah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta pada tahun 2014



telah menyelesaikan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang merupakan kesepakatan dan kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah.

Pada Tahun 2017 ini dokumen SSK yang sebelumnya akan dilakukan review untuk dimutakhirkan beberapa hal yang saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sanitasi eksisting di Kabupaten Kuningan. Dokumen ini nanti akan disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Kuningan secara partisipatif dan terintegrasi melalui proses lokatoh, diskusi, konsultasi internal dan eksternal, dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Teknis Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Fasilitator Kabupaten (CF) Kuningan dan Fasilitator Provinsi (PF) Jawa Barat serta Pokja Sanitasi Provinsi Jawa Barat dan Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Jawa Barat.

Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian/ Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang dimutakhirkan ini merupakan terminal seluruh program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan masyarakat setempat dalam kurun waktu 5 Tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber : APBN, APBD



Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Kuningan, Bantuan Luar Negeri (pinjaman maupun hibah), CSR/swasta maupun masyarakat, dan sebagainya.

Dalam perjalanannya nanti diharapkan Pokja Sanitasi yang telah terbentuk untuk dapat melakukan review terhadap isi dokumen setiap tahunnya terutama terkait program dan kegiatan selama lima tahun kedepan. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan.

Dokumen SSK Pemutakhiran ini mendapatkan masukan beberapa dokumen perencanaan yang terdiri dari : Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD), RTRW, RPJMD, Renstra/Renja SKPD, RKA SKPD, dan lain-lain.

Hubungan SSK dengan dokumen perencanaan lainnya :

a. SSK dengan RPJP

Dokumen RPJP Kabupaten Kuningan tahun 2005-2025 dapat digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan.

b. SSK dengan RPJMD

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2018 dapat digunakan sebagai referensi untuk memperoleh data isu-isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan.

c. SSK dengan RTRW



Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen SSK memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Kuningan Tahun 2011 - 2031, dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Kuningan menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan SSK.

- d. SSK dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

SSK menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD Tahun 2014 -2018 tersebut dan setelah SSK Final akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang

## **1.2. Metodologi Penyusunan**

Metode dan proses Penyusunan Pemutakhiran SSK terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan Review Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK) Kuningan, khususnya untuk Kerangka Kerja Logis (KKL), Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritas Program dan Kegiatan.
2. Melakukan Internalisasi dengan cara konsultasi kepada SKPD terkait di Kabupaten Kuningan.
3. Melakukan Ekternalisasi dengan cara konsultasi teknis kepada Pokja Sanitasi dan Air Minum Provinsi Jawa Barat dan Satker PSPLP di Provinsi Jawa Barat.



4. Melakukan pengawalan Program dan Kegiatan kepada mekanisme penganggaran mulai tingkat Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai Pemerintah Pusat.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota Pemutakhiran, yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan *interview* dengan narasumber.

Contoh : Studi EHRA (*Environmental Health Risk Assessment*), Studi Komunikasi dan Pemetaan Media

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen strategis daerah antara lain : Studi EHRA (*Environmental Health Risk Assessment*), BPS (Buku Putih Sanitasi), SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota), APBD, RTRW & Renja SKPD, Kabupaten Kuningan dalam Angka, BPS, Data Statistik, data dokumen pendukung lainnya seperti aturan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Pengumpulan data dengan beberapa teknik dalam penyusunan SSK diantaranya :

1. *Desk Study* (data sekunder, kajian literatur).
2. *Field Research* (observasi, wawancara responden).
3. *FGD (Focus Group Discussion)* dan *indept interview*.

Proses penulisan dokumen dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan dan dilakukan rapat – rapat koordinasi untuk penyepakatan data. Dalam hal ini SKPD yang menjadi pelaku utama adalah Sekretariat Daerah di Bagian



Administrasi Pembangunan karena bertindak sebagai sekretariat Kelompok Kerja Sanitasi Kab. Kuningan.

### **1.3. Dasar Hukum**

**Dasar hukum yang melandasi Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kuningan ini antara lain :**

#### **1.3.1 Dasar Hukum Skala Nasional**

##### **A. Undang - Undang**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman;
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU no 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2014.
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)



B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan



- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  15. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan DAS
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah tangga.
  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
  23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.



C. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

D. Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

E. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum.



3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Air Minum;
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan strategi Nasional pengembangan sistem Pengelolaan Persampahan.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan SPAM;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/ Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Wajib Dilengkapi Dengan UPL dan UKL;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.



14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
15. Permen PU No14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/Per/VI/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedomaan Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489)
21. Peraturan Menteri LH No 16 Tahun 2011Tentang Pedoman Materi Muatan Ranperda Pengelolaan Sampah RT
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1018/Menkes/Per/V /2011 tentang StrategiAdaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim.
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;



25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan SPAM;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedomaan penataan ruang Kawasan TPA
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Jakstra Air Minum
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/Prt/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12 Tahun 2014, Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
34. Peraturan Menteri kesehatan No 82 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016.



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050);
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

F. Keputusan Menteri

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.
3. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL-UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.



5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan.
6. Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman, Syarat dan Tata Cara Perijinan Pembuangan Air Limbah
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK /X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1428/Menkes/SK /XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas



15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1429/Menkes /SK/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Dilingkungan Sekolah
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 294 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Sampah
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 295 Tahun 2007 tentang Tim Kerja dan Tim Ahli Sampah
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/Menkes/SK /V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

**G. Surat Edaran Menteri**

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Di Daerah.
2. Surat Edaran Nomor Hk.03.03/Menkes/184/2015 Tentang Pendanaan Untuk Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif 01 Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

**1.3.2 Dasar Hukum Skala Provinsi**

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025; Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Serie E,
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri e, Tambahan Lembaran Negara Nomor 86);

### 1.3.3 Dasar Hukum Skala Kabupaten/ Kota

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017 ;



8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 910/KPTS.496-BPKAD/2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 903/KPTS.03-BPKAD/2017 tentang Pengesahan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017;
10. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 912/KPTS.156-Adm.Pemb/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Sanitasi (Pokja Sanitasi) Kabupaten Kuningan.
11. Instruksi Bupati Kuningan Nomor 660.2/3102/DLH tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) skala Desa
12. Instruksi Bupati Kuningan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Untuk Mencapai Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Desa *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Kuningan

#### **4.3 Sistematika Penyajian**

Sistematika penyusunan SSK Kabupaten Kuningan terdiri dari 7 Bab, sebagai berikut :

1. Bab 1 berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum, dan sistematika dokumen.
2. Bab 2 berisi tentang profile sanitasi saat ini yaitu terkait gambaran wilayah, kemampuan pelaksanaan SSK Tahun sebelumnya, profil sanitasi saat ini, area beresiko sanitasi serta permasalahan mendesak sanitasi.
3. Bab 3 berisi tentang kerangka pengembangan sanitasi yaitu terkait visi dan misi sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi, serta kemampuan pendanaan sanitasi.
4. Bab 4 berisi tentang strategi pengembangan sanitasi untuk sektor air limbah, persampahan dan drainase.



5. Bab 5 berisi tentang kerangka kerja logis untuk sektor air limbah, persampahan dan drainase.
6. Bab 6 berisi program dan kegiatan serta indikasi pendanaan sanitasi dari tiap-tiap sumber pendanaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap.
7. Bab 7 berisi monitoring dan evaluasi capaian SSK.

Rincian Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

## **KATA PENGANTAR**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **DAFTAR ISI**

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Metodologi Penyusunan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II PROFILE SANITASI SAAT INI**

- 5.1 Gambaran Wilayah
- 2.2 Kemajuan Pelaksanaan SSK
- 2.3 Profile Sanitasi Saat Ini
- 2.4 Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

## **BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI**

- 3.1 Visi dan Misi Sanitasi
- 3.2 Pentahapan Pengembangan Sanitasi
  - 3.2.1 Tahapan Pengembangan Sanitasi
  - 3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi
  - 3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran
- 3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah



#### **BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI**

- 4.1 Air Limbah Domestik
- 4.2 Pengelolaan Persampahan
- 4.2 Drainase Perkotaan

#### **BAB V KERANGKA KERJA LOGIS**

- 5.1 Air Limbah Domestik
- 5.2 Persampahan
- 5.3 Drainase Perkotaan

#### **BAB VI PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI**

- 6.1 Ringkasan
- 6.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah
- 6.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah
- 6.4 Antisipasi Funding Gap

#### **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK**

##### **LAMPIRAN**

##### **LAMPIRAN 1 : HASIL KAJIAN ASPEK NON TEKNIS DAN LEMBAR KERJA**

###### **AREA BERESIKO SANITASI**

- Lampiran 1.1 : Keuangan Daerah dan Struktur Organisasi Daerah
- Lampiran 1.2 : Ringkasan Eksekutif Hasil Kajian EHRA dan Kajian Lainnya
- Lampiran 1.3 : Peta Rencana Pengembangan Berdasarkan Rencana Induk
- Lampiran 1.4 : Lembar Kerja Analisis Area Beresiko Menggunakan Instrumen SSK

##### **LAMPIRAN 2 : HASIL ANALISIS SWOT**

##### **LAMPIRAN 3 : HASIL PEMBAHASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN**

##### **LAMPIRAN 4 : DESKRIPSI PROGRAM/ KEGIATAN**

##### **LAMPIRAN 5 : DAFTAR PERUSAHAAN PENYELENGGARA CSR POTENSIAL**

##### **LAMPIRAN 6 : KESIAPAN IMPLEMENTASI**

##### **LAMPIRAN 7 : RENCANA KERJA TAHUNAN**



## **BAB II**

### **PROFIL SANITASI SAAT INI**

#### **2.1 Gambaran Wilayah**

Kabupaten Kuningan terletak pada titik koordinat  $108^{\circ} 23' - 108^{\circ} 47'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 47' - 7^{\circ} 12'$  Lintang Selatan. Sedangkan ibu kotanya terletak pada titik koordinat  $6^{\circ} 45' - 7^{\circ} 50'$  Lintang Selatan dan  $105^{\circ} 20' - 108^{\circ} 40'$  Bujur Timur.

Dilihat dari posisi geografisnya terletak di bagian timur Jawa Barat berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan kota Cirebon dengan wilayah Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah. Secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Cirebon

Sebelah Timur : Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)

Sebelah Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah)

Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 361 Desa

Wilayah Kajian penyusunan SSK Pemutakhiran adalah seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Kuningan.





Tabel 2.1 Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Kelurahan

| No            | Nama Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan | Luas Wilayah Administrasi |                  | Luas Wilayah Terbangun |                     |
|---------------|----------------|-------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|               |                |             |                  | (Ha)                      | % terhadap Total | (Ha)                   | % terhadap Total    |
| 1             | Ciawigebang    | 24          | 0                | 6.060,99                  | 5,07%            | 745.165                | 0.623198            |
| 2             | Cibeureum      | 8           | 0                | 4.708,51                  | 3,94%            | 255.367                | 0.213569            |
| 3             | Cibingbin      | 10          | 0                | 7.090,87                  | 5,93%            | 357.166                | 0.298706            |
| 4             | Cidahu         | 12          | 0                | 4.221,65                  | 3,53%            | 426.171                | 0.356416            |
| 5             | Cigandamekar   | 11          | 0                | 2.230,68                  | 1,87%            | 325.139                | 0.271921            |
| 6             | Cigugur        | 5           | 5                | 3.536,56                  | 2,96%            | 370.398                | 0.309772            |
| 7             | Cilebak        | 7           | 0                | 4.250,31                  | 3,55%            | 137.758                | 0.11521             |
| 8             | Cilimus        | 13          | 0                | 3.541,27                  | 2,96%            | 466.973                | 0.39054             |
| 9             | Cimahi         | 10          | 0                | 3.877,41                  | 3,24%            | 339.597                | 0.284013            |
| 10            | Ciniru         | 9           | 0                | 4.988,04                  | 4,17%            | 183.929                | 0.153824            |
| 11            | Cipicung       | 10          | 0                | 2.136,67                  | 1,79%            | 262.361                | 0.219418            |
| 12            | Ciwaru         | 12          | 0                | 5.217,28                  | 4,36%            | 415.719                | 0.347675            |
| 13            | Darma          | 19          | 0                | 5.171,50                  | 4,33%            | 402.061                | 0.336253            |
| 14            | Garawangi      | 17          | 0                | 2.996,12                  | 2,51%            | 306.516                | 0.256346            |
| 15            | Hantara        | 8           | 0                | 3.548,95                  | 2,97%            | 109.768                | 0.091801            |
| 16            | Jalaksana      | 15          | 0                | 3.709,09                  | 3,10%            | 407.866                | 0.341107            |
| 17            | Japara         | 10          | 0                | 2.719,06                  | 2,27%            | 246.993                | 0.206566            |
| 18            | Kadugede       | 12          | 0                | 1.822,11                  | 1,52%            | 215.563                | 0.18028             |
| 19            | Kalimanggis    | 6           | 0                | 2.090,11                  | 1,75%            | 225.255                | 0.188386            |
| 20            | Karangkencana  | 9           | 0                | 6.534,51                  | 5,46%            | 249.926                | 0.209019            |
| 21            | Kramatmulya    | 14          | 0                | 1.698,84                  | 1,42%            | 367.141                | 0.307048            |
| 22            | Kuningan       | 6           | 10               | 3.005,79                  | 2,51%            | 813.186                | 0.680086            |
| 23            | Lebakwangi     | 13          | 0                | 1.981,24                  | 1,66%            | 358.343                | 0.29969             |
| 24            | Luragung       | 16          | 0                | 4.773,67                  | 3,99%            | 497.892                | 0.416398            |
| 25            | Maleber        | 16          | 0                | 5.747,75                  | 4,81%            | 319.658                | 0.267337            |
| 26            | Mandirancan    | 12          | 0                | 3.502,68                  | 2,93%            | 415.716                | 0.347673            |
| 27            | Nusaherang     | 8           | 0                | 1.821,00                  | 1,52%            | 190.944                | 0.159691            |
| 28            | Pancalang      | 13          | 0                | 1.924,44                  | 1,61%            | 230.479                | 0.192755            |
| 29            | Pasawahan      | 10          | 0                | 4.920,28                  | 4,11%            | 198.894                | 0.166339            |
| 30            | Selajambe      | 7           | 0                | 3.673,10                  | 3,07%            | 153.721                | 0.12856             |
| 31            | Sindangagung   | 12          | 0                | 1.312,47                  | 1,10%            | 306.705                | 0.256504            |
| 32            | Subang         | 7           | 0                | 4.758,17                  | 3,98%            | 180.468                | 0.150929            |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>361</b>  | <b>15</b>        | <b>119.571,12</b>         | <b>100,00%</b>   | <b>10,482.838</b>      | <b>8.767.032,00</b> |

Sumber : Dokumen MPS 2014



Tabel 2.2. berisikan tentang proyeksi penduduk Kabupaten Kuningan untuk 5 (lima) tahun ke depan dari tahun berjalan yaitu tahun 2017. Rumus yang digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk adalah sebagai berikut :

$$p_n = p_0 \times (1+r)^n$$

Dimana

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| $p_n$ | = Tahun ke-1                    |
| $p_0$ | = Tahun berjalan                |
| $r$   | = rata pertumbuhan penduduk (%) |
| $n$   | = pangkat tahun yang diinginkan |





Tabel diatas menggambarkan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Kuningan. Jumlah proyeksi penduduk terbanyak sampai dengan Tahun 2022 ada di Kecamatan Kuningan dengan total penduduk 99.427 jiwa atau setara dengan 19.885 KK, sedangkan proyeksi jumlah penduduk terendah sampai dengan Tahun 2022 ada di Kecamatan Cilebak dengan total penduduk 12.687 jiwa atau setara dengan 2.537 KK

Tabel 2.3 : Tingkat Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Saat Ini dan Proyeksi 5 Tahun

| Nama Kecamatan | Tingkat Pertumbuhan (%) |      |      |      |      |      | Kepadatan Penduduk (orang/ha) |         |         |         |         |         |
|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                | Tahun                   |      |      |      |      |      | Tahun                         |         |         |         |         |         |
|                | 2017                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017                          | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| Darma          | 4,6                     | 4,6  | 4,6  | 4,6  | 4,6  | 4,6  | 115,818                       | 116,5   | 117,184 | 117,868 | 118,552 | 119,236 |
| Kadugede       | 2,4                     | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 2,4  | 115,451                       | 116,128 | 116,81  | 117,492 | 118,174 | 118,856 |
| Nusaherang     | 1,8                     | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 94,593                        | 95,154  | 95,714  | 96,269  | 96,835  | 97,4    |
| Ciniru         | 1,7                     | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 1,7  | 99,196                        | 99,783  | 100,365 | 100,952 | 101,539 | 102,126 |
| Hantara        | 1,3                     | 1,3  | 1,3  | 1,3  | 1,3  | 1,3  | 120,572                       | 121,283 | 121,994 | 122,704 | 123,415 | 124,125 |
| Selajambe      | 1,2                     | 1,2  | 1,2  | 1,2  | 1,2  | 1,2  | 87,509                        | 88,023  | 88,537  | 89,057  | 89,565  | 90,079  |
| Subang         | 1,6                     | 1,6  | 1,6  | 1,6  | 1,6  | 1,6  | 91,778                        | 92,316  | 92,859  | 93,402  | 93,945  | 94,482  |
| Cilebak        | 1,1                     | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 81,179                        | 81,658  | 82,137  | 82,616  | 83,095  | 83,574  |
| Ciwaru         | 2,8                     | 2,8  | 2,8  | 2,8  | 2,8  | 2,8  | 74,815                        | 75,255  | 75,695  | 76,138  | 76,578  | 77,018  |
| Karangkencana  | 1,9                     | 1,9  | 1,9  | 1,9  | 1,9  | 1,9  | 84,929                        | 85,429  | 85,929  | 86,434  | 86,934  | 87,434  |
| Cibingbin      | 3,4                     | 3,4  | 3,4  | 3,4  | 3,4  | 3,4  | 105,422                       | 106,04  | 106,665 | 107,286 | 107,908 | 108,527 |
| Cibeureum      | 1,8                     | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 75,327                        | 75,773  | 76,216  | 76,662  | 77,109  | 77,555  |
| Luragung       | 4,2                     | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 4,2  | 77,348                        | 77,804  | 78,26   | 78,716  | 79,172  | 79,628  |
| Cimahi         | 2,9                     | 2,9  | 2,9  | 2,9  | 2,9  | 2,9  | 108,102                       | 108,738 | 109,377 | 110,013 | 110,649 | 111,285 |
| Cidahu         | 3,6                     | 3,6  | 3,6  | 3,6  | 3,6  | 3,6  | 96,344                        | 96,912  | 97,48   | 98,047  | 98,615  | 99,183  |
| Kalimanggis    | 2,3                     | 2,3  | 2,3  | 2,3  | 2,3  | 2,3  | 106,484                       | 107,114 | 107,74  | 108,371 | 109,001 | 109,631 |
| Ciawigebang    | 7,9                     | 7,9  | 7,9  | 7,9  | 7,9  | 7,9  | 111,79                        | 112,449 | 113,109 | 113,768 | 114,427 | 115,086 |
| Cipicung       | 2,6                     | 2,6  | 2,6  | 2,6  | 2,6  | 2,6  | 102,26                        | 102,862 | 103,468 | 104,07  | 104,673 | 105,275 |
| Lebakwangi     | 3,8                     | 3,8  | 3,8  | 3,8  | 3,8  | 3,8  | 113,076                       | 113,743 | 114,41  | 115,077 | 115,744 | 116,411 |
| Maleber        | 3,9                     | 3,9  | 3,9  | 3,9  | 3,9  | 3,9  | 131,588                       | 132,363 | 133,139 | 133,918 | 134,694 | 135,47  |
| Garawangi      | 3,4                     | 3,4  | 3,4  | 3,4  | 3,4  | 3,4  | 132,156                       | 132,933 | 133,716 | 134,495 | 135,275 | 136,052 |
| Sindangagung   | 3,1                     | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 3,1  | 114,55                        | 115,225 | 115,9   | 116,575 | 117,249 | 117,924 |
| Kuningan       | 9,1                     | 9,1  | 9,1  | 9,1  | 9,1  | 9,1  | 115,897                       | 116,582 | 117,27  | 117,948 | 118,637 | 119,322 |
| Cigugur        | 3,9                     | 3,9  | 3,9  | 3,9  | 3,9  | 3,9  | 118,041                       | 118,737 | 119,434 | 120,13  | 120,827 | 121,523 |
| Kramatmulya    | 3,8                     | 3,8  | 3,8  | 3,8  | 3,8  | 3,8  | 129,204                       | 129,966 | 130,729 | 131,492 | 132,254 | 133,017 |
| Jalaksana      | 4,1                     | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 4,1  | 109,301                       | 109,945 | 110,59  | 111,235 | 111,88  | 112,525 |
| Japara         | 1,8                     | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 76,634                        | 77,083  | 77,537  | 77,99   | 78,439  | 78,889  |



|                     |     |     |     |     |     |     |         |         |         |         |         |         |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Cilimus</b>      | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 98,528  | 99,109  | 99,691  | 100,271 | 100,852 | 101,432 |
| <b>Cigandamekar</b> | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 87,344  | 87,858  | 88,375  | 88,891  | 89,405  | 89,918  |
| <b>Mandirancan</b>  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 50,599  | 50,898  | 51,196  | 51,494  | 51,793  | 52,091  |
| <b>Pancalang</b>    | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 96,096  | 96,664  | 97,228  | 97,796  | 98,365  | 98,933  |
| <b>Pasawahan</b>    | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 108,927 | 109,571 | 110,214 | 110,858 | 111,502 | 112,145 |

Sumber : Bappeda, 2017, Diolah

Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kuningan paling tinggi ada di Kecamatan Kuningan yaitu sebesar 9,1%, sedangkan yang paling rendah ada di Kecamatan Cilebak yaitu sebesar 1,1%. Untuk tingkat kepadatan penduduk dari Tahun 2017 sampai dengan proyeksi Tahun 2022 yang paling tinggi ada di Kecamatan Garawangi yaitu sebesar 132,156 orang/ha untuk tahun 2017 dan 136,052 orang/ha untuk Tahun 2022, sedangkan yang terendah ada di Kecamatan Mandirancan yaitu 50,599 orang/ha untuk Tahun 2017 dan 52,091 orang/ha untuk Tahun 2022.

**Tabel 2.4 : Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan**

| <b>Nama Kecamatan</b> | <b>Jumlah Keluarga Miskin (KK)</b> |
|-----------------------|------------------------------------|
| CIWIGEBANG            | 4652                               |
| CIBEUREUM             | 2162                               |
| CIBINGBIN             | 4695                               |
| CIDAHU                | 2558                               |
| CIGANDAMEKAR          | 1155                               |
| CIGUGUR               | 761                                |
| CILEBAK               | 724                                |
| CILIMUS               | 1805                               |
| CIMAH                 | 1572                               |
| CINIRU                | 368                                |
| CIPICUNG              | 1432                               |
| CIWARU                | 697                                |
| DARMA                 | 2290                               |
| GARAWANGI             | 1695                               |
| HANTARA               | 407                                |
| JALAKSANA             | 554                                |
| JAPARA                | 862                                |
| KADUGEDE              | 640                                |
| KALIMANGGIS           | 1363                               |
| KARANGKANCANA         | 1270                               |
| KRAMATMULYA           | 1059                               |
| KUNINGAN              | 901                                |
| LEBAKWANGI            | 1706                               |
| LURAGUNG              | 1795                               |



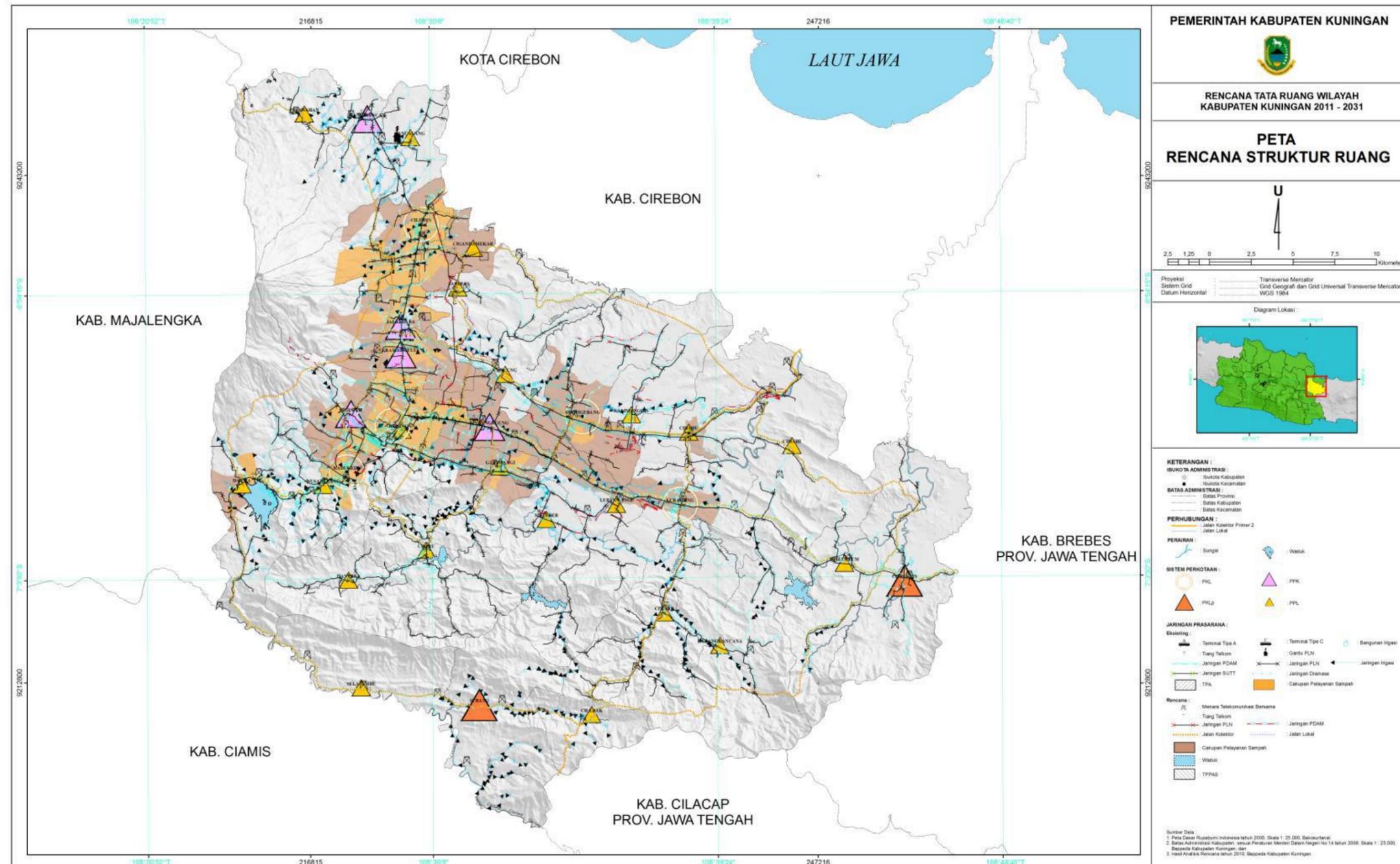
|               |              |
|---------------|--------------|
| MALEBER       | 2416         |
| MANDIRANAN    | 532          |
| NUSAHERANG    | 484          |
| PANCALANG     | 741          |
| PASAWAHAN     | 591          |
| SELAJAMBE     | 1001         |
| SINDANGAGUNG  | 1089         |
| SUBANG        | 1587         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>45564</b> |

Sumber : Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan paling banyak ada di Kecamatan Ciawigebang yaitu sebesar 4.652 KK , dan yang terkecil ada di Kecamatan Ciniru yaitu 368 KK

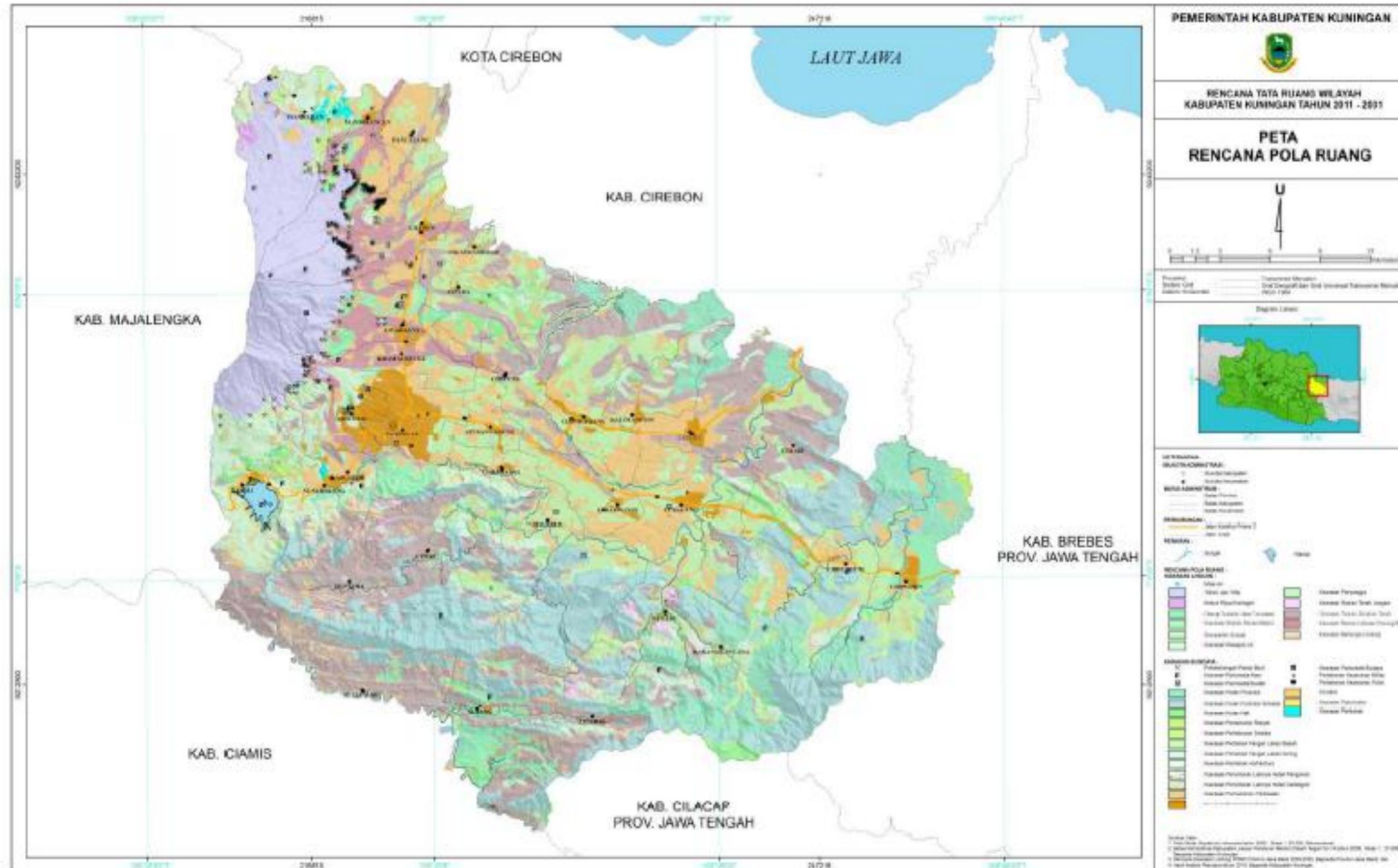


PETA 2.2  
 RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN KUNINGAN





PETA 2.3  
 RENCANA POLA RUANG KABUPATEN KUNINGAN





1.2 Kemajuan Pelaksanaan SSK

Pada sub bab ini berisi tentang penjelasan singkat mengenai status Implementasi SSK Periode sebelumnya untuk 3 (tiga) sub sektor yaitu : air limbah domestik, persampahan dan drainase.

a. Air Limbah Domestik

Informasi mengenai status implementasi sub sektor air limbah domestik dapat dilihat secara detail pada tabel 2.5 dibawah ini ;

Tabel 2.5 : Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Air Limbah Domestik

| SSK Periode sebelumnya   |   |                                | Kemajuan SSK   |   |   |  |  |
|--|---|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| Tujuan   | Sasaran   | Data Dasar *<br>Tahun N (2013) | Tahun N + 1<br>(2014)  | Tahun N + 2<br>(2015)   | Tahun N + 3<br>(2016)   | Status Saat Ini<br>(2017)  |  |
| (1)  | (2)   | (3)                            | (4)  | (5)   | (6)   | (7)  |  |
| Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik tahun 2018 sebesar 79% dengan kualitas septik tank yang aman sesuai standar teknis. | Meningkatnya jumlah septik tank pada skala individual dan komunal yang memadai dari 46% menjadi 79% pada tahun 2018                           | BPS Tahun 2013                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya MCK Komunal dari DAK SLBM = 4 Unit</li> <li>• Terbangunnya MCK Komunal dari APBD Kab. = 1 unit</li> <li>• Jumlah Desa/ Kelurahan ODF = 44</li> <li>• Jumlah penduduk yang masih BABS BABS = 22,3%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya IPAL Komunal dan MCK ++ dari SANIMAS REGULER = 3 Unit</li> <li>• Terbangunnya MCK Komunal dari DAK SLBM = 5 Unit</li> <li>• Terbangunnya MCK ++ dari SABERMAS = 47 Unit di 16 Desa/ Kelurahan</li> <li>• Terbangunnya IPAL Komunal dan MCK ++ dari SANIMAS REGULER = 5 Unit</li> <li>• Jumlah Desa/ Kelurahan ODF = 50</li> <li>• Jumlah penduduk yang masih BABS = 22,09%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya IPAL Konvensional dari DAK SLBM = 1 Unit</li> <li>• Terbangunnya MCK Kombinasi dari DAK SLBM = 28 Unit</li> <li>• Jumlah Desa/ Kelurahan ODF = 75</li> <li>• Jumlah penduduk yang masih BABS BABS = 20,6 %</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya IPAL Komunal dari DAK SLBM = 14 Unit</li> <li>• Terbangunnya MCK dari APBD Kab. = 1 Unit</li> <li>• Terbangunnya MCK dari SABERMAS = 14 Unit</li> <li>• Jumlah Desa/ Kelurahan ODF = 78</li> <li>• Jumlah penduduk yang masih BABS = 20,1 %</li> <li>• Disusunnya</li> </ul> |  |
|  | Meningkatkan Pelayanan pengelolaan Air Limbah domestik skala komunal dan kawasan melalui pembangunan IPLT dan IPAL skala kota pada tahun 2018 |                                |  |   |   |  |  |
|  | Meningkatkan kepemilikan septik tank skala komunal dan individual dari 46% menjadi 79% pada tahun 2018  |                                |  |   |   |  |  |



|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | Masterplan Air Limbah<br>• Disusun DED IPLT<br><br>• IPLT belum ada |
|--|--|--|--|--|--|---|

Sumber : BPS Tahun 2013 dan Analisis Data SSK 2017

\*) Berdasarkan Buku Putih Periode Sebelumnya

\*\*\*) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)

**b. Pengelolaan Persampahan**

Informasi mengenai status implementasi sub sektor persampahan dapat dilihat secara detail pada tabel 2.6 dibawah ini ;

**Tabel 2.6 : Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Persampahan**

| SSK Periode sebelumnya   |   |  | Kemajuan SSK   |   |  |   |
|--|---|--|--|---|--|---|
| Tujuan   | Sasaran   | Data Dasar *<br>Tahun N (2013)               | Tahun N + 1<br>(2014)  | Tahun N + 2<br>(2015)   | Tahun N + 3<br>(2016)  | Status Saat Ini<br>(2017)   |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)  |   |  |   |
| Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Kuningan sebesar 63% pada tahun 2018 | Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan pada kawasan komersial sebanyak 27% pada tahun 2018                                      | Tabel Kerangka Kerja Logis di BPS Tahun 2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Bank Sampah di Desa = 1 Unit</li> <li>• Pembentukan Bank Sampah di sekolah setingkat SMP dan SMA = 2 unit</li> <li>• Pembentukan Bank Sampah di SKPD = 1 unit</li> <li>• Pembangunan Hanggar Pengelolaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Bak Sampah sekolah setingkat SMP dan SMA = 9 unit</li> <li>• Pembangunan Hanggar Pengelolaan Sampah 3R = 4 unit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Bank Sampah = 4 unit</li> <li>• Pembangunan Hanggar Pengelolaan Sampah 3R = 3 unit</li> <li>• Jumlah Dump Truck Sampah = 13 unit</li> <li>• Jumlah Arm Roll Truck = 4 unit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan layanan persampahan Tahun 2017 adalah 12 % (48 desa/kelurahan di 12 kecamatan)</li> <li>• Pembentukan Bank Sampah 5 Unit</li> <li>• Pembangunan Hanggar Pengelolaan Sampah 3R = 2 unit</li> <li>• Total Bank Sampah</li> </ul> |
|  | Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan pada kawasan permukiman perkotaan sebanyak 32% dan kawasan permukiman perdesaan sebanyak |  |  |   |  |   |



|  |  |  |                    |  |  |   |
|--|--|--|--------------------|--|--|---|
|  | 4% pada tahun 2018   |  | Sampah 3R = 1 unit |  |  | 17 unit yang ada di desa, dan 26 unit yang ada di sekolah   |
|  | Bertambahnya jumlah kendaraan pengangkut sampah sebanyak 10 unit   |  |                    |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Dump Truck Sampah = 15 unit</li> <li>• Jumlah Arm Roll = 6 unit</li> <li>• Adanya Revitalisasi TPA</li> </ul> |
|  | Menambah jumlah TPPAS menjadi 2 lokasi untuk melayani Kawasan <i>Central Bussines Distric</i> (CBD) Kabupaten Kuningan |  |                    |  |  |   |
|  | Menambah Jumlah TPS (Transfer Depo) minimal di seluruh kecamatan dan di seluruh Desa di kawasan CBD Kabupaten Kuningan |  |                    |  |  |   |
|  | Menciptakan pengelolaan persampahan dengan prinsip 3R pada kawasan permukiman perdesaan sebanyak 4% pada tahun 2018    |  |                    |  |  |   |

Sumber : BPS Tahun 2013 dan Analisis Data SSK 2017

\*) Berdasarkan Buku Putih Periode Sebelumnya

\*\*) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)



### c. Drainase Perkotaan

Informasi mengenai status implementasi sub sektor persampahan dapat dilihat secara detail pada tabel 2.7 dibawah ini ;

**Tabel 2.7 : Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Drainase Perkotaan**

| SSK Periode sebelumnya   |  |  | Kemajuan SSK                                 |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
| Tujuan   | Sasaran  | Data Dasar *<br>Tahun N<br>(2013)            | Tahun N + 1<br>(2014)                        | Tahun N + 2<br>(2015)                        | Tahun N + 3<br>(2016)                        | Status Saat<br>Ini<br>(2017)  |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)  |  |  |   |
| Tertatanya sistem jaringan drainase perkotaan di Kabupaten Kuningan sebesar 44% pada tahun 2018 di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan komersial. | Memperbaiki sistem jaringan drainase perkotaan sebanyak 44% pada tahun 2018 di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan komersial. | Tabel Kerangka Kerja Logis di BPS Tahun 2013 | Adanya pemeliharaan dan pembangunan drainase | Adanya pemeliharaan dan pembangunan drainase | Adanya pemeliharaan dan pembangunan drainase | (1). Sudah ada saluran drainase<br><br>(2). Adanya pembangunan saluran drainase yang baru |

Sumber : BPS Tahun 2013 dan Analisis Data SSK 2017

\*) Berdasarkan Buku Putih Periode Sebelumnya

\*\*) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)



### 1.3 Profil Sanitasi Saat Ini

#### a. Air Limbah Domestik

Sistem pembuangan limbah cair di Kabupaten Kuningan saat ini masih belum mengenal *sewerage system*. *Sewerage system* adalah sistem pembuangan air limbah di mana semua air kotor di suatu wilayah, baik air bekas cucian, air dari dapur, air dari kamar mandi, maupun air dari kakus disalurkan bersama ke suatu tempat untuk diolah. *Sewerage system* ini bersifat tertutup dan dipisahkan dari sistem pembuangan air hujan (*drainase*).

Kondisi saat ini air limbah yang berasal dari air bekas cucian, air dari dapur, air kamar mandi, dan air limpahan dari tangki septik dibuang ke saluran drainase bergabung dengan air hujan mengalir ketempat yang lebih rendah melalui saluran alami dan saluran buatan. Jaringan air limbah rumah tangga mengikuti saluran air kota yang tersedia. Pengolahan air limbah terjadi secara alami ketika air mengalir. Air limbah rumah tangga di Kabupaten Kuningan sebagian besar berakhir di 43 sungai dan 3 DAS (DAS Cisinggarung, DAS Cijolang, dan DAS Ciberes-Bangkaderes).

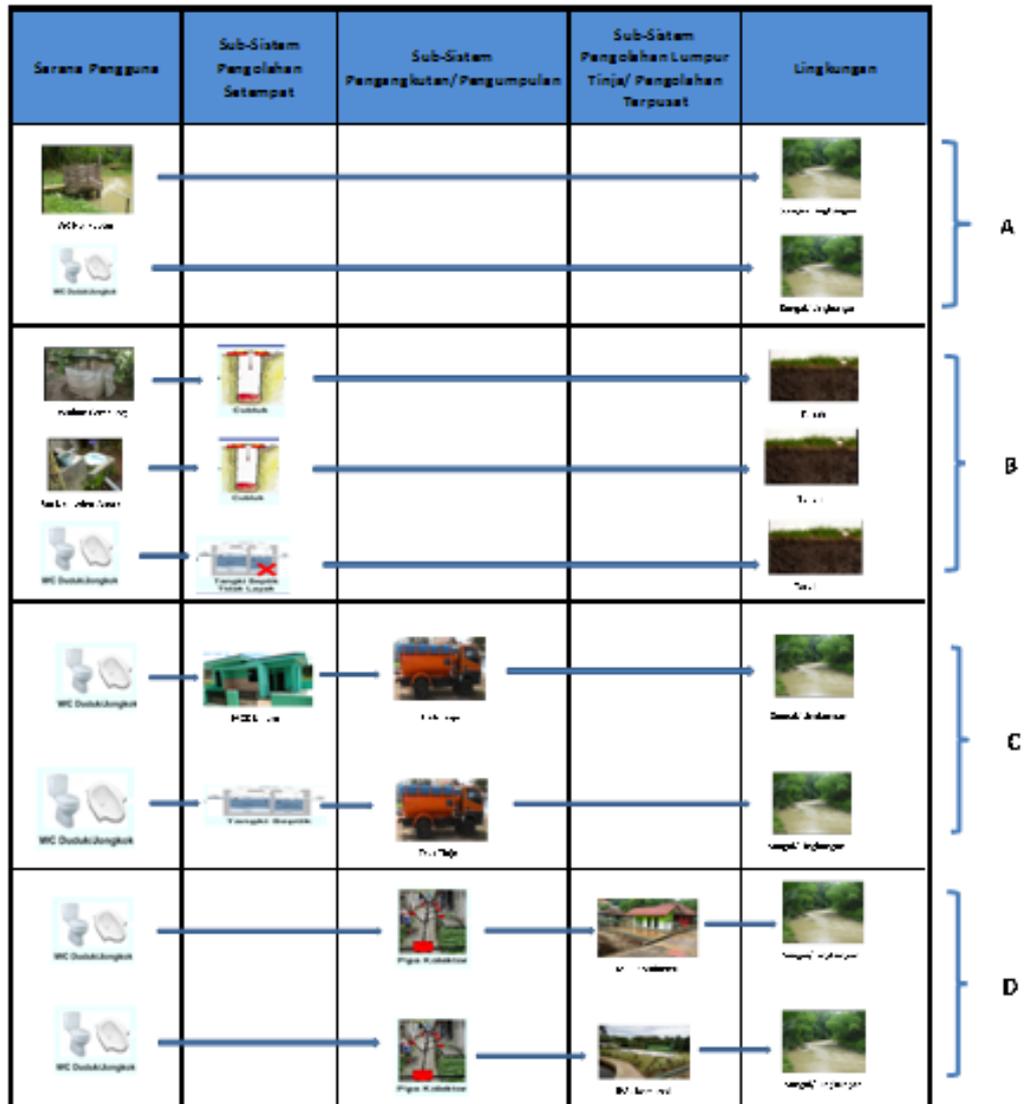
Pengolahan air limbah domestik hasil dari WC di Kabupaten Kuningan umumnya menggunakan sistem sanitasi setempat (*SPALD S*) dengan menggunakan jamban, baik yang dikelola secara individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik atau cubluk. Disamping itu dengan adanya sungai-sungai yang mengalir melalui Kabupaten Kuningan dapat dimanfaatkan sebagai tempat buangan air limbah. Namun untuk menghindari terjadinya pencemaran air sungai maka jenis air limbah yang dapat di buang ke sungai-sungai tersebut berupa air limbah cair, sedangkan penggunaan sistem sanitasi terpusat (*SPALD T*) sampai saat ini belum bisa ada dikarenakan biaya tinggi.

Pembuangan limbah domestik yang berupa air limbah padat di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan beberapa cara. Pada daerah permukiman yang terstruktur, penduduk menggunakan tangki septik individual atau tangki septik komunal. Pada permukiman yang tidak terstruktur, sebagian penduduknya menggunakan tangki septik individual maupun cubluk dan masih banyak penduduknya menggunakan aliran sungai dan saluran irigasi sebagai pembuangan air limbah. Air bekas cucian, dapur dan kamar mandi disalurkan langsung kesaluran drainase, kali dan saluran lainnya.



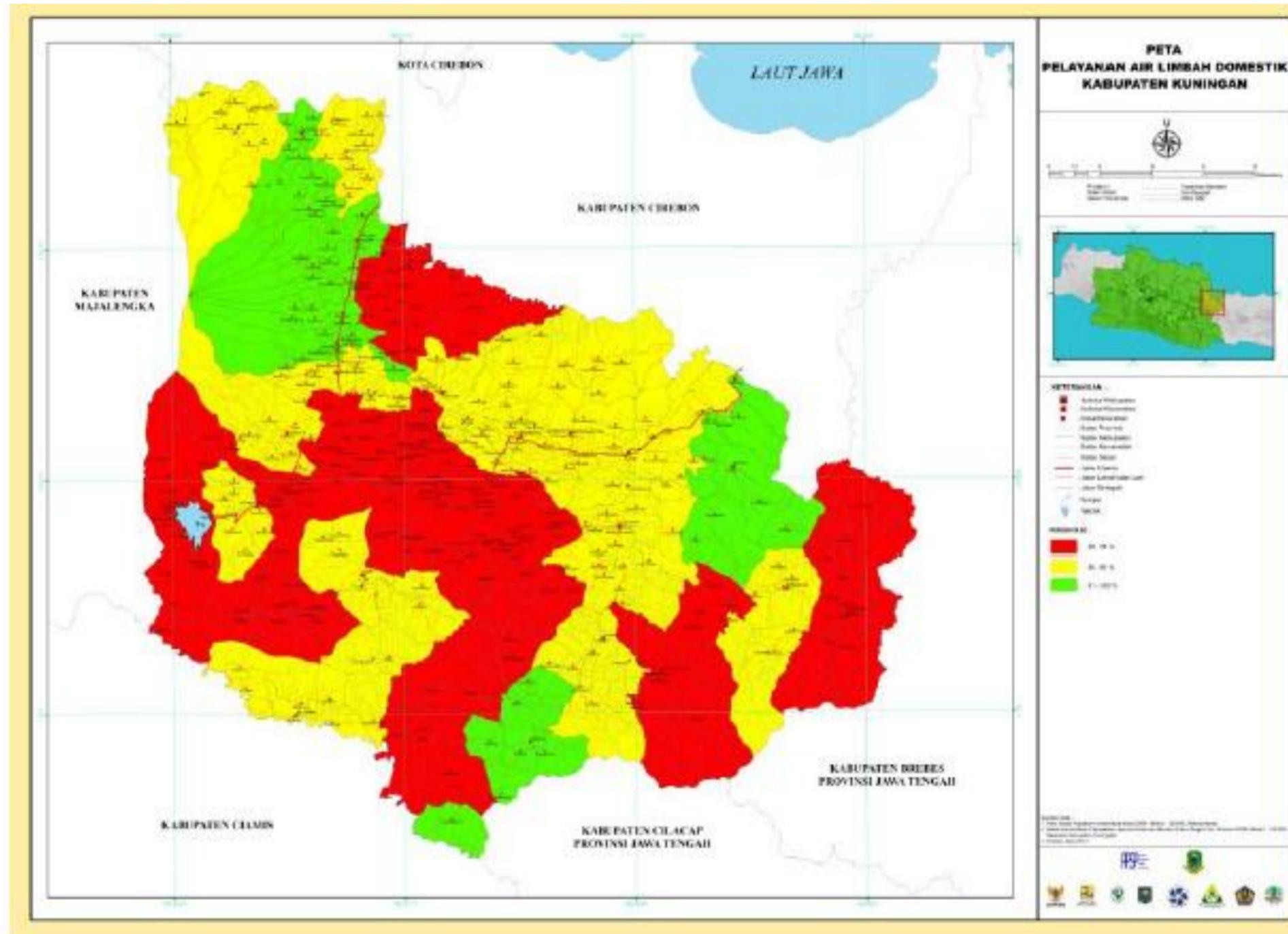
(1) Sistem dan Infrastruktur

Gambar 2.1. Diagram Sistem Sanitasi





Peta Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik





Tabel 2.8. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Kuningan untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan

| No. | Kecamatan             | Jumlah Penduduk Perkotaan | Tanpa Akses |   | Akses Layak (KK) |               |                     |                    |                   |                        |
|-----|-----------------------|---------------------------|-------------|---|------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
|     |                       |                           | BABS (KK)   | Cubluk / Tangki Septik Individual Tidak Layak | SPALD Setempat   |               | SPALD - Terpusat    |                    |                   |                        |
|     |                       |                           |             |   | Skala Individual | Skala Komunal | IPALD Permukiman    |                    | IPALD - Perkotaan | IPALD Kawasan Tertentu |
|     |                       |                           |             |   |                  |               | Berbasis masyarakat | Berbasis institusi |                   |                        |
| (i) | (ii)                  | (iii)                     | (iv)        | (v)   | (vi)             | (vii)         | (viii)              | (ix)               | (x)               | (xi)                   |
| 1   | Kecamatan Kadugede    | 4872                      | 1842        | 842   | 2153             | 10            | 50                  | 0                  | 0                 | 0                      |
| 2   | Kecamatan Ciniru      | 0                         | 0           | 0   | 0                | 0             | 0                   | 0                  | 0                 | 0                      |
| 3   | Kecamatan Subang      | 0                         | 0           | 0   | 0                | 0             | 0                   | 0                  | 0                 | 0                      |
| 4   | Kecamatan Ciwaru      | 0                         | 0           | 0   | 0                | 0             | 0                   | 0                  | 0                 | 0                      |
| 5   | Kecamatan Cibingbin   | 4321                      | 765         | 996   | 2553             | 30            | 0                   | 0                  | 0                 | 0                      |
| 6   | Kecamatan Luragung    | 7417                      | 790         | 1855  | 4772             | 0             | 0                   | 0                  | 0                 | 0                      |
| 7   | Kecamatan Lebakwangi  | 2791                      | 75          | 761   | 1955             | 0             | 0                   | 0                  | 0                 | 0                      |
| 8   | Kecamatan Garawangi   | 3936                      | 726         | 894   | 2261             | 10            | 100                 | 0                  | 0                 | 0                      |
| 9   | Kecamatan Kuningan    | 35009                     | 4866        | 8433  | 21678            | 20            | 200                 | 0                  | 0                 | 0                      |
| 10  | Kecamatan Ciawigebang | 15058                     | 1570        | 3789  | 9644             | 20            | 350                 | 0                  | 0                 | 0                      |
| 11  | Kecamatan Cidahu      | 4117                      | 330         | 1060  | 2727             | 0             | 50                  | 0                  | 0                 | 0                      |
| 12  | Kecamatan Jalaksana   | 4800                      | 57          | 1323  | 3334             | 0             | 330                 | 0                  | 0                 | 0                      |
| 13  | Kecamatan Cilimus     | 12040                     | 136         | 3332  | 8500             | 0             | 150                 | 0                  | 0                 | 0                      |
| 14  | Kecamatan Mandirancan | 2490                      | 10          | 695   | 1756             | 0             | 50                  | 0                  | 0                 | 0                      |
| 15  | Kecamatan Selajambe   | 0                         | 0           | 0   | 0                | 0             | 0                   | 0                  | 0                 | 0                      |

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017

Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan

## STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) 2018-2022

### KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



|    |                        |               |              |              |              |            |             |          |          |          |
|----|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| 16 | Kecamatan Kramatmulya  | 7330          | 594          | 1882         | 4821         | 20         | 100         | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Kecamatan Darma        | 2385          | 163          | 622          | 1600         | 10         | 50          | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Kecamatan Cigugur      | 9759          | 420          | 2615         | 6724         | 0          | 50          | 0        | 0        | 0        |
| 19 | Kecamatan Pasawahan    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 20 | Kecamatan Nusaherang   | 1765          | 656          | 310          | 799          | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 21 | Kecamatan Cipicung     | 1586          | 235          | 378          | 973          | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 22 | Kecamatan Pancalang    | 1588          | 189          | 391          | 1008         | 0          | 50          | 0        | 0        | 0        |
| 23 | Kecamatan Japara       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 24 | Kecamatan Cimahi       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 25 | Kecamatan Cilebak      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 26 | Kecamatan Hantara      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 27 | Kecamatan Kalimanggis  | 1722          | 350          | 384          | 988          | 0          | 50          | 0        | 0        | 0        |
| 28 | Kecamatan Cibeureum    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 29 | Kecamatan Karangancana | 0             | 0            | 0            | 0            | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 30 | Kecamatan Maleber      | 1692          | 198          | 419          | 1065         | 0          | 50          | 0        | 0        | 0        |
| 31 | Kecamatan Sindangagung | 7624          | 1496         | 1715         | 4372         | 10         | 160         | 0        | 0        | 0        |
| 32 | Kecamatan Cigandamekar | 3034          | 528          | 701          | 1775         | 0          | 100         | 0        | 0        | 0        |
|    | <b>JUMLAH</b>          | <b>135336</b> | <b>15996</b> | <b>33397</b> | <b>85458</b> | <b>130</b> | <b>1890</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi, 2017

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017

Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan



Tabel 2.8. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Kuningan untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan

| No. | Kecamatan             | Jumlah Penduduk Perdesaan | Tanpa Akses |   | Akses Layak (KK) |               |                  |      |                   |                        |
|-----|-----------------------|---------------------------|-------------|---|------------------|---------------|------------------|------|-------------------|------------------------|
|     |                       |                           | BABS (KK)   | Cubluk / Tangki Septik Individual Tidak Layak | SPALD Setempat   |               | SPALD - Terpusat |      |                   |                        |
|     |                       |                           |             |   | Skala Individual | Skala Komunal | IPALD Permukiman |      | IPALD - Perkotaan | IPALD Kawasan Tertentu |
| (i) | (ii)                  | (iii)                     | (iv)        | (v)   | (vi)             | (vii)         | (viii)           | (ix) |                   |                        |
| 1   | Kecamatan Kadugede    | 2884                      | 846         | 567   | 1402             | 20            | 100              | 0    | 0                 | 0                      |
| 2   | Kecamatan Ciniru      | 5705                      | 520         | 1448  | 3622             | 20            | 200              | 0    | 0                 | 0                      |
| 3   | Kecamatan Subang      | 5118                      | 966         | 1148  | 2922             | 0             | 200              | 0    | 0                 | 0                      |
| 4   | Kecamatan Ciwaru      | 9304                      | 992         | 2282  | 5844             | 0             | 450              | 0    | 0                 | 0                      |
| 5   | Kecamatan Cibingbin   | 7656                      | 1266        | 1789  | 4595             | 20            | 0                | 0    | 0                 | 0                      |
| 6   | Kecamatan Luragung    | 5994                      | 414         | 1560  | 3995             | 0             | 50               | 0    | 0                 | 0                      |
| 7   | Kecamatan Lebakwangi  | 9379                      | 1019        | 2325  | 5908             | 25            | 272              | 0    | 0                 | 0                      |
| 8   | Kecamatan Garawangi   | 7373                      | 1398        | 1662  | 4247             | 0             | 162              | 0    | 0                 | 0                      |
| 9   | Kecamatan Kuningan    | 0                         | 0           | 0   | 0                | 0             | 0                | 0    | 0                 | 0                      |
| 10  | Kecamatan Ciawigebang | 7506                      | 961         | 1818  | 4599             | 0             | 250              | 0    | 0                 | 0                      |
| 11  | Kecamatan Cidahu      | 8773                      | 400         | 2337  | 5975             | 0             | 200              | 0    | 0                 | 0                      |
| 12  | Kecamatan Jalaksana   | 8751                      | 229         | 2386  | 6019             | 0             | 300              | 0    | 0                 | 0                      |
| 13  | Kecamatan Cilimus     | 1919                      | 0           | 538   | 1372             | 0             | 50               | 0    | 0                 | 0                      |
| 14  | Kecamatan Mandirancan | 4207                      | 43          | 1155  | 2877             | 0             | 368              | 0    | 0                 | 0                      |
| 15  | Kecamatan Selajambe   | 4579                      | 426         | 1162  | 2906             | 10            | 164              | 0    | 0                 | 0                      |

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017

Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan

## STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) 2018-2022

### KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



|    |                         |               |              |              |               |            |             |          |          |          |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| 16 | Kecamatan Kramatmulya   | 4430          | 314          | 1153         | 2963          | 10         | 100         | 0        | 0        | 0        |
| 17 | Kecamatan Darma         | 13156         | 649          | 3500         | 8914          | 10         | 450         | 0        | 0        | 0        |
| 18 | Kecamatan Cigugur       | 2579          | 88           | 698          | 1773          | 0          | 50          | 0        | 0        | 0        |
| 19 | Kecamatan Pasawahan     | 6550          | 677          | 1643         | 4168          | 0          | 150         | 0        | 0        | 0        |
| 20 | Kecamatan Nusaherang    | 2916          | 235          | 738          | 1907          | 0          | 100         | 0        | 0        | 0        |
| 21 | Kecamatan Cipicung      | 5362          | 391          | 1393         | 3528          | 10         | 100         | 0        | 0        | 0        |
| 22 | Kecamatan Pancalang     | 4443          | 119          | 1207         | 3073          | 0          | 160         | 0        | 0        | 0        |
| 23 | Kecamatan Japara        | 6104          | 1112         | 1398         | 3594          | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 24 | Kecamatan Cimahi        | 11152         | 1357         | 2742         | 7053          | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 25 | Kecamatan Cilebak       | 3695          | 888          | 787          | 2020          | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 26 | Kecamatan Hantara       | 4802          | 1128         | 1023         | 2603          | 20         | 150         | 0        | 0        | 0        |
| 27 | Kecamatan Kalimanggis   | 5839          | 1033         | 1346         | 3424          | 10         | 150         | 0        | 0        | 0        |
| 28 | Kecamatan Cibeureum     | 6414          | 297          | 1712         | 4370          | 10         | 50          | 0        | 0        | 0        |
| 29 | Kecamatan Karangkencana | 6102          | 1302         | 1332         | 3440          | 0          | 150         | 0        | 0        | 0        |
| 30 | Kecamatan Maleber       | 11072         | 1945         | 2544         | 6474          | 0          | 372         | 0        | 0        | 0        |
| 31 | Kecamatan Sindangagung  | 2620          | 569          | 574          | 1457          | 0          | 50          | 0        | 0        | 0        |
| 32 | Kecamatan Cigandamekar  | 5417          | 941          | 1252         | 3224          | 0          | 0           | 0        | 0        | 0        |
|    | <b>JUMLAH</b>           | <b>191801</b> | <b>22525</b> | <b>47219</b> | <b>120268</b> | <b>165</b> | <b>4798</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi, 2017

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017

Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan



Tabel 2.9. Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

| No                                       | Jenis                     |                     | Satuan                   | Jumlah/<br>Kapasitas | Kondisi   |                 | Keterangan         |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------|--------------------|
|  |                           |                     |                          |                      | Berfungsi | Tidak Berfungsi |                    |
| (i)                                      | (ii)                      |                     | (iii)                    | (iv)                 | (v)       | (vi)            | (vii)              |
| <b>SPALD Terpusat (Sistem Off- site)</b> |                           |                     |                          |                      |           |                 |                    |
| 1  | SPALD – T<br>Permukiman   | Berbasis Masyarakat | unit                     | 145 unit             | √         | -               | -                  |
| 2  |                           | Berbasis Institusi  | unit                     | -                    | -         | -               | -                  |
| 3  | SPALD – T Perkotaan       |                     | unit                     | -                    | -         | -               | -                  |
| 4  | SPALD –T Kawasan Tertentu |                     | unit                     | -                    | -         | -               | -                  |
| <b>Pengelolaan Lumpur Tinja</b>          |                           |                     |                          |                      |           |                 |                    |
| 1  | Truk Tinja                |                     | unit                     | -                    | -         | -               | -                  |
| 2  | IPLT                      |                     | m <sup>3</sup> /<br>hari | -                    | -         | -               | Belum<br>Mempunyai |

Sumber : DPRPP Tahun 2017

Keterangan :

IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja



## **(2) Kelembagaan dan Peraturan**

Institusi yang terlibat dalam penanganan air limbah Domestik adalah:

- a. Bappeda Kabupaten Kuningan; kapasitasnya sebagai perencana sistem air limbah
- b. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan; kapasitasnya sebagai regulator pelayanan air limbah di Kabupaten Kuningan dan penanganan air limbah dengan sistem setempat maupun terpusat

Informasi secara detail ada di dalam **lampiran 1.3.3**

## **(3) Peran Serta Swasta dan Masyarakat**

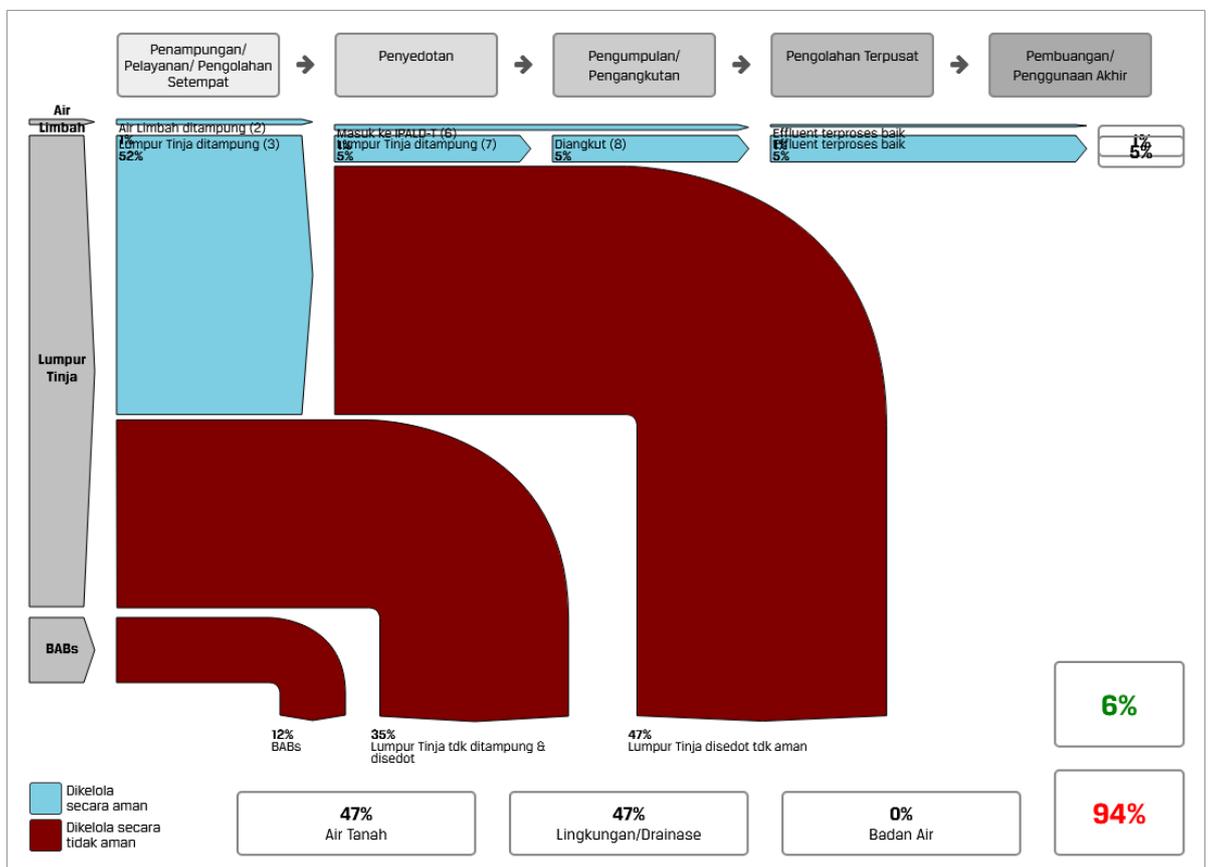
Di kabupaten Kuningan sendiri belum mempunyai sarana pengolahan air limbah domestik secara *terpusat* seperti IPLT dan IPAL Kawasan. Sehingga truk tinja milik pemerintah sendiri belum tersedia. Kebanyakan penduduk menggunakan jasa sedot tinja memanggil jasa dari Kabupaten atau Kota Cirebon, karena di Kabupaten Kuningan sendiri belum tersedia jasa tersebut.

Informasi detail secara detail akan dimasukkan dalam **lampiran 1.2.2 dan 1.2.5**



### Shit Flow Diagram (SFD)

SFD merupakan tahap lanjutan dalam pemetaan kondisi sanitasi di suatu Kabupaten/Kota setelah dilakukannya pemetaan melalui Diagram Sistem Sanitasi (DSS). Pemetaan DSS bersifat kualitatif, sedangkan pemetaan SFD bersifat kuantitatif yang bersumber dari pengumpulan data primer melalui studi EHRA maupun data sekunder yang ada di SKPD terkait. Pengguna SFD dapat memberi gambaran mengenai tingkat keamanan dari pengelolaan air limbah domestik eksisting. Berikut ini adalah gambar SFD air limbah domestik yang ada di Kabupaten Kuningan :



Sumber : witiestudio.com (SFD Graphic Generator- Indonesian Version)

Dari gambar SFD diatas dapat diketahui secara umum pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kuningan baru 6% yang dianggap aman, sedangkan sisanya yang 94 % masih belum aman.

Tabel Rekapitulasi *Shit Flow Diagram*

| Kode     | Keterangan  | Kode SFD  | Nilai (%)  |
|----------|---|-----------|------------|
| <b>A</b> | <b>Air Limbah</b>   | a0        |            |
| A1       | Air Limbah ditampung (SPALD-T skala Kota)                     | ax1       | <b>2</b>   |
| a        | Masuk ke IPALD-T skala Kota                                   | ay1       | 2          |
| b        | Bocor   | ay2       | 0          |
| i        | Effluent terproses baik                                       | az1       | 2          |
| ii       | Effluent terproses kurang baik                                | az2       | 0          |
| A2       | Air Limbah ditampung (SPALD-T skala Kawasan tertentu/aerobik) | ax2       | <b>1</b>   |
| a        | Masuk ke IPALD-T skala kawasan tertentu                       | ay4       | 1          |
| b        | Bocor   | ay3       | 0          |
| i        | Effluent terproses baik                                       | az4       | 1          |
| ii       | Effluent terproses kurang baik                                | az5       | 0          |
|          |   |           |            |
| <b>B</b> | <b>Lumpur Tinja</b>   | b0        |            |
| B1       | Lumpur tinja ditampung  | bx1       | <b>61</b>  |
| a        | Lumpur tinja ditampung disedot                                | by1       | <b>50</b>  |
| i        | Diangkut ke IPLT  | by4       | 3          |
| -        | Effluent terproses baik                                       | bz1       | 3          |
| -        | Effluent terproses kurang baik                                | bz2       | 0          |
| ii       | Tidak diangkut ke IPLT  | by5       | 47         |
| b        | Lumpur tinja ditampung tidak disedot/ tidak disedot aman      | by2       | 0          |
| B2       | Lumpur tinja tidak ditampung (SPALD-S Individual Tidak layak) | bx2 = by3 | <b>24</b>  |
| B3       | Pembuangan Langsung (setempat)                                | by6       | <b>0</b>   |
|          |   |           |            |
| <b>C</b> | <b>Tanpa Akses (BABS)</b>                                     | bx3       | <b>12</b>  |
|          | <b>TOTAL</b>  |           | <b>100</b> |
|          | Pencemaran ke Air Tanah                                       | x0        | 47         |
|          | Pencemaran ke Lingkungan - Drainase                           | y0        | 47         |
|          | Pencemaran ke Badan Air                                       | z0        | 0          |
|          | Pengelolaan Aman  | x         | <b>6</b>   |
|          | Tidak Aman  | y         | <b>94</b>  |

Sumber : witiestudio.com (SFD Graphic Generator- Indonesian Version), Intrumen SSK 2017



**b. Pengelolaan Persampahan**

Dalam pengelolaan persampahan ada beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan, monitoring dan evaluasi. Sebagian besar kewenangannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan yang dilakukan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan swasta diantaranya pembangunan sarana pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, penyediaan sarana komposting, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA termasuk pemilahan sampahnya. Peran masyarakat juga dapat dilihat dari aspek pengadaan sarana dan pengelolaan/pengumpulan sampah ditiap-tiap kecamatan.



(1) Sistem dan Infrastruktur

Gambar 2.2. Diagram Sistem Sanitasi Persampahan



Diagram sistem sanitasi pengelolaan persampahan diatas menggambarkan bahwa masyarakat kabupaten kuningan masih ada perilaku membakar sampah secara langsung, serta ada kegiatan pengelolaan sampah dengan cara pengkomposan di masyarakat.

Sampah dari rumah tangga maupun dari tempat-tempat fasilitas umum terbagi atas sampah organik dan sampah an-organik, dalam wadah/alat yang dipakai menggunakan tong sampah, kantong plastik/bak sampah, sedangkan untuk pengumpulan setempat menggunakan Gerobak



sampah/becak motor kemudaian ada yang langsung diangkut oleh dump truk untuk dibuang ke TPA, ada sebagian yang dikumpulkan di TPS/Container, TPS 3R dan Bank Sampah , kemudian diangkut menggunakan dump truck dan armroll truck lalu di daur ulang dibawa ke TPA Ciniru.

Untuk pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan saat ini baru mencakup 11 Kecamatan yang terdiri dari 48 Desa/ Kelurahan

12 Kecamatan itu adalah :

1. Kecamatan Kadugede = 3 desa layanan
2. Kecamatan Garawangi = 4 desa layanan
3. Kecamatan Kuningan = 9 kelurahan dan 2 desa layanan
4. Kecamatan Ciawigebang = 2 desa layanan
5. Kecamatan Jalksana = 6 desa layanan
6. Kecamatan Cilimus = 4 desa layanan
7. Kecamatan Kramatmulya = 5 desa layanan
8. Kecamatan Darma = 1 desa layanan
9. Kecamatan Cigugur = 4 kelurahan dan 1 desa layanan
10. Kecamatan Sindangagung = 4 desa layanan
11. Kecamatan Cigandamekar = 2 desa layanan
12. Kecamatan Luragung = RSUD KMC Luragung

Sedangkan untuk Kecamatan Luragung dalam hal ini Desa Luragung Landeuh melakukan pengelolaan sampah secara mandiri untuk diangkut ke TPA.

Peta Cakupan Layanan Persampahan di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada peta dibawah ini ;





Tabel 2.10. Tabel Penanganan Sampah Untuk Wilayah Perkotaan

| Nama Kecamatan        | Jumlah Penduduk (jiwa) | Tanpa Akses                           |       |  |       | Akses Layak   |       |  |       | Total                  |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|--|-------|---|-------|--|-------|------------------------|------|
|                       |                        | Sampah Tidak Terproses <sup>(1)</sup> |       | Sampah Dikelola Mandiri <sup>(2)</sup> |       | Sampah Tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah <sup>(3)</sup> |       | Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung) <sup>(4)</sup> |       |                        |      |
|                       |                        | (m <sup>3</sup> /hari)                | (%)   | (m <sup>3</sup> /hari)                 | (%)   | (m <sup>3</sup> /hari)                                    | (%)   | (m <sup>3</sup> /hari)   | (%)   | (m <sup>3</sup> /hari) | (%)  |
| (i)                   | (ii)                   | (iii)                                 |       | (iv)                                   |       | (v)   |       | (vi)   |       | (vii)                  |      |
| Kecamatan Kadugede    | 4.872                  | 32,72                                 | 0,98% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 16   | 0,48% | 48,72                  | 100% |
| Kecamatan Ciniru      | -                      | -                                     | 0,00% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 0                      | 100% |
| Kecamatan Subang      | -                      | -                                     | 0,00% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 0                      | 100% |
| Kecamatan Ciwaru      | -                      | -                                     | 0,00% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 0                      | 100% |
| Kecamatan Cibingbin   | 4.321                  | 43,21                                 | 1,30% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 43,21                  | 100% |
| Kecamatan Luragung    | 9.159                  | 82,79                                 | 2,48% | 0                                      | 0,00% | 4,8   | 0,14% | 4  | 0,12% | 91,59                  | 100% |
| Kecamatan Lebakwangi  | 2.791                  | 27,91                                 | 0,84% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 27,91                  | 100% |
| Kecamatan Garawangi   | 3.936                  | 32,36                                 | 0,97% | 0                                      | 0,00% | 1   | 0,03% | 6  | 0,18% | 39,36                  | 100% |
| Kecamatan Kuningan    | 38.865                 | 265,84                                | 7,98% | 0                                      | 0,00% | 1,8   | 0,05% | 121  | 3,63% | 388,65                 | 100% |
| Kecamatan Ciawigebang | 15.481                 | 137,00                                | 4,11% | 0                                      | 0,00% | 1,8   | 0,05% | 16   | 0,48% | 154,805                | 100% |
| Kecamatan Cidahu      | 4.117                  | 41,11                                 | 1,23% | 0                                      | 0,00% | 0,06  | 0,00% | 0  | 0,00% | 41,17                  | 100% |

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017

Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan



|                       |        |       |       |   |       |     |       |    |       |       |      |
|-----------------------|--------|-------|-------|---|-------|-----|-------|----|-------|-------|------|
| Kecamatan Jalaksana   | 4.800  | 15,40 | 0,46% | 0 | 0,00% | 4,6 | 0,14% | 28 | 0,84% | 48    | 100% |
| Kecamatan Cilimus     | 12.040 | 82,19 | 2,47% | 0 | 0,00% | 8,2 | 0,25% | 30 | 0,90% | 120,4 | 100% |
| Kecamatan Mandirancan | 2.490  | 24,90 | 0,75% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 24,9  | 100% |
| Kecamatan Selajambe   | -      | -     | 0,00% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 0     | 100% |
| Kecamatan Kramatmulya | 7.330  | 46,30 | 1,39% | 0 | 0,00% | 1   | 0,03% | 26 | 0,78% | 73,3  | 100% |
| Kecamatan Darma       | 2.385  | 11,85 | 0,36% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 12 | 0,36% | 23,85 | 100% |
| Kecamatan Cigugur     | 9.759  | 65,59 | 1,97% | 0 | 0,00% | 1   | 0,03% | 31 | 0,93% | 97,59 | 100% |
| Kecamatan Pasawahan   | -      | -     | 0,00% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 0     | 100% |
| Kecamatan Nusaherang  | 1.765  | 17,65 | 0,53% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 17,65 | 100% |
| Kecamatan Cipicung    | 1.586  | 15,86 | 0,48% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 15,86 | 100% |
| Kecamatan Pancalang   | 1.588  | 15,88 | 0,48% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 15,88 | 100% |
| Kecamatan Japara      | -      | -     | 0,00% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 0     | 100% |
| Kecamatan Cimahi      | -      | -     | 0,00% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 0     | 100% |
| Kecamatan Cilebak     | -      | -     | 0,00% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 0     | 100% |
| Kecamatan Hantara     | -      | -     | 0,00% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 0     | 100% |
| Kecamatan Kalimanggis | 1.722  | 17,22 | 0,52% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 17,22 | 100% |
| Kecamatan Cibeureum   |        |       | 0,00% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 0     | 100% |

**Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017**

**Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan**



|                        |                |              |               |          |              |           |          |            |              |              |      |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| Kecamatan Karangancana | -              | -            | 0,00%         | 0        | 0,00%        | 0         | 0,00%    | 0          | 0,00%        | 0            | 100% |
| Kecamatan Maleber      | 1.692          | 16,92        | 0,51%         | 0        | 0,00%        | 0         | 0,00%    | 0          | 0,00%        | 16,92        | 100% |
| Kecamatan Sindangagung | 7.624          | 53,24        | 1,60%         | 0        | 0,00%        | 2         | 0,06%    | 21         | 0,63%        | 76,24        | 100% |
| Kecamatan Cigandamekar | 3.034          | 20,34        | 0,61%         | 0        | 0,00%        | 0         | 0,00%    | 10         | 0,30%        | 30,34        | 100% |
| <b>JUMLAH</b>          | <b>141.357</b> | <b>1.066</b> | <b>32,00%</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>26</b> | <b>0</b> | <b>321</b> | <b>9,64%</b> | <b>1.414</b> |      |

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- Sampah tidak terproses = 32 % (1.066 m<sup>3</sup>/hari)
- Sampah dikelola mandiri = -
- Sampah tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah = 1 % (26 m<sup>3</sup>/hari)
- Sampah terangkut di TPA = 9,64% (1.414 m<sup>3</sup>/hari)



Tabel 2.10. Tabel Penanganan Sampah Untuk Wilayah Perdesaan

| Nama Kecamatan        | Jumlah Penduduk (jiwa) | Tanpa Akses                           |       |  |       | Akses Layak   |       |  |       | Total                  |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|--|-------|---|-------|--|-------|------------------------|------|
|                       |                        | Sampah Tidak Terproses <sup>(1)</sup> |       | Sampah Dikelola Mandiri <sup>(2)</sup> |       | Sampah Tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah <sup>(3)</sup> |       | Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung) <sup>(4)</sup> |       |                        |      |
|                       |                        | (m <sup>3</sup> /hari)                | (%)   | (m <sup>3</sup> /hari)                 | (%)   | (m <sup>3</sup> /hari)                                    | (%)   | (m <sup>3</sup> /hari)   | (%)   | (m <sup>3</sup> /hari) | (%)  |
| (i)                   | (ii)                   | (iii)                                 |       | (iv)                                   |       | (v)   |       | (vi)   |       | (vii)                  |      |
| Kecamatan Kadugede    | 2.884                  | 27,84                                 | 0,84% | 0                                      | 0,00% | 1   | 0,03% | 0  | 0,00% | 28,84                  | 100% |
| Kecamatan Ciniru      | 5.705                  | 57,05                                 | 1,71% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 57,05                  | 100% |
| Kecamatan Subang      | 5.118                  | 51,18                                 | 1,54% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 51,18                  | 100% |
| Kecamatan Ciwaru      | 9.304                  | 91,16                                 | 2,74% | 0                                      | 0,00% | 1,84  | 0,06% | 0,04   | 0,00% | 93,04                  | 100% |
| Kecamatan Cibingbin   | 7.656                  | 75,56                                 | 2,27% | 0                                      | 0,00% | 1   | 0,03% | 0  | 0,00% | 76,56                  | 100% |
| Kecamatan Luragung    | 5.994                  | 59,94                                 | 1,80% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 59,94                  | 100% |
| Kecamatan Lebakwangi  | 9.379                  | 93,79                                 | 2,82% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 93,79                  | 100% |
| Kecamatan Garawangi   | 7.373                  | 64,73                                 | 1,94% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 9  | 0,27% | 73,73                  | 100% |
| Kecamatan Kuningan    | -                      | -                                     | 0,00% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 0                      | 100% |
| Kecamatan Ciawigebang | 7.506                  | 75,05                                 | 2,25% | 0                                      | 0,00% | 0   | 0,00% | 0  | 0,00% | 75,05                  | 100% |
| Kecamatan Cidahu      | 8.773                  | 87,65                                 | 2,63% | 0                                      | 0,00% | 0,04  | 0,00% | 0,04   | 0,00% | 87,73                  | 100% |

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017

Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan



|                       |        |        |       |   |       |     |       |   |       |        |      |
|-----------------------|--------|--------|-------|---|-------|-----|-------|---|-------|--------|------|
| Kecamatan Jalaksana   | 8.751  | 78,51  | 2,36% | 0 | 0,00% | 1   | 0,03% | 8 | 0,24% | 87,51  | 100% |
| Kecamatan Cilimus     | 1.919  | 19,19  | 0,58% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 19,19  | 100% |
| Kecamatan Mandirancan | 4.207  | 42,07  | 1,26% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 42,07  | 100% |
| Kecamatan Selajambe   | 4.579  | 45,79  | 1,37% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 45,79  | 100% |
| Kecamatan Kramatmulya | 4.430  | 33,70  | 1,01% | 0 | 0,00% | 5,6 | 0,17% | 5 | 0,15% | 44,3   | 100% |
| Kecamatan Darma       | 13.156 | 131,55 | 3,95% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 131,56 | 100% |
| Kecamatan Cigugur     | 2.579  | 20,99  | 0,63% | 0 | 0,00% | 1,8 | 0,05% | 3 | 0,09% | 25,79  | 100% |
| Kecamatan Pasawahan   | 6.550  | 65,50  | 1,97% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 65,5   | 100% |
| Kecamatan Nusaherang  | 2.916  | 26,36  | 0,79% | 0 | 0,00% | 2,8 | 0,08% | 0 | 0,00% | 29,16  | 100% |
| Kecamatan Cipicung    | 5.362  | 53,62  | 1,61% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 53,62  | 100% |
| Kecamatan Pancalang   | 4.443  | 44,43  | 1,33% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 44,43  | 100% |
| Kecamatan Japara      | 6.104  | 61,04  | 1,83% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 61,04  | 100% |
| Kecamatan Cimahi      | 11.152 | 111,52 | 3,35% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 111,52 | 100% |
| Kecamatan Cilebak     | 3.695  | 36,95  | 1,11% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 36,95  | 100% |
| Kecamatan Hantara     | 4.802  | 48,02  | 1,44% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 48,02  | 100% |
| Kecamatan Kalimanggis | 5.839  | 58,39  | 1,75% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 58,39  | 100% |
| Kecamatan Cibeureum   |        |        | 1,93% | 0 | 0,00% | 0   | 0,00% | 0 | 0,00% | 64,14  | 100% |



|                        |                |              |               |          |              |           |              |           |              |              |      |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|
|                        | 6.414          | 64,14        |               |          |              |           |              |           |              |              |      |
| Kecamatan Karangancana | 6.102          | 60,02        | 1,80%         | 0        | 0,00%        | 1         | 0,03%        | 0         | 0,00%        | 61,02        | 100% |
| Kecamatan Maleber      | 11.072         | 110,72       | 3,32%         | 0        | 0,00%        | 0         | 0,00%        | 0         | 0,00%        | 110,72       | 100% |
| Kecamatan Sindangagung | 2.620          | 26,20        | 0,79%         | 0        | 0,00%        | 0         | 0,00%        | 0         | 0,00%        | 26,2         | 100% |
| Kecamatan Cigandamekar | 5.417          | 54,17        | 1,63%         | 0        | 0,00%        | 0         | 0,00%        | 0         | 0,00%        | 54,17        | 100% |
| <b>JUMLAH</b>          | <b>191.801</b> | <b>1.877</b> | <b>56,33%</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>16</b> | <b>0,48%</b> | <b>25</b> | <b>0,75%</b> | <b>1.918</b> |      |

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- Sampah tidak terproses = 56,33 % (1.877 m<sup>3</sup>/hari)
- Sampah dikelola mandiri = -
- Sampah tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah = 0,48 % (16 m<sup>3</sup>/hari)
- Sampah terangkut di TPA = 0,75% (25 m<sup>3</sup>/hari)

Untuk perlakuan sampah secara 3R diharapkan pada tahun mendatang akan terus meningkat sehingga pemanfaatan sampah mempunyai nilai ekonomis.



Tabel 2.11. Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan

| No  | Jenis Prasarana/<br>Sarana | Satuan | Jumlah | Kapasitas                  | Ritasi/<br>hari | Kondisi |              |             | Keterangan* |
|-----|----------------------------|--------|--------|----------------------------|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|
|     |                            |        |        |                            |                 | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |             |
| (i) | (ii)                       | (iii)  | (iv)   | (v)                        | (vi)            | (vii)   | (viii)       | (ix)        | (x)         |
| 1   | Pewadahan                  |        |        |                            |                 |         |              |             |             |
|     | A. Individual              | unit   |        |                            |                 | -       | -            | -           |             |
|     | - Bak Biasa                | unit   | 118    | 0,006 m <sup>3</sup> /hari |                 | 88 Unit | 16 Unit      | 22 Unit     |             |
|     | B. Komunal                 |        |        |                            |                 |         |              |             |             |
|     | - Kontainer                | unit   | 34     | 6 m <sup>3</sup> /hari     |                 | 34 unit |              |             |             |
|     | - Transfer Depo            | unit   | 34     | 6 m <sup>3</sup> /hari     |                 | 34 unit |              |             |             |
| 2   | Pengumpulan                |        |        |                            |                 |         |              |             |             |
|     | - Gerobak Sampah           | unit   | 65     | 0,6 m <sup>3</sup> /hari   |                 | 32 unit | 33 unit      | -           |             |
|     | - Motor Sampah             | unit   | 9      | 1- 2 m <sup>3</sup> /hari  |                 | 9 unit  |              | -           |             |
|     | - Pick up sampah           | unit   | -      |                            |                 |         |              | -           |             |
| 3   | Pengangkutan               |        |        |                            |                 |         |              |             |             |
|     | - Dump Truck               | unit   | 15     | 6 m <sup>3</sup> /hari     |                 | 15 unit | -            | -           |             |
|     | - Arm Roll Truck           | unit   | 6      | 5 m <sup>3</sup> /hari     |                 | 6 unit  | -            | -           |             |
|     | - Compactor Truck          | unit   |        |                            |                 | -       | -            | -           |             |
| 4   | Pengolahan Sampah          |        |        |                            |                 |         |              |             |             |



|   |  |                         |                           |                            |  |  |  |   |
|---|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|--|---|
|   | - TPS 3R                               | unit                    | 14                        |                            |  |  |  |   |
|   | - SPA                                  | unit                    |                           |                            |  |  |  |   |
|   | - ITF                                  | unit                    |                           |                            |  |  |  |   |
|   | - Bank Sampah                          | unit                    | 17                        |                            |  |  |  |   |
|   | - Incenerator                          | unit                    |                           |                            |  |  |  |   |
| 5 | TPA/ TPA Regional                      |                         |                           |                            |  |  |  | - Lahan urug saniter<br>- Lahan urug terkendali<br>- Penimbunan terbuka |
|   | - Luas total lahan TPA                 | Ha                      | 5,2 ha                    |                            |  |  |  |   |
|   | - Luas sel Landfill                    | Ha                      |                           |                            |  |  |  |   |
|   | - Daya tampung TPA                     | (m <sup>3</sup> / hari) | 200 m <sup>3</sup> / hari |                            |  |  |  |   |
| 6 | Alat Berat                             |                         |                           |                            |  |  |  |   |
|   | - Bulldozer                            | unit                    | 1                         | 0,5 m <sup>3</sup> / menit |  |  |  | Rusak Berat   |
|   | - Excavator/ Backhoe                   | unit                    | 1                         | 0,5 m <sup>3</sup> / menit |  |  |  | Rusak Sedang  |
|   | - Truk Tanah                           | unit                    | 1                         |                            |  |  |  | fleksible   |
| 7 | IPL                                    |                         |                           |                            |  |  |  |   |
|   | Hasil pemeriksaan Lab. (BOD dan COD) : |                         | Tidak Ada                 |                            |  |  |  | Hasil pemeriksaan Lab ditulis dibawah ini : akan dilampirkan hasilnya   |
|   | - Efluen di Inlet                      | mg/ l                   | Tidak Ada                 |                            |  |  |  |   |
|   | - Efluen di Outlet                     | mg/ l                   | Tidak Ada                 |                            |  |  |  |   |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2017

Keterangan : IPL : Instalasi Pengolahan Lindi



### (2) Kelembagaan dan Peraturan

Institusi yang terlibat dalam penanganan persampahan adalah:

- a. Bappeda Kabupaten Kuningan; kapasitasnya sebagai perencana sistem persampahan di Kabupaten Kuningan
- b. Dinas Lingkungan Hidup; kapasitasnya sebagai regulator dan operator sistem persampahan
- c. UPTD TPA sebagai operator pelayanan sampah di TPA

Di Kabupaten Kuningan sudah ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan persampahan yaitu Perda No 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Informasi lebih detail akan dimasukkan ke dalam **lampiran 1.3.3**

### (3) Peran Serta Swasta dan Masyarakat

Untuk peran swasta dalam pengelolaan persampahan masih seputar penyediaan sarana dan prasarana kebersihan seperti tong sampah. Belum ada kerjasama yang bersifat makro dalam pengelolaan persampahan

Sedangkan untuk peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan adalah dengan melakukan pemilahan sampah dan komposting sampah yang persentasenya masih sangat kecil, yaitu sekitar 2% saja.

Informasi detail secara detail akan dimasukkan dalam **lampiran 1.2.2 dan 1.2.5**

### c. Drainase Perkotaan

#### (1) Sistem dan Infrastruktur

Sistem jaringan drainase perkotaan umumnya dibagi atas 2 bagian, yaitu :

1. **Sistem Drainase Mayor**, Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (Catchment Area). Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (major system) atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai.

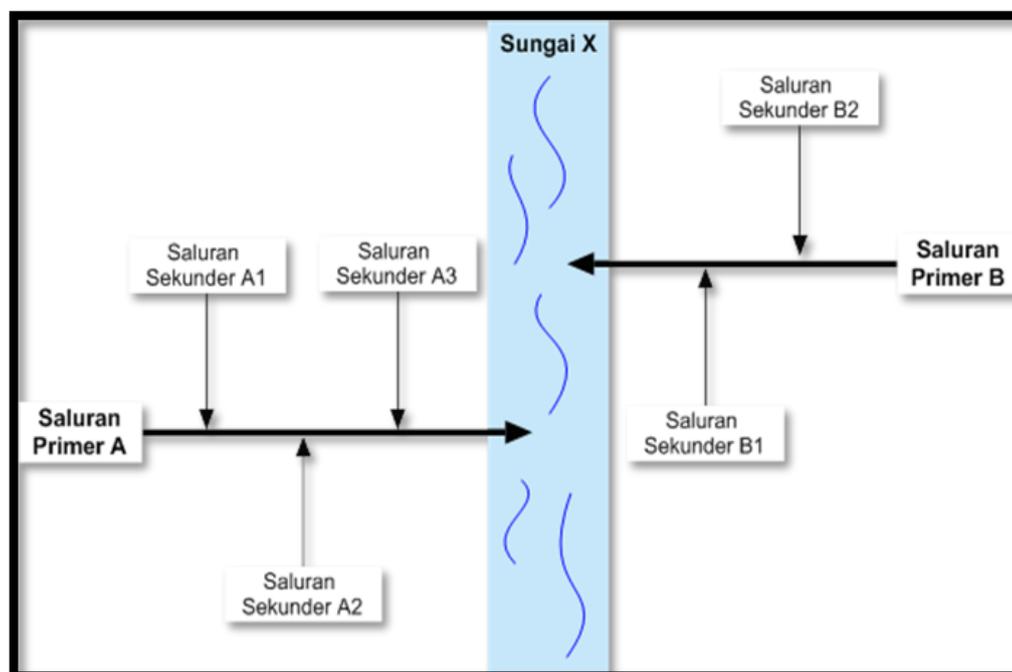


Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 sampai 10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini.

2. **Sistem Drainase Mikro**, Sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar. Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2, 5 atau 10 tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro.

Dalam PPSP, sistem drainase yang menjadi tanggung jawab daerah (kabupaten/kota) adalah sistem drainase mikro.

**Gambar 2.3. Diagram Sistem Sanitasi Sub Sektor Drainase**



**Tabel 2.12. Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan**

| No | Lokasi Genangan                                | Wilayah Genangan |            |            |              | Penyebab *** | Infrastruktur * |        |
|----|--|------------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
|    |  | Luas             | Ketinggian | Lama       | Frekuensi    |              | Jenis           | Ket.** |
|    |  | (Ha)             | (m)        | (jam/hari) | (kali/tahun) |              |                 |        |
|    | Jl. Veteran (Depan SD Kuningan)                | -                | -          | 1          | 1            | -            | -               | -      |
|    | Jl. Pasar baru                                 | -                | -          | 1          | 1            | -            | -               | -      |
|    | Jl. Jend Sudirman (Akbar Optical)              |                  |            | 1          | 1            |              |                 |        |
|    | Jl. Junda Pasar baru (minimarket terbit)       |                  |            | 1          | 1            |              |                 |        |
|    | Jl. Aruji                                      |                  |            | 1,5        | 1            |              |                 |        |
|    | Jl. Raya Awirarangan                           |                  |            | 1          | 1            |              |                 |        |
|    | Jl. Wijaya (belakang SD)                       |                  |            | 4,5        | 1            |              |                 |        |
|    | Jl. Siliwangi (jembatan Cigembang)             |                  |            | 4,5        | 1            |              |                 |        |
|    | Jl. R/E Martadinata (Cijoho – SMP 4)           |                  |            | 1          | 1            |              |                 |        |
|    | Jl. R/E Martadinata (gg. Kelapa TK Bina Tunas) |                  |            | 1          | 1            |              |                 |        |
|    | Jl. Pramuka                                    |                  |            | 1          | 1            |              |                 |        |



|  |  |   |   |     |   |   |   |   |
|--|--|---|---|-----|---|---|---|---|
|  | Jl. Siliwangi (depan Pemda- SMP 1)             |   |   | 1,5 | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Syeh Maulana Akbar                         |   |   | 4,5 | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Raya Cigadung – Ciamis                     |   |   | 3   | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Pramuka (depan Kantor Lurah Purwawinangun) |   |   | 4,5 | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Raya Sukamulya                             |   |   | 4,5 | 1 |   |   |   |
|  | Jl . Moh. Toha (Simpang 4)                     |   |   | 1,5 | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Raya Desa Padarek                          |   |   | 1   | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Raya Desa Kasturi                          |   |   | 1   | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Syeh Magelung (Depan Kantor Desa Kasturi)  |   |   | 1   | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Raya Desa Clendang                         |   |   | 2   | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Kelurahan Cigugur                          |   |   | 1,5 | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Kelurahan Clbinuang                        |   |   | 1,5 | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Lapangan Windusengkahan                    |   |   | 1   | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Raya Karangtawang                          |   |   | 1   | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Jend. Sudirman                             |   |   | 1   | 1 |   |   |   |
|  | Jl. A Yani                                     |   |   | 1   | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Blok Karang Anyar                          |   |   | 1   | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Cisumur                                    |   |   | 4,5 | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Cipari Menuju Winduherang (50M)            |   |   | 1   | 1 |   |   |   |
|  | Jl. Raya Winduherang                           |   |   | 1   | 1 |   |   |   |
|  | -  | - | - | -   | - | - | - | - |

Sumber : DPRPP, 2017

Tabel 2.13. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Kuningan

| No  | Jenis Prasarana       | Satuan   | Bentuk Penampang Saluran * | Dimensi |      | Kondisi   |                 | Frekuensi Pemeliharaan (kali/ tahun) |
|-----|-----------------------|----------|----------------------------|---------|------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
|     |                       |          |                            | B**     | H*** | Berfungsi | Tidak Berfungsi |                                      |
| (i) | (ii)                  | (iii)    | (iv)                       | (v)     | (vi) | (vii)     | (viii)          | (ix)                                 |
| 1   | - Saluran Primer A    | 38.202 m |                            |         |      | √         |                 |                                      |
|     | - Saluran Sekunder A1 | m        |                            |         |      |           |                 |                                      |
|     | - Saluran Sekunder A2 | m        |                            |         |      |           |                 |                                      |
|     | - Saluran Tersier A1  | m        |                            |         |      |           |                 |                                      |



|   |                               |      |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
|   | Bangunan Pelengkap            |      |  |  |  |  |  |  |
|   | - Rumah Pompa                 | unit |  |  |  |  |  |  |
|   | - Pintu Air                   | unit |  |  |  |  |  |  |
|   | - Kolam Retensi               | unit |  |  |  |  |  |  |
|   | - Trash rack/ saringan sampah | unit |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Saluran Primer B            | m    |  |  |  |  |  |  |
|   | - Saluran Sekunder B1         | m    |  |  |  |  |  |  |
|   | - Saluran Tersier B2          | m    |  |  |  |  |  |  |
|   | Bangunan Pelengkap            |      |  |  |  |  |  |  |
|   | - Rumah Pompa                 | unit |  |  |  |  |  |  |
|   | - Pintu Air                   | unit |  |  |  |  |  |  |
|   | - Kolam Retensi               | unit |  |  |  |  |  |  |
|   | - Trash rack/ saringan sampah | unit |  |  |  |  |  |  |

Sumber :

Keterangan :

\*Bentuk Penampang Saluran : segi empat atau trapezium

\*\*B : Lebar dasar saluran

\*\*\*H : Tinggi saluran

Kondisi saluran Drainase di Kabupten Kuningan belum terdapat pembagian berdasarkan nama jalan atau nama sungai. Hal ini memberikan masukan kepada dinas teknis untuk dapat memberikan data mengenai kondisi saluran Drainase di Kabupaten Kuningan berdasarkan saluran Primer, saluran Sekunder, dan saluran Tersier. Kondisi saluran drainase dikabupaten Kuningan berdasarkan data outplane drainase tergolong sangat buruk hal ini bias dilihat terjadinya genangan pada badan jalan terutama di wilayah perkotaan, genangan umumnya disebabkan oleh saluran drainase yang tertutup sampah serta terjadi memepet sehingga air keluar dari bak control. Untuk saluran drainase dikabupaten Kuningan, yang sudah ada saat ini baru mengikuti jalan raya yang ada diperkotaan dengan panjang saluran yaitu 38.202 m. dalam hal ini dikategorikan sebagai salurah primer yang terletak mengikuti jalan-jalan protocol di wilayah perkotaan Kabupaten Kuningan.

## (2) Kelembagaan dan Peraturan

Institusi yang terlibat dalam penanganan drainase lingkungan adalah :

- a. Bappeda Kabupaten Kuningan; kapasitasnya sebagai perencana sistem drainase



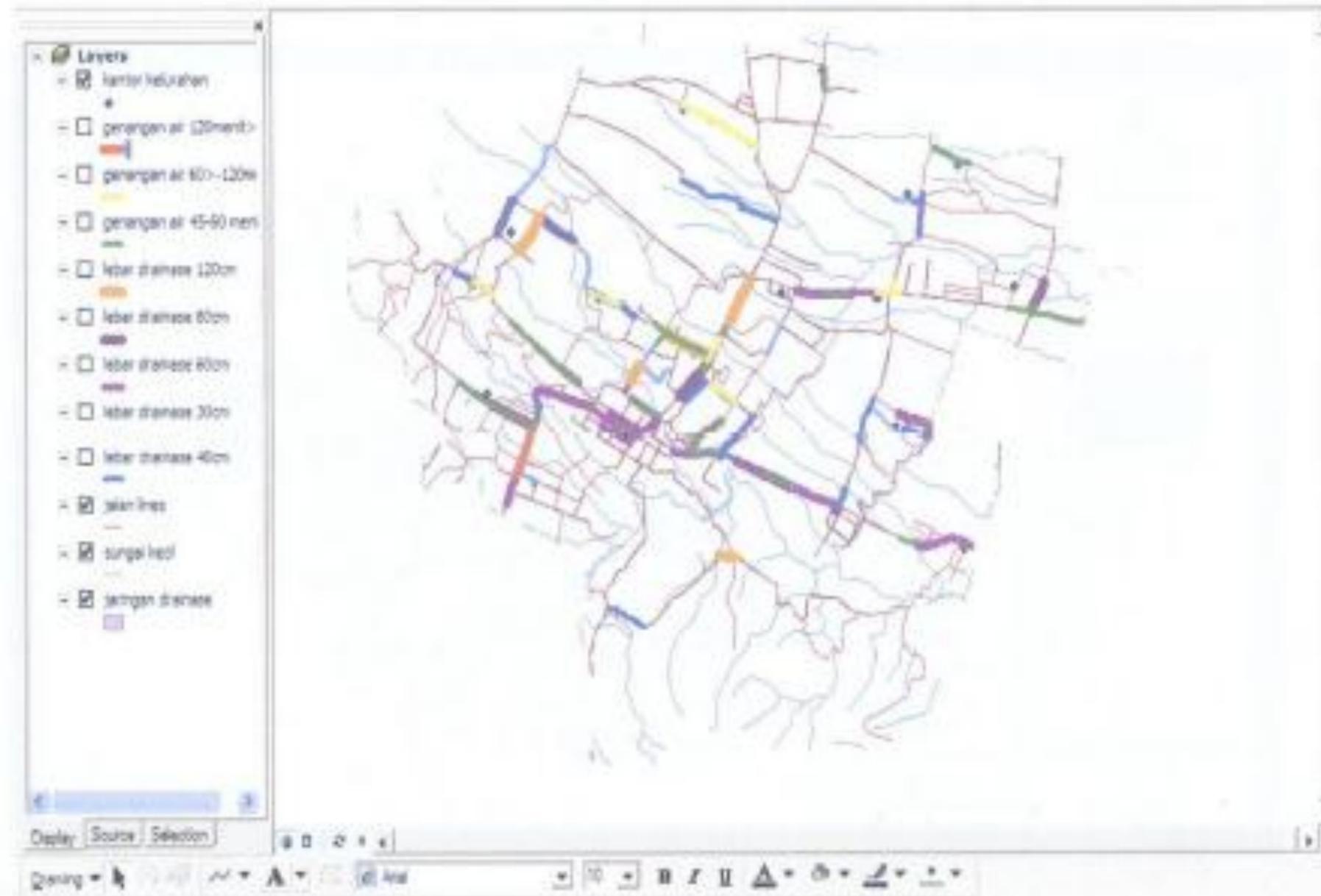
- b. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan kapasitasnya sebagai regulator dan operator pelayanan drainase tersier/ lingkungan

**(3) Peran Serta Swasta dan Masyarakat**

Informasi detail secara detail akan dimasukkan dalam lampiran 1.2.2 dan 1.2.5



Peta 2.6. Lokasi Genangan



Sumber : outline plan dinas TRK Kab. Kuningan



### 1.4 Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

#### a. Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah

Penentuan area risiko sanitasi di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan cara pemberian skoring pada 376 desa/kelurahan berdasarkan beberapa indikator yang berasal dari data sekunder, persepsi SKPD dan studi EHRA. Masing –masing indikator tadi kemudian diberi skor pembobotan sebagai berikut :

- Data Sekunder = bobot skor 30%
- Studi EHRA = bobot skor 30%
- Persepsi SKPD = bobot skor 40%

Dalam hal ini persepsi SKPD diberi bobot skor paling tinggi dikarenakan Studi EHRA pada Tahun 2017 ini tidak dilakukan sehingga untuk penyusunan dokumen pemutakhiran SSK ini masih menggunakan data Studi EHRA Tahun 2013.

Indikator-indikator yang digunakan merupakan hasil kesepakatan pokja, yaitu:

1. Persepsi SKPD merupakan penilaian secara subyektif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman di lapangan terhadap kondisi sanitasi di setiap desa/kelurahan, dari masing - masing institusi yang menjadi anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan, dalam hal ini diwakili oleh Bappeda, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta Unsur Setda yaitu Bagian Administrasi Pembangunan, dengan bobot penilaian sebagai berikut:
  - a. Angka 1 : Resiko Sanitasi Rendah
  - b. Angka 2 : Resiko Sanitasi Menengah
  - c. Angka 3 : Resiko Sanitasi Sedang
  - d. Angka 4 : Resiko Sanitasi Tinggi

Adapun kriteria dalam penilaian didasarkan pada hal-hal berikut:

- Kondisi wilayah : meliputi kepadatan penduduk, kondisi genangan air dan daerah terlewati sungai



- Kondisi sosial : meliputi tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi dan kelembagaan
  - Kondisi layanan sanitasi : meliputi layanan air limbah domestik, persampahan dan drainase
2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia di SKPD terkait di Kabupaten Kuningan sebagai indikator untuk menentukan kondisi area risiko sanitasi, antara lain :
- a. Kepadatan penduduk : membandingkan antara jumlah penduduk tiap desa/kelurahan wilayah kajian dengan luas wilayah efektif desa/kelurahan
  - b. Keluarga Miskin : merupakan prosentasi antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk seluruh di masing-masing desa/kelurahan wilayah studi
  - c. Tingkat pelayanan air minum PDAM : merupakan cakupan pelayanan PDAM berupa sambungan rumah dan hidran umum dibandingkan dengan total populasi di masing-masing desa/kelurahan wilayah studi.
  - d. Akses terhadap kepemilikan jamban pribadi : merupakan perbandingan antara jumlah jamban pribadi dengan jumlah rumah di masing-masing desa/kelurahan wilayah studi.
3. Studi EHRA merupakan data primer yang diambil dari 50 desa/kelurahan dengan jumlah 2000 responden. Beberapa hasil studi EHRA tersebut dipilih dan disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kuningan sebagai indikator penentu area risiko sanitasi.

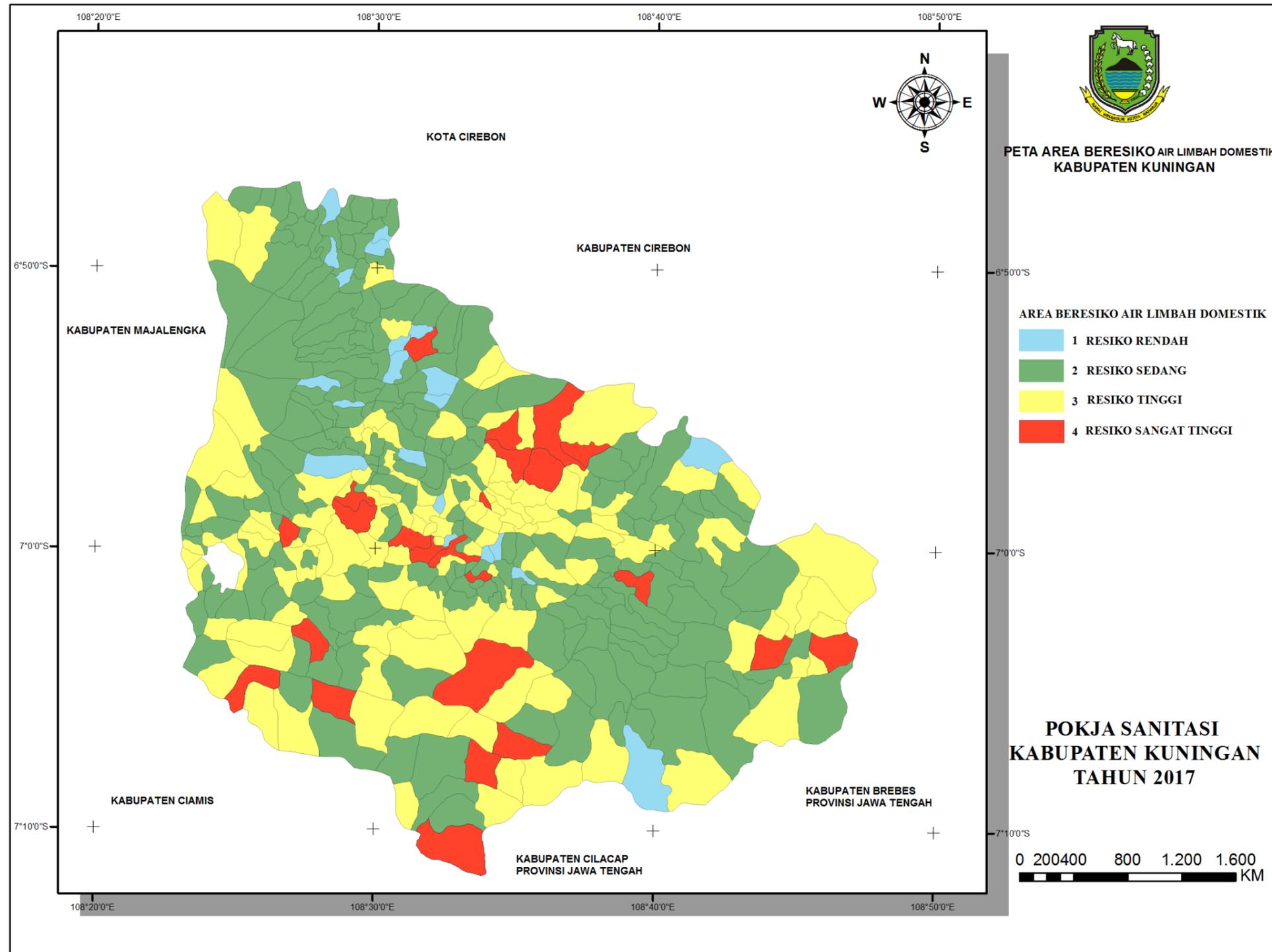
Dari hasil skoring terhadap 3 (tiga) factor penilaian dapat diidentifikasi 17 desa/kelurahan yang beresiko Sangat tinggi (skor tertinggi = 4), yang ditunjukkan dengan warna merah dan 54 desa/kelurahan yang beresiko Tinggi (skor = 3), yang ditunjukkan dengan warna kuning. Sementara sisanya yaitu sebanyak 99 desa/kelurahan mempunyai resiko sanitasi sedang ditunjukkan dengan warna biru



dan sebanyak 206 Desa/Kelurahan memiliki tingkat resiko sanitasi rendah yang ditunjukkan dengan warna hijau.



Peta Area Beresiko Sanitasi Sektor Air Limbah Domestik





Tabel 2.14. Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik

| No                     | Area Berisiko *) | Wilayah Prioritas     |                         |
|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                        |                  | Kecamatan             | Kelurahan/Desa          |
| 1                      | Risiko 4         | Kecamatan Kadugede    | Desa Bayuning           |
|                        |                  | Kecamatan Cibingbin   | Desa Cibingbin          |
|                        |                  | Kecamatan Luragung    | Desa Luragung Landeuh   |
|                        |                  | Kecamatan Garawangi   | Desa Garawangi          |
|                        |                  |                       | Desa Purwasari          |
|                        |                  |                       | Desa Lengkong           |
|                        |                  | Kecamatan Kuningan    | Kelurahan Kuningan      |
|                        |                  |                       | Kelurahan Purwawinangun |
|                        |                  | Kecamatan Ciawigebang | Desa Sukaraja           |
|                        |                  |                       | Desa Cigarukgak         |
|                        |                  |                       | Desa Sukadana           |
|                        |                  |                       | Desa Cikubangmulya      |
|                        |                  |                       | Desa Dukuhdalem         |
|                        |                  |                       | Desa Mekarjaya          |
|                        |                  | Kecamatan Selajambe   | Desa Bagawat            |
|                        |                  |                       | Desa Padahurip          |
|                        |                  | Kecamatan Cilebak     | Desa Jalatrang          |
|                        |                  |                       | Desa Patala             |
|                        |                  |                       | Desa Madapajaya         |
|                        |                  | Kecamatan Hantara     | Desa Hantara            |
| Kecamatan Cibeureum    | Desa Cibeureum   |                       |                         |
| Kecamatan Maleber      | Desa Cipakem     |                       |                         |
|                        | Desa Kutaraja    |                       |                         |
| Kecamatan Cigandamekar | Desa Timbang     |                       |                         |
| 2                      | Resiko 3         | Kecamatan Kadugede    | Desa Nangka             |
|                        |                  |                       | Desa Windujanten        |
|                        |                  |                       | Desa Kadugede           |
|                        |                  |                       | Desa Babatan            |
|                        |                  |                       | Desa Ciherang           |
|                        |                  |                       | Desa Margabakti         |



|                              |                       |                            |                    |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
|                              |                       | <b>Kecamatan Ciniru</b>    | Desa Cijeumit      |
|                              |                       |                            | Desa Cipedes       |
|                              |                       |                            | Desa Longkewang    |
|                              |                       |                            | Desa Gunungmanik   |
|                              |                       |                            | Desa Pamupukan     |
|                              |                       | <b>Kecamatan Subang</b>    | Desa Tangkolo      |
|                              |                       |                            | Desa Gununggaci    |
|                              |                       |                            | Desa Situgede      |
|                              |                       | <b>Kecamatan Ciwaru</b>    | Desa Citundun      |
|                              |                       |                            | Desa Lebakherang   |
|                              |                       | <b>Kecamatan Cibingbin</b> | Desa Sindangjawa   |
|                              |                       |                            | Desa Ciangir       |
|                              |                       |                            | Desa Citenjo       |
|                              |                       |                            | Desa Dukuhbadag    |
|                              |                       |                            | Desa Bantarpanjang |
|                              |                       |                            | Desa Sukaharja     |
|                              |                       | <b>Kecamatan Luragung</b>  | Desa CiraHayu      |
|                              |                       |                            | Desa Panyosogan    |
|                              |                       |                            | Desa Gunungkarung  |
| <b>Kecamatan Lebakwangi</b>  | Desa Cipeutir         |                            |                    |
|                              | Desa Mekarwangi       |                            |                    |
| <b>Kecamatan Garawangi</b>   | Desa Gewok            |                            |                    |
|                              | Desa Cirukem          |                            |                    |
|                              | Desa Karamatwangi     |                            |                    |
|                              | Desa Citiusari        |                            |                    |
|                              | Desa Mekarmulya       |                            |                    |
| <b>Kecamatan Kuningan</b>    | Kelurahan Citangtu    |                            |                    |
|                              | Kelurahan Winduhaji   |                            |                    |
|                              | Kelurahan Cijoho      |                            |                    |
|                              | Kelurahan Cirendang   |                            |                    |
|                              | Kelurahan Ciporang    |                            |                    |
|                              | Kelurahan Awirarangan |                            |                    |
|                              | Desa Cibuang          |                            |                    |
|                              | Desa Padarek          |                            |                    |
| <b>Kecamatan Ciawigebang</b> | Desa Geresik          |                            |                    |
|                              | Desa Kadurama         |                            |                    |
|                              | Desa Ciawigebang      |                            |                    |



|  |  |                              |                       |
|--|--|------------------------------|-----------------------|
|  |  |                              | Desa Lebaksiuh        |
|  |  |                              | Desa Ciputat          |
|  |  |                              | Desa Pajawan Lor      |
|  |  |                              | Desa Sidaraja         |
|  |  |                              | Desa Kapandayan       |
|  |  |                              | Desa Pangkalan        |
|  |  |                              | Desa Ciomas           |
|  |  |                              | Desa Cihaur           |
|  |  |                              | Desa Ciawi Lor        |
|  |  |                              | Desa Cihirup          |
|  |  |                              | Desa Pamijahan        |
|  |  |                              | Desa Karangkamulyan   |
|  |  |                              | Desa Padarama         |
|  |  |                              | Desa Cijagamulya      |
|  |  |                              |                       |
|  |  | <b>Kecamatan Cidahu</b>      | Desa Cihideung Hilir  |
|  |  |                              | Desa Datar            |
|  |  |                              | Desa Cikeusik         |
|  |  |                              | Desa Nanggela         |
|  |  |                              |                       |
|  |  | <b>Kecamatan Cilimus</b>     | Desa Cilimus          |
|  |  |                              |                       |
|  |  | <b>Kecamatan Selajambe</b>   | Desa Selajambe        |
|  |  |                              | Desa Cantilan         |
|  |  |                              | Desa Kutawaringin     |
|  |  |                              |                       |
|  |  | <b>Kecamatan Kramatmulya</b> | Desa Cilaja           |
|  |  |                              | Desa Kalapagunung     |
|  |  |                              | Desa Kramatmulya      |
|  |  |                              | Desa Karangmangu      |
|  |  |                              |                       |
|  |  | <b>Kecamatan Darma</b>       | Desa Cimenga          |
|  |  |                              | Desa Cageur           |
|  |  |                              | Desa Cipasung         |
|  |  |                              | Desa Kawah Manuk      |
|  |  |                              | Desa Cikupa           |
|  |  |                              | Desa Darma            |
|  |  |                              | Desa Jagara           |
|  |  |                              | Desa Sagarahiyang     |
|  |  |                              | Desa Situsari         |
|  |  |                              |                       |
|  |  | <b>Kecamatan Cigugur</b>     | Kelurahan Cigugur     |
|  |  |                              | Kelurahan Cigadung    |
|  |  |                              | Kelurahan Winduherang |
|  |  |                              | Kelurahan Cipari      |
|  |  |                              |                       |
|  |  | <b>Kecamatan Pasawahan</b>   | Desa Padabeunghar     |



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
|                         | Desa Pasawahan         |
|                         |                        |
| Kecamatan Nusaherang    | Desa Windusari         |
|                         | Desa Jambar            |
|                         | Desa Cikadu            |
|                         |                        |
| Kecamatan Cipicung      | Desa Karoya            |
|                         | Desa Pamulihan         |
|                         | Desa Suganangan        |
|                         | Desa Sukamukti         |
|                         |                        |
| Kecamatan Pancalang     | Desa Silebu            |
|                         |                        |
| Kecamatan Cimahi        | Desa Cimahi            |
|                         | Desa Mekarjaya         |
|                         |                        |
| Kecamatan Cilebak       | Desa Legokherang       |
|                         | Desa Bungurberes       |
|                         | Desa Cilebak           |
|                         |                        |
| Kecamatan Hantara       | Desa Tundagan          |
|                         | Desa Bunigeulis        |
|                         |                        |
| Kecamatan Kalimanggis   | Desa Kalimanggis Kulon |
|                         | Desa Kalimanggis Wetan |
|                         |                        |
| Kecamatan Cibeureum     | Desa Tarikolot         |
|                         | Desa Randusari         |
|                         |                        |
| Kecamatan Karangkencana | Desa Jabranti          |
|                         | Desa Simpajaya         |
|                         |                        |
| Kecamatan Maleber       | Desa Ciporang          |
|                         | Desa Mekarsari         |
|                         | Desa Padamulya         |
|                         | Desa Mandalajaya       |
|                         | Desa Giriwaringin      |
|                         | Desa Buniasih          |
|                         |                        |
| Kecamatan Sindangagung  | Desa Sindangsari       |
|                         | Desa Kaduagung         |
|                         | Desa Kertaungaran      |
|                         | Desa Sindangagung      |
|                         | Desa Kertayasa         |
|                         | Desa Kertawangunan     |
|                         | Desa Babakanreuma      |
|                         |                        |



|  |  |                        |                  |
|--|--|------------------------|------------------|
|  |  | Kecamatan Cigandamekar | Desa Bunigeulis  |
|  |  |                        | Desa Jambugeulis |

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Kuningan 2017

Catatan : \*) Hanya untuk wilayah resiko 4 dan 3

**Tabel 2.15. Permasalahan Mendesak Sub Sektor Air Limbah Domestik**

| No  | Permasalahan Mendesak   |
|---|---|
| 1   | <b>Aspek Teknis</b> : Pengembangan Sarana dan Prasarana (sarana pengguna – sub sistem pengolahan setempat – sub sistem pengangkutan/pengumpulan – sub sistem pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat - lingkungan) serta Dokumen Perencanaan Teknis   |
| Sarana Pengguna   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data BABS versi Studi EHRA Tahun 2013 = 15%</li> <li>• Sedangkan Data Dari STBM Tahun 2017 versi dinas Kesehatan BABS = 20,1%</li> <li>• Perhitungan BABS versi Instrumen SSK = 11,77 % (39.212 KK)</li> </ul> <p>Dari beberapa versi data yang ada pada intinya tetap menunjukkan bahawa masih ada perilaku BABS di Kabupaten Kuningan</p>  |
| Sub-Sistem Pengolahan Setempat                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Studi EHRA Tahun 2013 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tangki septic suspek aman = 72,3%</li> <li>✓ tangki septic suspek tidak aman = 27,7 %</li> </ul> </li> <li>• Data Instrumen SSK Tahun 2017                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tangki septic suspek aman = 63,99 % (213.187 KK)</li> <li>✓ tangki septic suspek tidak aman = 24,65% (82.109 KK)</li> </ul> </li> </ul>         |
| Sub-Sistem Pengangkutan/ Pengumpulan                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Truk Tinja = 0 Unit</li> <li>• Data Studi EHRA 2013, pengangkutan lumpur tinja kepada masyarakat dilakukan oleh pihak swasta yang ada di luar wilayah Kabupaten Kuningan dengan data sebagai berikut :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tangki Septik dikosongkan dalam 1-10 tahun = 4,6% (15,325 KK)</li> <li>✓ Tangki Septik tidak pernah dikosongkan dalam &gt;10 tahun = 75,7 % (252.200 KK)</li> </ul> </li> </ul> |
| Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja/ Pengolahan Terpusat | Belum mempunyai IPLT  |
| Lingkungan  | Belum ada daur ulang dan belum dilaksanakan pendeteksian kualitas air limbah  |
| Perencanaan Teknis                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki dokumen Perencanaan Sanitasi (BPS, SSK, MPS, dan Pemutakhiran SSK)</li> <li>• Sudah memiliki Master Plan Air Limbah (disusun tahun 2017)</li> </ul>   |
| 2   | <b>Aspek Non Teknis</b> : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, Komunikasi  |
| Pendanaan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi pendanaan dari Pemerintah Kabupaten belum optimal</li> </ul>   |



|  |   |
|--|---|
| <i>Kelembagaan</i>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator</li><li>• Perhatian Pemda masih kurang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik (baik cair maupun padat)</li><li>• Belum memiliki UTPD yang khusus mengelola air limbah domestik</li></ul> |
| <i>Peraturan dan Perundang-undangan</i>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum memiliki perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah</li><li>• Perlu peningkatan koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan</li></ul>   |
| <i>Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah</li><li>• Masih kurangnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat</li><li>• Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi</li></ul>                |
| <i>Komunikasi</i>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik</li></ul>   |

Sumber : Instrumen SSK 2017, Data Studi EHRA 2013, Data STBM 2017, Analisis Pokja

### b. Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan

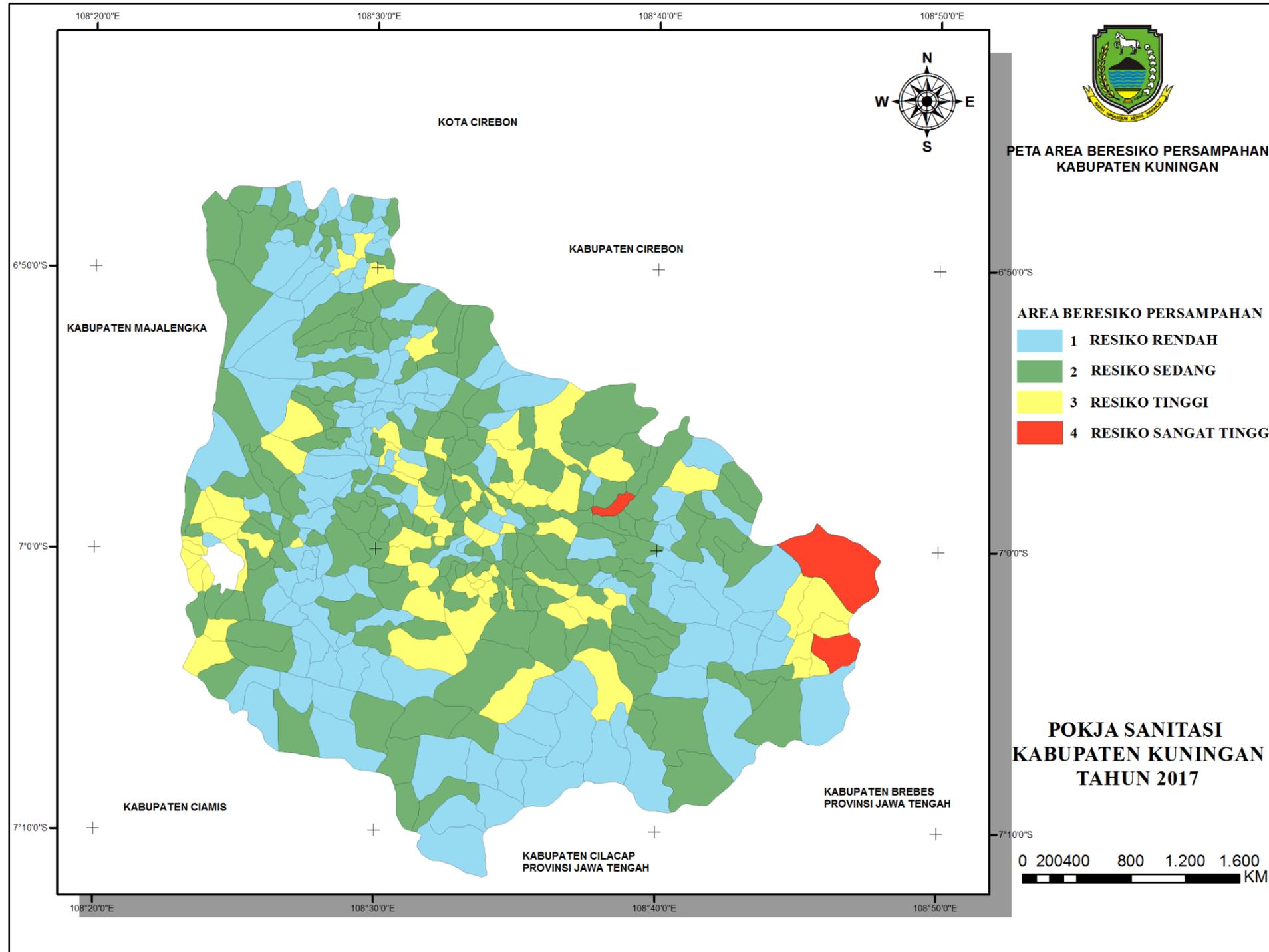
Area beresiko sanitasi sektor persampahan dihasilkan dari :

- Data sekunder yang dimiliki oleh SKPD terkait
- Hasil Analisa Studi EHRA
- Persepsi SKPD





Peta Area Beresiko Persampahan





Tabel 2.16. Area Beresiko Persampahan

| No                 | Area Berisiko *)      | Wilayah Prioritas    |                     |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                    |                       | Kecamatan            | Kelurahan/Desa      |
| 1                  | Risiko 4              | Kecamatan Cibingbin  | Desa Cibingbin      |
|                    |                       |                      | Desa Bantarpanjang  |
|                    |                       | Kecamatan Cidahu     | Desa Nanggela       |
| 2                  | Resiko 3              | Kecamatan Kadugede   | Desa Babatan        |
|                    |                       | Kecamatan Ciniru     | Desa Cipedes        |
|                    |                       | Kecamatan Ciwaru     | Desa Ciwaru         |
|                    |                       | Kecamatan Cibingbin  | Desa Sindangjawa    |
|                    |                       |                      | Desa Citenjo        |
|                    |                       |                      | Desa Dukuhabadag    |
|                    |                       |                      | Desa Sukamaju       |
|                    |                       |                      | Desa Sukaharja      |
|                    |                       | Kecamatan Luragung   | Desa Cisaat         |
|                    |                       |                      | Desa Walahar Cageur |
|                    |                       |                      | Desa Wilanagara     |
|                    |                       | Kecamatan Lebakwangi | Desa Cigedang       |
|                    |                       |                      | Desa Lebakwangi     |
|                    |                       |                      | Desa Pagundan       |
|                    |                       | Kecamatan Garawangi  | Desa Mekarwangi     |
|                    |                       |                      | Desa Gewok          |
|                    |                       |                      | Desa Pakembangan    |
| Desa Lengkong      |                       |                      |                     |
| Kecamatan Kuningan | Desa Citiusari        |                      |                     |
|                    | Desa Tembong          |                      |                     |
|                    | Desa Padarek          |                      |                     |
|                    | Kecamatan Ciawigebang | Desa Geresik         |                     |
| Desa Pajawan Lor   |                       |                      |                     |
| Desa Kapandayan    |                       |                      |                     |
| Desa Pangkalan     |                       |                      |                     |
| Desa Sukaraja      |                       |                      |                     |
| Desa Ciawi Lor     |                       |                      |                     |
| Desa Sukadana      |                       |                      |                     |
| Desa Pamijahan     |                       |                      |                     |



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
|                              | Desa Karangkamulyan    |
|                              | Desa Mekarmulya        |
|                              | Desa Cijagamulya       |
| <b>Kecamatan Cidahu</b>      | Desa Cikeusik          |
| <b>Kecamatan Jalaksana</b>   | Desa Sukamukti         |
| <b>Kecamatan Mandirancan</b> | Desa Randobawa Ilir    |
| <b>Kecamatan Kramatmulya</b> | Desa Cikubangsari      |
|                              | Desa Bojong            |
|                              | Desa Karangmangu       |
| <b>Kecamatan Darma</b>       | Desa Cageur            |
|                              | Desa Panninggaran      |
|                              | Desa Cipasung          |
|                              | Desa Kawah Manuk       |
|                              | Desa Cikupa            |
|                              | Desa Parung            |
|                              | Desa Jagara            |
|                              | Desa Bakom             |
|                              | Desa Karangsari        |
|                              | Desa Tugumulya         |
| Desa Situsari                |                        |
| <b>Kecamatan Cigugur</b>     | Desa Cisantana         |
| <b>Kecamatan Nusaherang</b>  | Desa Cikadu            |
| <b>Kecamatan Cipicung</b>    | Desa Karoya            |
|                              | Desa Cimaranten        |
| <b>Kecamatan Pancalang</b>   | Desa Silebu            |
|                              | Desa Pancalang         |
| <b>Kecamatan Kalimanggis</b> | Desa Kalimanggis Kulon |
|                              | Desa Kertawana         |
| <b>Kecamatan Maleber</b>     | Desa Maleber           |
|                              | Desa Parakan           |
|                              | Desa Kutaraja          |
|                              | Desa Ciporang          |
|                              | Desa Padamulya         |
|                              | Desa Kutamandarakan    |
|                              | Desa Giriwaringin      |
| Desa Buniasih                |                        |



|  |  |                        |                    |
|--|--|------------------------|--------------------|
|  |  | Kecamatan Sindangagung | Desa Sindangagung  |
|  |  |                        | Desa Kertawangunan |
|  |  |                        | Desa Babakanreuma  |
|  |  | Kecamatan Cigandamekar | Desa Timbang       |

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Kuningan 2017

Catatan : \*) Hanya untuk wilayah resiko 4 dan 3

Tabel 2.17. Permasalahan Mendesak Sektor Persampahan

| No                                | Permasalahan Mendesak   |
|-----------------------------------|---|
| 1                                 | <p><b>Aspek Teknis :</b> Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface/ sumber timbulan – pengumpulan – pewadahan/ pengolahan awal – pengangkutan – pengolahan antara – pemrosesan akhir/ pembuangan akhir/ lingkungan) serta Dokumen Perencanaan Teknis</p>  |
| <i>User Interface</i>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Studi EHRA 2013 tentang pengelolaan sampah : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dibakar = 44%</li> <li>✓ Dibuang ke lahan kosong/ kebun = 5%</li> <li>✓ Dibuang ke lubang dan ditutup tanah = 1%,</li> <li>✓ Dibuang ke lubang dan tidak ditutup tanah = 1%</li> <li>✓ Dibuang ke sungai/ kali / danau = 11%</li> <li>✓ Dibuang ke lahan kosong/ hutan dan dibiarkan membusuk = 12%</li> <li>✓ Dikumpulkan oleh kolektor untuk di daur ulang = 1%,</li> <li>✓ Dikumpulkan dan dibuang ke TPS = 23%,serta serta</li> <li>✓ Lain-lain = 1%.</li> </ul> </li> <li>Data dari Instrumen SSK Tahun 2017 <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanpa Akses <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sampah tidak terproses = 88,33% (2.943 m<sup>3</sup>/hari)</li> <li>✓ Sampah dikelola mandiri oleh masyarakat = 0%</li> </ul> </li> <li>Akses Layak <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sampah terangkut ke TPA = 10,39% (1.439 m<sup>3</sup>/hari)</li> <li>✓ Sampah tereduksi di TPS 3R/TPST/ Bank Sampah = dikelola mandiri oleh masyarakat = 1,48% (42 m<sup>3</sup>/hari)</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>Dari total 105 klasifikasi wilayah perkotaan yang menjadi area pelayanan sampah = 39 lokasi = 37% wilayah perkotaan</li> </ul> |
| <i>Pengumpulan</i>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampai saat ini sudah tersedia 118 unit tong sampah @ 0,006 m<sup>3</sup>/hari (total 0,7 m<sup>3</sup>/per hari)</li> <li>Masih diperlukan tong sampah dorong untuk petugas penyapu jalan, motor roda tiga untuk menjangkau pelayanan perkampungan sempit</li> <li>Perlu dipertimbangan untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat.</li> </ul>   |
| <i>Pewadahan/ Pengolahan Awal</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampai saat ini tersedia : 39 lokasi TPSS tembok, kapasitas 1 m<sup>3</sup>/hari, 35 lokasi TPSS Plateser dengan kapasitas 1,2 m<sup>3</sup>/hari</li> </ul>   |



|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampai saat ini tersedia: 14 unit TPS 3 R , diharapkan setiap tahunnya agar terus bertambah</li> <li>Jumlah Bank Sampah = 17 unit dikelola Desa, 27 unit dikelola Sekolah setingkat SD, SMP dan SMA dan diharapkan diharapkan setiap tahunnya agar terus bertambah</li> <li>Jumlah TPS masih kurang dan perlu ada tambahan Container beserta Landasan Kontainer serta pembebasan lahannya</li> </ul> |
| <i>Pengangkutan</i>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya sarana pengangkut terutama di pedesaan, perlu penambahan truk pengangkut sampah untuk wilayah perkotaan beserta Armroll Truck.</li> <li>Jumlah dump truck 15 unit, Armroll Truck 6 unit</li> </ul>   |
| <i>(Semi) Pengolahan Akhir</i>                        | Adanya kegiatan pembuatan kompos yang dilakukan oleh masyarakat walaupun secara persentase masih sangat kecil yaitu kurang lebih 1%   |
| <i>Pemrosesan Akhir/ Pembuangan Akhir/ Lingkungan</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secara hitungan teknis TPA Ciniro yang akan habis masa pemanfaatannya pada tahun 2017 sehingga perlu dilakukan revitalisasi TPA atau pembangunan TPA yang baru</li> <li>Pengelolaan TPA sudah memakai system controled landfill tetapi belum maksimal.</li> <li>Ada kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan oleh pemulung di TPA</li> </ul>   |
| <i>Perencanaan Teknis</i>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah ada dokumen master plan persampahan pada Tahun 2014</li> <li>Sudah ada dokumen perencanaan sanitasi (BPS, SSK, MPS, serta SSK Pemutakhiran)</li> </ul>   |
| <b>2</b>  | <b>Aspek Non Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, Komunikasi</b>  |
| <i>Pendanaan</i>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penganggaran terkait pengelolaan persampahan masih rendah</li> <li>Pengelolaan sampah belum menjadi prioritas</li> <li>Potensi penerimaan retribusi persampahan belum dimaksimalkan</li> </ul>   |
| <i>Kelembagaan</i>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator</li> <li>Bidang yang khusus mengelola persampahan dan kebersihan tidak mempunyai otoritas penuh dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan persampahan dikarenakan ketidaksesuaian antara SOTK SKPD Kab. Kuningan dengan pusat</li> <li>Sudah UTPD yang khusus mengelola persampahan di TPA</li> </ul>                                       |
| <i>Peraturan dan Perundang-undangan</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif</li> <li>Belum terpisahnya fungsi Regulator dan Operator dalam pengelolaan persampahan</li> </ul>  |
| <i>Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi penerimaan retribusi persampahan dari masyarakat belum dikelola dengan baik</li> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola persampahan skala rumah tangga maupun skala lingkungan</li> <li>Belum ada kerjasama dengan CSR maupun swasta dalam pengelolaan persampahan</li> <li>Masih rendahnya investasi dunia usaha/swasta</li> </ul>  |
| <i>Komunikasi</i>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya sosialisasi penanganan sampah terhadap masyarakat</li> </ul>   |



**c. Area Beresiko dan Permasalahan Drainase**

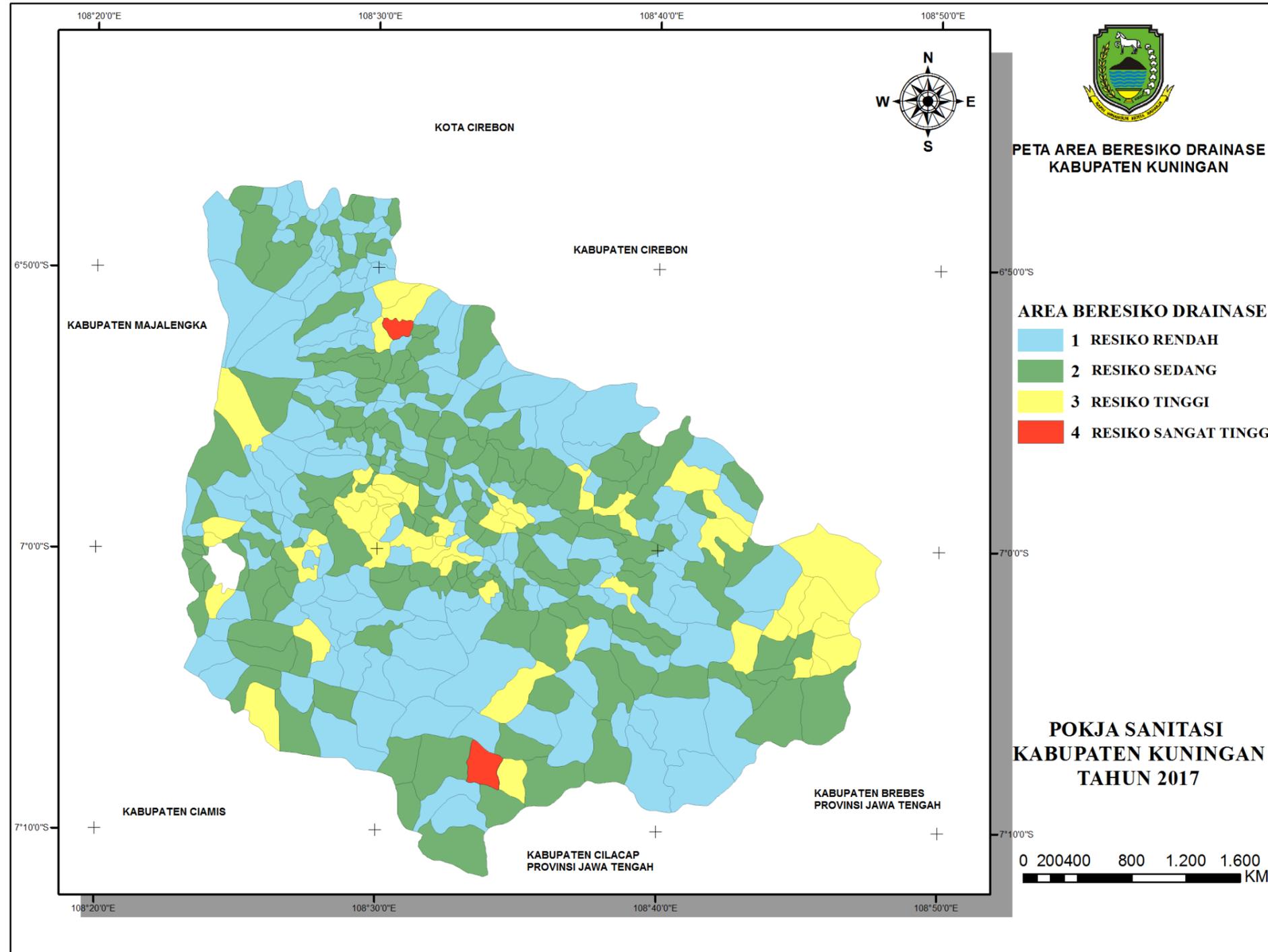
Area beresiko sanitasi sektor persampahan dihasilkan dari :

- Data sekunder yang dimiliki oleh SKPD terkait
- Hasil Analisa Studi EHRA
- Persepsi SKPD

**Peta Area Beresiko**



Peta Area Beresiko Drainase Lingkungan





Tabel 2.18. Area Beresiko Drainase Perkotaan

| No                      | Area Berisiko *) | Wilayah Prioritas   |                          |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|                         |                  | Kecamatan           | Kelurahan/Desa           |
| 1                       | Risiko 4         | Kecamatan Cilimus   | Desa Cilimus             |
|                         |                  | Kecamatan Cilebak   | Desa Jalatrang           |
| 2                       | Resiko 3         | Kecamatan Kadugede  | Desa Windujanten         |
|                         |                  |                     | Desa Kadugede            |
|                         |                  | Kecamatan Cibingbin | Desa Sindangjawa         |
|                         |                  |                     | Desa Cibingbin           |
|                         |                  |                     | Desa Citenjo             |
|                         |                  |                     | Desa Dukuhabadag         |
|                         |                  |                     | Desa Bantarpanjang       |
|                         |                  |                     | Desa Sukaharja           |
|                         |                  |                     | Desa Cisaat              |
|                         |                  | Kecamatan Luragung  | Desa Luragung Tonggoh    |
|                         |                  | Kecamatan Garawangi | Desa Garawangi           |
|                         |                  |                     | Desa Purwasari           |
|                         |                  |                     | Desa Lengkong            |
|                         |                  |                     | Desa Karamatwangi        |
|                         |                  |                     | Desa Citiusari           |
|                         |                  | Kecamatan Kuningan  | Kelurahan Citangtu       |
|                         |                  |                     | Kelurahan Kuningan       |
|                         |                  |                     | Kelurahan Winduhaji      |
|                         |                  |                     | Kelurahan Windusengkahan |
|                         |                  |                     | Kelurahan Cijoho         |
| Kelurahan Purwawinangun |                  |                     |                          |
| Kelurahan Cirendang     |                  |                     |                          |
| Kelurahan Ciporang      |                  |                     |                          |
| Desa Kedungarum         |                  |                     |                          |
| Desa Ancaran            |                  |                     |                          |
| Kecamatan Ciawigebang   | Desa Ciawigebang |                     |                          |
|                         | Desa Ciputat     |                     |                          |
|                         | Desa Pajawan Lor |                     |                          |
|                         | Desa Sidaraja    |                     |                          |
|                         | Desa Kapandayan  |                     |                          |



|                        |                        |                    |  |
|------------------------|------------------------|--------------------|--|
|                        | Kecamatan Cidahu       | Desa Cidahu        |  |
|                        |                        | Desa Cikeusik      |  |
|                        |                        | Desa Nanggela      |  |
|                        |                        |                    |  |
|                        | Kecamatan Cilimus      | Desa Bojong        |  |
|                        |                        | Desa Sampora       |  |
|                        |                        | Desa Caracas       |  |
|                        |                        |                    |  |
|                        | Kecamatan Selajambe    | Desa Cantilan      |  |
|                        |                        |                    |  |
|                        | Kecamatan Darma        | Desa Sakerta Barat |  |
|                        |                        | Desa Darma         |  |
|                        |                        | Desa Bakom         |  |
|                        |                        |                    |  |
|                        | Kecamatan Cigugur      | Kelurahan Cipari   |  |
|                        |                        |                    |  |
| Kecamatan Cimahi       | Desa Cimahi            |                    |  |
|                        | Desa Mulyajaya         |                    |  |
|                        |                        |                    |  |
| Kecamatan Cilebak      | Desa Cilebak           |                    |  |
|                        |                        |                    |  |
| Kecamatan Hantara      | Desa Hantara           |                    |  |
|                        |                        |                    |  |
| Kecamatan Kalimanggis  | Desa Kalimanggis Wetan |                    |  |
|                        |                        |                    |  |
| Kecamatan Cibeureum    | Desa Tarikolot         |                    |  |
|                        | Desa Randusari         |                    |  |
|                        |                        |                    |  |
| Kecamatan Maleber      | Desa Garahaji          |                    |  |
|                        | Desa Maleber           |                    |  |
|                        | Desa Giriwaringin      |                    |  |
|                        |                        |                    |  |
| Kecamatan Sindangagung | Desa Sindangagung      |                    |  |

Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Kuningan 2017

Catatan : \*) Hanya untuk wilayah resiko 4 dan 3



Tabel 2.19. Permasalahan Mendesak Sektor Drainase

| No  | Permasalahan Mendesak  |
|---|--|
| 1   | <b>Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (User Interface – Penampungan/ Pengolahan Awal – Pengangkutan/ Pengaliran ) serta Dokumen Perencanaan Teknis</b>   |
| User Interface                                | <p>Apakah rumah yang ditempati saat ini atau lingkungan sekitar rumah pernah terkena banjir?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Pernah: 97%</li> <li>Tidak Tahu: 1%</li> <li>Sekali atau beberapa dalam sebulan: 0%</li> <li>Sekali dalam setahun: 1%</li> <li>Beberapa kali dalam: 1%</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hampir 97% Kabupaten Kuningan tidak pernah terjadi genangan, karena secara teopografi kabupaten Kuningan merupakan daerah lereng dan perbukitan.</li> <li>Tidak pernah terjadi genangan/banjir dalam setahun lebih dari 2 jam.</li> </ul>   |
| Penampungan/ Pengolahan Awal                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grey water masih bercampur dengan saluran drainase belum ada sumur resapan</li> </ul>   |
| Pengangkutan/ Pengaliran                      | Kondisi drainase lingkungan berdasarkan hasil study EHRA 2013 diketahui bahwa saluran drainase telah ada namun ada yang tidak berfungsi dengan baik.   |
| (Data lain berdasarkan hasil study EHRA 2013) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditemukan bahwa sekitar rumah tangga kadang-kadang terdapat genangan air.</li> <li>Pada umumnya, drainase lingkungan masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pemanusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (grey water)</li> <li>Porsi belanja fisik sub sektor drainase masih belum optimal, hanya kisaran 0,2%</li> <li>Prosentase panjang saluran drainase yang berfungsi baik dan cukup ada 80% dari total panjang saluran</li> <li>Akses masyarakat terhadap sarana drainase lingkungan cukup baik terutama di perkotaan.</li> <li>Luas area genangan hanya sedikit dan temporer saja di beberapa wilayah.</li> </ul> |
| Perencanaan Teknis                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya master plan drainase.</li> <li>Sudah ada dokumen perencanaan sanitasi (BPS, SSK, MPS, serta SSK Pemutakhiran)</li> </ul>  |
| 2   | <b>Aspek Non Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, Komunikasi</b>   |
| Pendanaan                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penganggaran terkait pengelolaan drainase lingkungan masih kurang optimal</li> </ul>  |
| Kelembagaan                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan drainase lingkungan tidak bisa berdiri secara parsial karena sifatnya parallel dengan drainase sekunder maupun primer sehingga perlu adanya koordinasi dengan SKPD lain yang menangani</li> </ul>   |



|   |   |
|---|---|
| <i>Peraturan dan Perundang-undangan</i>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum ada perda terkait pengelolaan drainase lingkungan</li></ul>                         |
| <i>Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peran serta masyarakat dalam perawatan saluran drainase lingkungan masih rendah</li></ul> |
| <i>Komunikasi</i>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan drainase lingkungan</li></ul> |



### BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

#### 3.1 Visi dan Misi Sanitasi

Dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2018, ditetapkan bahwa visi sanitasi Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2022 yaitu  
**“Terwujudnya Kondisi Sanitasi Yang Aman dan Layak Serta Berkelanjutan Bagi Seluruh Masyarakat Pada Tahun 2022”**

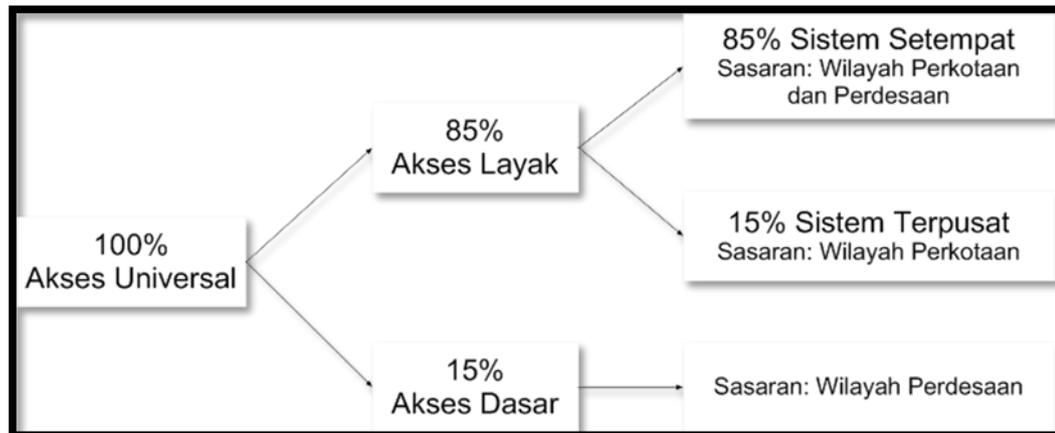
**Tabel 3.1 Visi dan Misi Kabupaten Kuningan**

| Visi Kabupaten   | Misi Kabupaten   | Visi Sanitasi Kabupaten  | Misi Sanitasi Kabupaten  |
|--|--|--|--|
| <p><b>Visi Kabupaten Kuningan Tahun 20014-2018 :</b></p> <p><b>“Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS) Tahun 2018”</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis.</li> <li>Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah.</li> <li>Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan.</li> <li>Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.</li> </ol> | <p><b>Visi sanitasi Kabupaten Kuningan 2018-2022 :</b></p> <p><b>“Terwujudnya kondisi sanitasi dasar yang aman dan layak serta berkelanjutan bagi seluruh warga untuk mendukung konservasi dan wisata termaju di Jawa Barat”</b></p> | <p><b>Misi Air Limbah Domestik :</b><br/>Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan serta ramah lingkungan melalui pembangunan SPALD-S dan SPALD-T</p> <p><b>Misi Persampahan :</b><br/>Meningkatkan cakupan pelayanan dan pengelolaan persampahan yang aman dan berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta pengelolaan TPA berteknologi Sanitary Landfill</p> <p><b>Misi Drainase :</b><br/>Terwujudnya lingkungan yang nyaman melalui penataan jaringan drainase lingkungan yang memadai dan terintegrasi sehingga terbebas dari genangan dan banjir melalui pembangunan drainase hijau/ekodrainase</p> <p><b>Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat :</b><br/>Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat terutama di wilayah pelosok desa dan terpencil, kawasan penduduk kumuh, padat dan miskin melalui kegiatan promosi hygiene dan sanitasi baik tatanan rumah tangga maupun sekolah</p> |

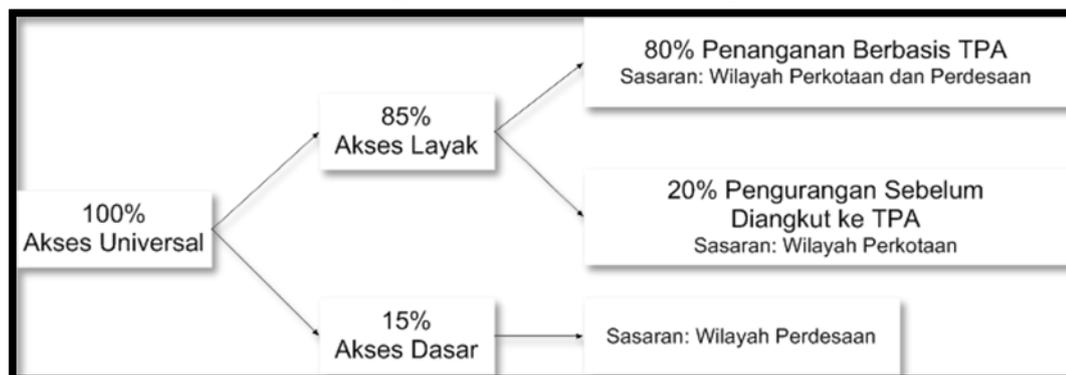
Sumber : RPJMD Kab. Kuningan 2014 – 2018, Kesepakatan Pokja



Gambar. Skema Persentase Target Akses Universal Air Limbah



Gambar : Skema Persentase Target Akses Universal Persampahan



Gambar : Skema Persentase Target Akses Universal Persampahan

## 3.2 Pentahapan Pengembangan Sanitasi

### 3.2.1 Tahapan Pengembangan Sanitasi

#### A. Air Limbah Domestik

Untuk mencapai target universal akses pengelolaan air limbah domestik maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan harus melakukan pentahapan pengembangan sanitasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang berangkat dari kondisi eksisting.



Dari data yang dihasilkan oleh perhitungan di instrumen SSK, masih ada 11,77% masyarakat masih melakukan BABS, sebesar 24,64% penduduk mempunyai akses tangki septik yang tidak layak, dan 65,99% penduduk sudah mempunyai akses yang layak.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi eksisting dan pentahapan pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Kuningan**

| No.               | Sistem  | Cakupan layanan eksisting (%) | Target Cakupan Layanan (%) |                 |                |
|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
|                   |   |                               | Jangka pendek              | Jangka menengah | Jangka panjang |
| (a)               | (b)   | (c)                           | (d)                        | (e)             | (f)            |
| Wilayah Perkotaan |   |                               |                            |                 |                |
| <b>A</b>          | <b>Tanpa Akses</b>                            |                               |                            |                 |                |
| 1                 | Buang Air Besar Sembarangan (BABS)            | 5,01%                         | 3,00%                      | 0,00%           | 0,00%          |
| 2                 | Cubluk/ Tangki septik individual- tidak layak | 10,47%                        | 7,00%                      | 0,00%           | 0,00%          |
| <b>B</b>          | <b>Akses Layak</b>                            |                               |                            |                 |                |
| B.I               | SPALD Setempat                                |                               |                            |                 |                |
| 1                 | Skala Individual                              | 26,80%                        | 32,00%                     | 35,00%          | 36,00%         |
| 2                 | Skala Komunal                                 | 0,04%                         |                            | 0,00%           | 0,00%          |
| B.II              | SPALD Terpusat                                |                               |                            |                 |                |
| 1                 | SPALD-T Permukiman                            |                               |                            |                 |                |
|                   | a. Berbasis Masyarakat                        | 0,28%                         | 1,00%                      | 2,00%           | 4,00%          |
|                   | b. Berbasis Institusi                         | 0,00%                         |                            | 0,00%           | 0,00%          |
| 2                 | SPALD-T Perkotaan                             | 0,00%                         |                            | 2,00%           | 3,00%          |
| 3                 | SPALD-T Kawasan Tertentu                      | 0,00%                         |                            | 0,00%           | 0,00%          |
| Wilayah Perdesaan |   |                               |                            |                 |                |
| <b>A</b>          | <b>Tanpa Akses</b>                            |                               |                            |                 |                |
| 1                 | Buang Air Besar Sembarangan (BABS)            | 6,76%                         | 4,00%                      | 0,00%           | 0,00%          |
| <b>B</b>          | <b>Akses Dasar</b>                            |                               |                            |                 |                |
| 1                 | Cubluk / Tangki Septik individual tidak layak | 14,17%                        | 12,00%                     | 11,00%          | 0,00%          |
| <b>C</b>          | <b>Akses Layak</b>                            |                               |                            |                 |                |
| C.I               | SPALD Setempat                                |                               |                            |                 |                |
| 1                 | Skala Individual                              | 36,10%                        | 40,00%                     | 46,00%          | 51,00%         |

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2017-2021

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT

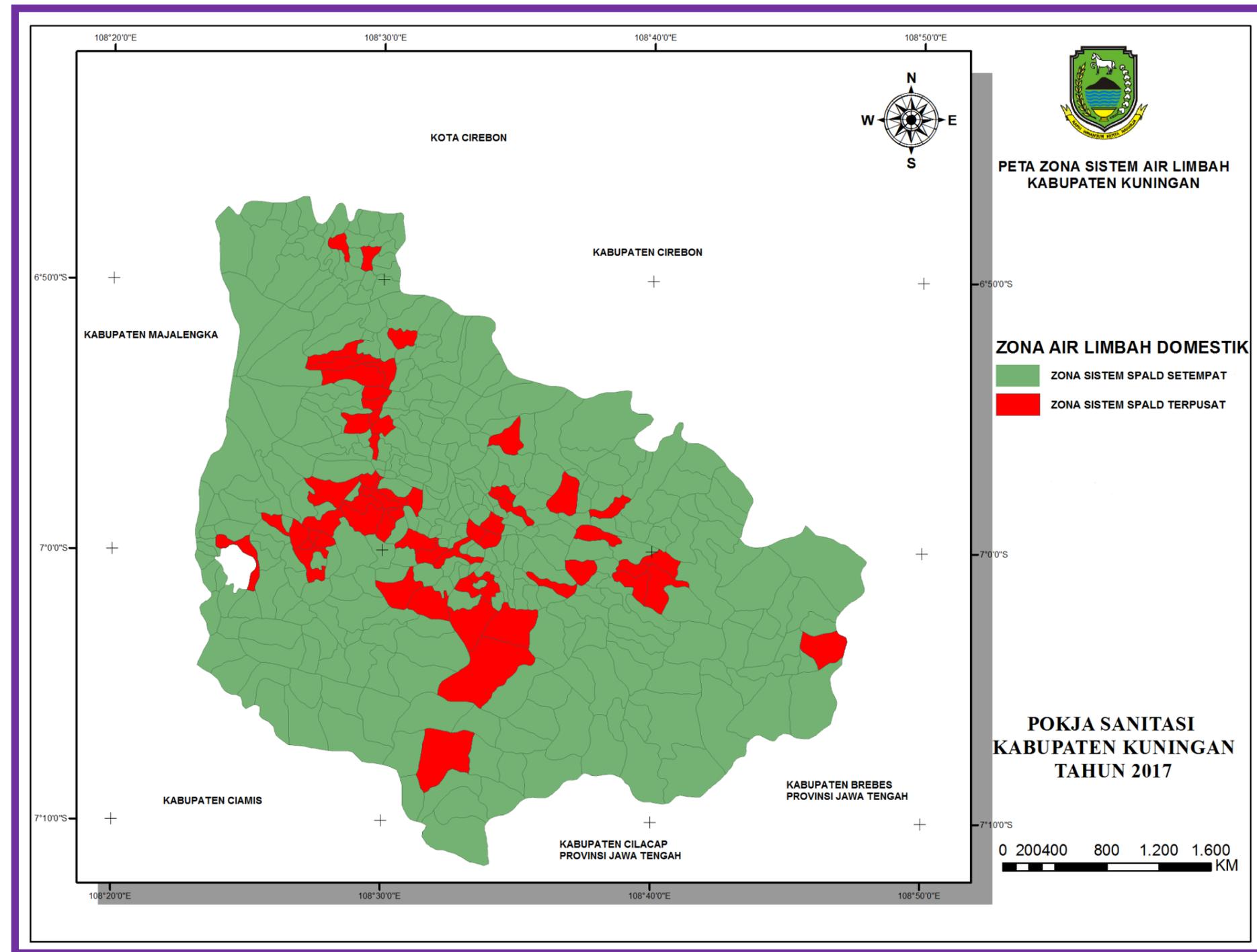


|      |                          |         |         |         |         |
|------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2    | Skala Komunal            | 0,05%   |         | 0,00%   | 0,00%   |
| C.II | SPALD Terpusat           |         |         |         |         |
| 1    | SPALD-T Permukiman       |         |         |         |         |
|      | a. Berbasis Masyarakat   | 0,72%   | 1,00%   | 2,00%   | 3,00%   |
|      | b. Berbasis Institusi    | 0,00%   |         | 0,00%   | 0,00%   |
| 2    | SPALD-T Perkotaan        | 0,00%   |         | 2,00%   | 3,00%   |
| 3    | SPALD-T Kawasan Tertentu | 0,00%   |         | 0,00%   | 0,00%   |
|      | TOTAL                    | 100,40% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Sumber : Instrumen SSK, 2017



Peta 3.1. Pentahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

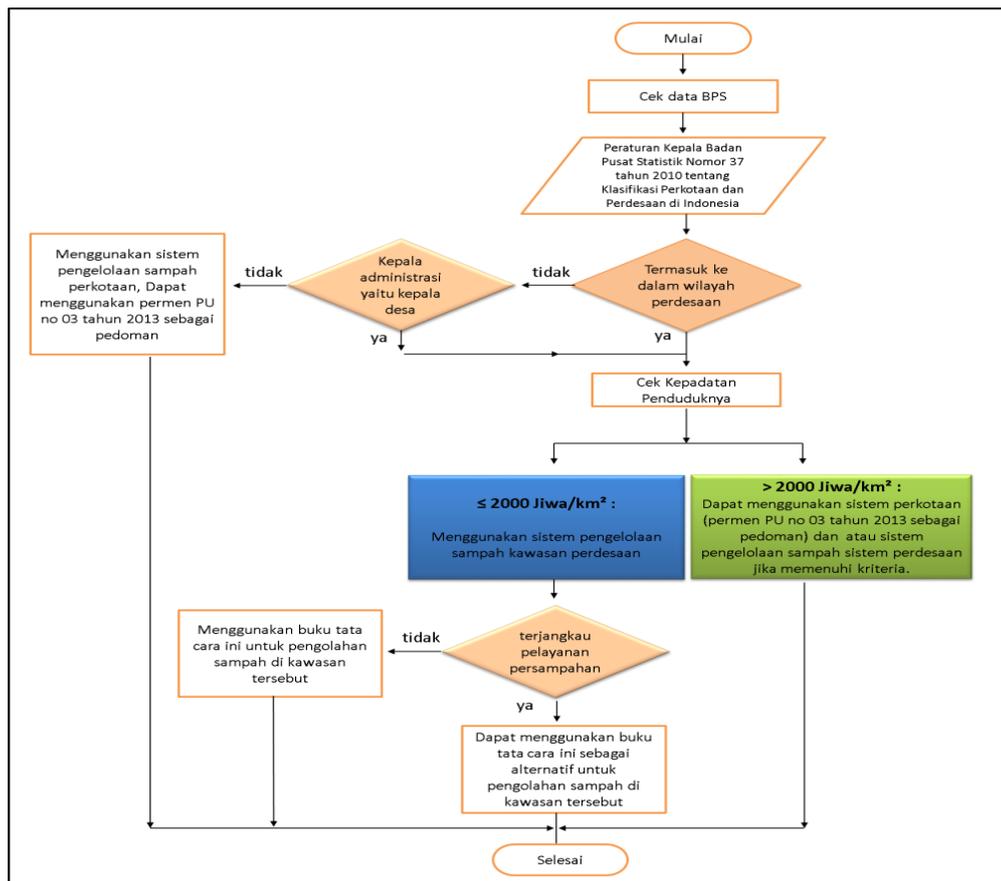




### B. Persampahan

Berikut skema berpikir terkait pemilihan sistem penanganan persampahan pada suatu wilayah :

Gambar. Skema Penentuan Sistem Persampahan





Layanan persampahan di Kabupaten Kuningan saat ini masih sangat minim, dari jumlah sampah yang dihasilkan di seluruh kecamatan sebanyak 560.402 m<sup>3</sup> yang tertangani baru sebesar 153,994 m<sup>3</sup>. Dengan cakupan pelayanan sampah terangkut baru di 12 kecamatan dari 32 kecamatan yang ada. Dari 12 kecamatan yang terlayani jumlah timbulan sebesar 229.090 m<sup>3</sup>, sehingga total pelayanan persampahan baru mencapai 12 % terhadap seluruh total wilayah Kabupaten dan 37% terhadap wilayah perkotaan. Tahapan pengembangan yang direncanakan selama 5 tahun ke depan baru menargetkan 85% wilayah yang masuk klasifikasi perkotaan bisa tertangani.

Data rinci terkait kondisi eksisting persampahan dan tahapan pengembangan selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

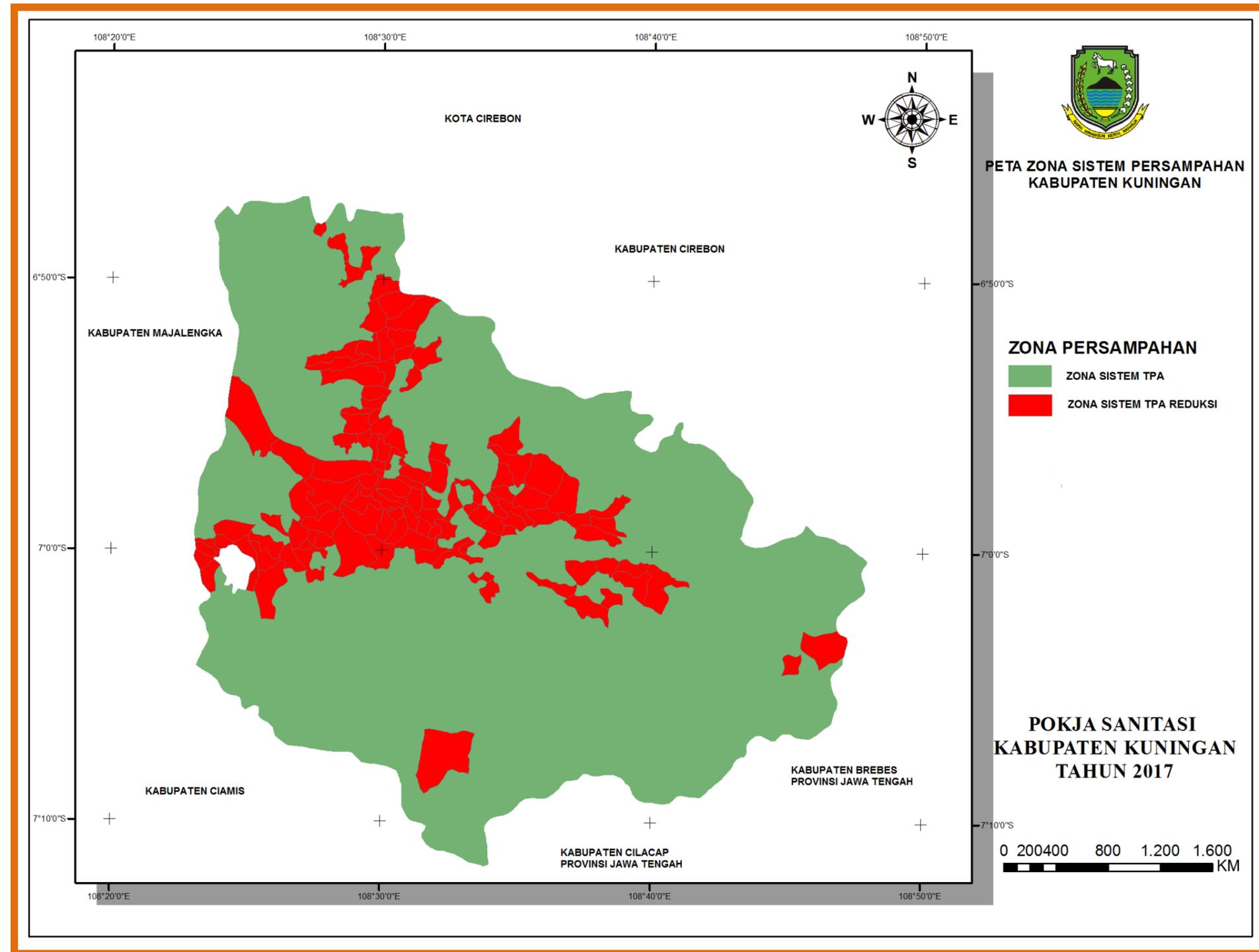
**Tabel 3.3. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Kuningan**

| No.               | Sistem  | Cakupan layanan eksisting (%) | Target Cakupan Layanan (%) |                 |                |
|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
|                   |   |                               | Jangka pendek              | Jangka menengah | Jangka panjang |
| (a)               | (b)   | (c)                           | (d)                        | (e)             | (f)            |
| Wilayah Perkotaan |   |                               |                            |                 |                |
| <b>A</b>          | <b>Tanpa Akses</b>                                    |                               |                            |                 |                |
| 1                 | Sampah Tidak Terproses                                | 32,00%                        | 10,00%                     | 0,00%           | 0,00%          |
| 2                 | Sampah Dikelola Mandiri oleh Masyarakat               | 0,00%                         | 5,00%                      | 5,00%           | 5,00%          |
| <b>B</b>          | <b>Akses Layak</b>                                    |                               |                            |                 |                |
| 1                 | Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung) | 9,64%                         | 46,00%                     | 60,00%          | 60,00%         |
| 2                 | Sampah Tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah            | 0,79%                         | 6,00%                      | 8,00%           | 10,00%         |
| Wilayah Perdesaan |   |                               |                            |                 |                |
| <b>A</b>          | <b>Tanpa Akses</b>                                    |                               |                            |                 |                |
| 1                 | Sampah Tidak Terproses                                | 56,33%                        | 21,00%                     | 3,00%           | 0,00%          |
| <b>B</b>          | <b>Akses Dasar</b>                                    |                               |                            |                 |                |
| 1                 | Sampah Dikelola Mandiri oleh Masyarakat               | 0,00%                         | 5,00%                      | 15,00%          | 15,00%         |
| <b>C</b>          | <b>Akses Layak</b>                                    |                               |                            |                 |                |
| 1                 | Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung) | 0,75%                         | 2,00%                      | 3,00%           | 4,00%          |
| 2                 | Sampah Tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah            | 0,48%                         | 5,00%                      | 6,00%           | 6,00%          |
| <b>TOTAL</b>      |   | <b>100,00%</b>                | <b>100,00%</b>             | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b> |

Sumber : Instrumen SSK 2017



Peta 3.2. Pentahapan Pengembangan Persampahan





### C. Drainase

Sistem pengelolaan drainase di Kabupaten Kuningan saat ini belum dapat tergambarkan secara pasti dan jelas jangkauan pelayanannya. Hal ini akibat belum dilakukannya pendataan system dan jaringan drainase yang saat ini sudah dibangun di wilayah Kabupaten Kuningan yang biasanya selalu berbarengan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan jalannya. Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan untuk saluran drainase di kabupaten Kuningan, yang sudah ada saat ini baru mengikuti jalan raya yang ada di perkotaan dengan panjang saluran yaitu 38.202 m. dalam hal ini dikategorikan sebagai salurah primer yang terletak mengikuti jalan-jalan protocol di wilayah perkotaan kabupaten Kuningan.

Wilayah Kabupaten Kuningan bukan merupakan daerah rawan banjir. Tahapan pengembangan yang direncanakan selama 5 tahun ke depan akan menargetkan setengah dari wilayah di Kabupaten Kuningan yaitu 49% dapat terlayani oleh pelayanan drainase terstruktur. Rinciannya adalah pelayanan pada kawasan komersial sebesar 33%, pelayanan pada penduduk permukiman perkotaan 11% serta pelayanan penduduk permukiman pedesaan sebesar 5%. Sedangkan target pelayanan kepada seluruh wilayah Kabupaten Kuningan baru akan tercapai pada tahapan jangka panjang selama 5 tahun ke depan.

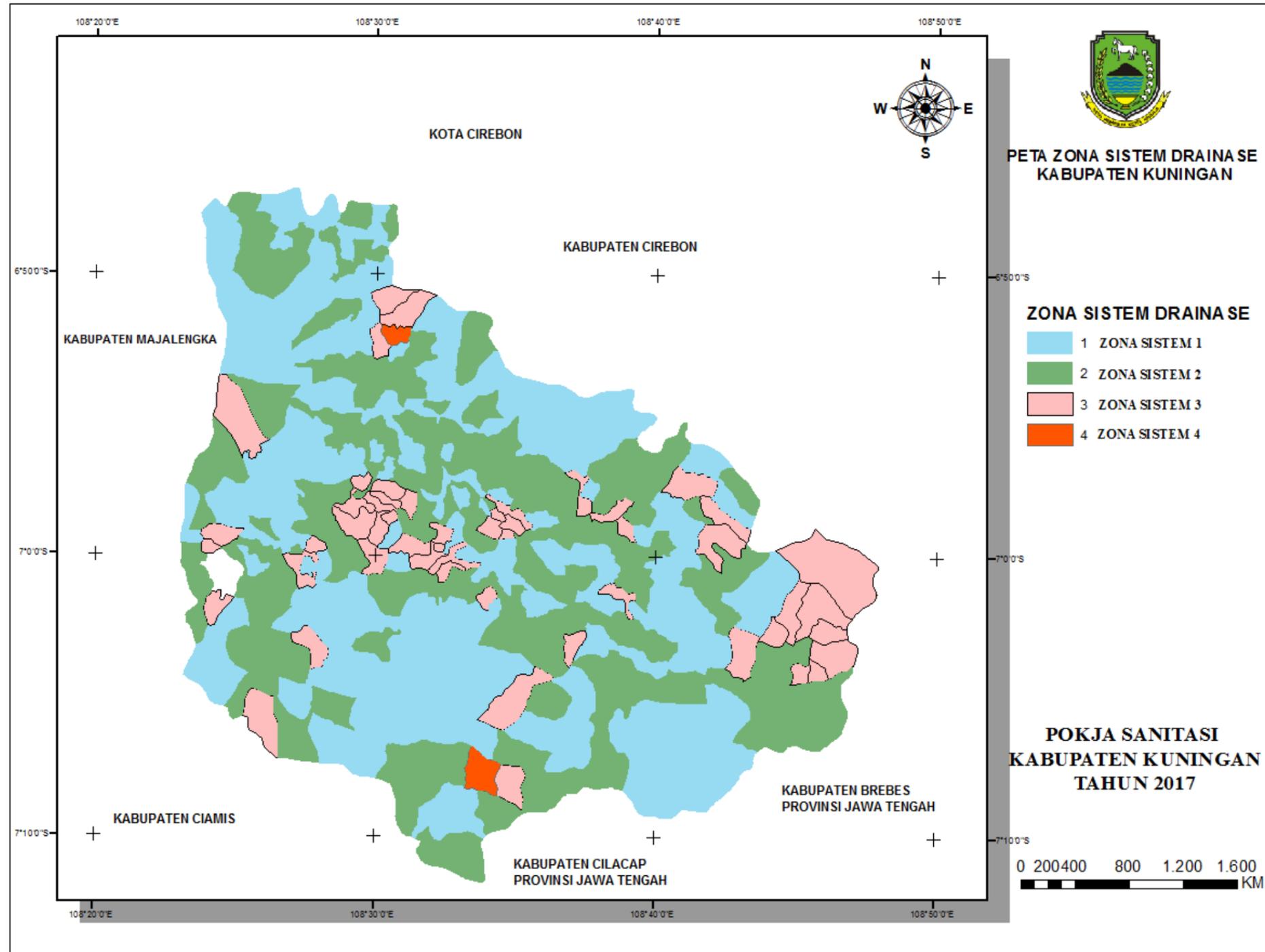
Tabel 3.4. Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Kuningan

| No  | Titik Genangan di Area Permukiman | Luas genangan eksisting di Area Permukiman (ha) | Sisa Luas genangan yang belum tertangani (ha) |                 |                |
|-----|-----------------------------------|---|---|-----------------|----------------|
|     |                                   |   | Jangka pendek                                 | Jangka menengah | Jangka panjang |
| (a) | (b)                               | (c)   | (d)   | (e)             | (f)            |
| 1   | Kabupaten Kuningan                | 5,3%  | 3%  | 0%              | 0%             |
|     | Total                             | 5,3%  | 3%  | 0%              | 0%             |

Sumber : Instrumen SSK 2017, Analisis Pokja



Peta 3.3. Pentahapan Pengembangan Drainase





### 3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Pada bagian ini akan menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu kepada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, provinsi dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi

Tabel 3.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Sektor Air Limbah Domestik

| Tujuan   | Sasaran  | Data Dasar  |
|--|--|---|
| Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam menerapkan STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan) | Tidak ada penduduk yang melakukan BABS ditahun 2019  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 11,77 % penduduk masih melakukan BABS</li><li>• Jumlah Desa/ Kelurahan ODF = 78</li></ul>   |
| Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah                    | Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah SPALD T Permukiman = 138 Unit</li><li>• Belum Mempunyai IPAL skala kawasan</li><li>• Belum mempunyai IPLT</li><li>• Belum mempunyai truk sedot tinja</li></ul> |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik dan industri                         | Tersedianya payung hukum dalam pengelolaan air limbah domestik dan industri                        | Belum mempunyai peraturan tentang pengelolaan air limbah  |
| Kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan lingkungan meningkat.                         | Meningkatnya SDM dalam pengelolaan lingkungan  | Belum adanya Instansi yang secara khusus mengelola air limbah domestik  |

Sumber : Sumber : KKL SSK Pemutakhiran, 2017



**Tabel 3.6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Sektor Persampahan**

| Tujuan  | Sasaran  | Data Dasar  |
|---|--|---|
| Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan persampahan                     | Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan skala Kabupaten wilayah perkotaan dari 37% menjadi 85% pada tahun 2019                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan layanan total se Kabupaten = 12,5% (47 desa/kelurahan dari 376 desa/ kelurahan)</li> <li>Dari total 105 klasifikasi wilayah perkotaan yang menjadi area pelayanan sampah = 39 lokasi = 37% wilayah perkotaan</li> </ul>                              |
| Peningkatan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan oleh masyarakat dan dunia usaha | Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan kegiatan 3 R (Reuse,Reduce dan Recycle) secara partisipatif dari 1,48% menjadi 10% pada tahun 2019 | <p>Adanya pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat baik dengan Bank Sampah maupun TPS 3R</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Bank Sampah = 17 unit dikelola Desa, 27 unit dikelola Sekolah setingkat SD, SMP dan SMA</li> <li>Jumlah TPS 3R = 14 lokasi</li> </ul> |
| Tersedianya review detail rencana pengelolaan persampahan                                 | Tersedianya review Masterplan pengelolaan persampahan  | Masterplan sudah ada pada Tahun 2014 dan sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan review   |
| Meningkatkan jalinan kerjasama pengelolaan sampah dengan kalangan swasta                  | Terjalinnnya kerjasama pengelolaan persampahan dengan kalangan swasta  | Kerja sama dengan pihak swasta masih sebatas untuk menambah area pelayanan persampahan  |

Sumber : Sumber : KKL SSK Pemutakhiran, 2017



**Tabel 3.7. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Sektor Drainase Perkotaan**

| Tujuan  | Sasaran  | Data Dasar   |
|---|--|--|
| Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase kota yang memadai dan berwawasan lingkungan | (1).Cakupan sarana dan prasarana drainase melingkupi seluruh wilayah permukiman<br>(2).Terbangunnya saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh desa/kelurahan ditahun 2022  | (1). Sudah ada saluran drainase<br>(2).Adanya pembangunan saluran drainase yang baru |
| Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase di Kabupaten Kuningan                 | Perbaikan drainase sebesar 100% dari total saluran yang rusak setiap tahun   | Belum semua saluran drainase yang rusak diperbaiki setiap tahunnya                   |
| Meningkatkan cakupan layanan drainase melalui regulasi.   | Adanya regulasi yang mengatur drainase   | Belum ada Perda yang mengatur pengelolaan drainase                                   |
| Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase kota yang memadai dan berwawasan lingkungan | (1).Cakupan sarana dan prasarana drainase melingkupi seluruh wilayah permukiman<br>(2).Terbangunnya saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh desa/kelurahan di Tahun 2022 | 1). Sudah ada saluran drainase<br>(2).Adanya pembangunan saluran drainase yang baru  |
| Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase kota yang memadai dan berwawasan lingkungan | (1).Cakupan sarana dan prasarana drainase melingkupi seluruh wilayah permukiman<br>(2).Terbangunnya saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh desa/kelurahan di Tahun 2022 | (1). Sudah ada saluran drainase<br>(2).Adanya pembangunan saluran drainase yang baru |
| Tersedianya Masterplan rencana pengelolaan drainase   | Adanya Masterplan rencana pengelolaan drainase sebagai salah satu acuan dalam pembangunan drainase lingkungan  | Belum ada Dokumen Masterplan Drainase  |

Sumber : KKL SSK Pemutakhiran, 2017



### 3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran

Tabel 3.8 : Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Sanitasi

| Komponen                          | Tahun |     |     |     |     |     |      |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                                   | n-5   | n   | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | n+5  |
| Air Limbah Domestik               |       |     |     |     |     |     |      |
| · Akses Layak <sup>(1)</sup>      | 35%   | 33% | 74% | 89% | 93% | 96% | 100% |
| · Akses Dasar <sup>(2)</sup>      | 65%   | 24% | 19% | 11% | 0%  | 0%  | 0%   |
| Persampahan                       |       |     |     |     |     |     |      |
| · Akses Layak <sup>(3)</sup>      | 5%    | 12% | 59% | 76% | 77% | 78% | 80%  |
| · Akses Dasar <sup>(4)</sup>      | 1%    | 1%  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%  |
| Drainase Perkotaan: Luas Genangan | 50%   | 35% | 30% | 0%  | 0%  | 0%  | 0%   |

Sumber : Instrumen SSK 2017

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2017-2021

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



## 3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Tabel 3.9. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Kuningan untuk Sanitasi

| No  | Uraian   | Belanja Sanitasi (Rp)  |                        |                        |                        |                        | Rata-rata<br>Pertumbuhan |
|-----|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     |  | n-5                    | n-4                    | n-3                    | n-2                    | n-1                    |                          |
|     |  | 2012                   | 2013                   | 2014                   | 2015                   | 2016                   |                          |
| (a) | (b)  | (c)                    | (d)                    | (e)                    | (f)                    | (g)                    | (h)                      |
| 1   | Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )         | 3.746.537.000          | 3.586.497.000          | 5.501.375.347          | 8.306.976.300          | 15.699.673.700         | 27,81%                   |
| 1.1 | Air Limbah Domestik                                | 385.000.000            | 388.000.000            | 500.000.000            | 525.000.000            | 9.734.490.000          | 60,83%                   |
| 1.2 | Sampah Rumah tangga                                | 2.703.497.000          | 2.703.497.000          | 2.841.375.347          | 5.744.081.300          | 3.856.183.700          | 68%                      |
| 1.3 | Drainase Lingkungan                                | 583.040.000            | 420.000.000            | 1.735.000.000          | 1.620.895.000          | 1.700.000.000          | -2,08%                   |
| 1.4 | PHBS   | 75.000.000             | 75.000.000             | 425.000.000            | 417.000.000            | 409.000.000            | 7,9%                     |
| 2   | Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+ 2.5 ) | 3.691.310.000          | 3.035.660.000          | 3.879.950.000          | 5.469.920.000          | 6.470.031.150          | 11,17%                   |
| 2.1 | DAK Air Minum dan Sanitasi                         | 2.496.340.000          | 1.961.370.000          | -                      | -                      | -                      | -27,27%                  |
| 2.2 | DAK Air Minum                                      | -                      | -                      | 1.745.570.000          | 2.880.730.000          | 2.184.225.500          | 3,76%                    |
| 2.3 | DAK Sanitasi                                       | -                      | -                      | 1.058.140.000          | 1.499.260.000          | 1.173.826.500          | 0,85%                    |
| 2.4 | DAK Lingkungan Hidup                               | 1.194.970.000          | 1.074.290.000          | 1.076.240.000          | 1.089.930.000          | 3.111.979.150          | 13,79%                   |
| 2.5 | DAK Perumahan dan Permukiman                       | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                        |
| 3   | Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                        |
| 4   | Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Sanitasi           | -                      | -                      | -                      | 44.500.000.000         | -                      | -                        |
|     | Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)          | 55.227.000             | 550.837.000            | 1.621.425.347          | 2.837.056.300          | 9.229.642.550          | 2.858.837.639,40         |
|     | Total Belanja Langsung                             | <b>487.210.849.347</b> | <b>521.260.968.928</b> | <b>603.269.801.836</b> | <b>902.059.268.072</b> | <b>879.503.153.788</b> | 678.660.808.394,20       |
|     | % APBD murni terhadap Belanja Langsung             | 0,0113%                | 0,1057%                | 0,2688%                | 0,3145%                | 1,0494%                | 0,35%                    |

Sumber : LKPJ 2012 - 2016

*Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017*

POKJA SANITASI KABUPATEN KUNINGAN



Tabel 3.10. Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan Kabupaten Kuningan

| No  | Uraian                                | Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp) |                   |                   |                   |                   | Total<br>Pertumbuhan |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|     |                                       | n+1                                   | n+2               | n+3               | n+4               | n+5               |                      |
|     |                                       | 2018                                  | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |                      |
| (a) | (b)                                   | (c)                                   | (d)               | (e)               | (f)               | (g)               | (h)                  |
| 1   | Perkiraan Belanja Langsung            | 976.248.500.705                       | 1.083.635.835.782 | 1.202.835.777.718 | 1.335.147.713.267 | 1.482.013.961.727 | 11,56%               |
| 2   | Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi   | 16.196.000.000                        | 23.129.000.000    | 16.196.000.000    | 18.296.000.000    | 19.407.000.000    | 0,87%                |
| 3   | Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi | 1.017.400.000                         | 2.156.700.000     | 2.358.000.000     | 2.516.400.000     | 2.406.000.000     | 12,61%               |

Sumber : Analisis Pokja Tahun 2017

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2017-2021

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



Tabel 3.11. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

| No    | Uraian                                       | Belanja Sanitasi (Rp.) |             |             |             |               | Pertumbuhan rata-rata |
|-------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
|       |  | n-5                    | n-4         | n-3         | n-2         | n-1           |                       |
|       |  | 2012                   | 2013        | 2014        | 2015        | 2016          |                       |
| 1     | <b>Belanja Sanitasi</b>                      |                        |             |             |             |               |                       |
| 1.1   | <b>Air Limbah Domestik</b>                   | -                      | -           | -           | 585.800.000 | 585.800.000   |                       |
| 1.1.1 | Biaya operasional / pemeliharaan (justified) | -                      | -           | -           | -           | -             |                       |
| 1.2   | <b>Sampah domestik</b>                       |                        |             |             |             |               |                       |
| 1.2.1 | Biaya operasional/pemeliharaan (justified)   | 75.000.000             | 782.600.000 | 650.000.000 | 535.000.000 | 1.540.000.000 |                       |
| 1.3   | <b>Drainase perkotaan</b>                    |                        |             |             |             |               |                       |
| 1.3.1 | Biaya operasional/pemeliharaan (justified)   | -                      | -           | -           | 33.000.000  | 33.000.000    |                       |

Sumber : Analisis Pokja Tahun 2017

*Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017*

POKJA SANITASI KABUPATEN KUNINGAN

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2017-2021

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



Tabel 3.12. Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun Hingga Tahun 2022

| No         | Uraian  | Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) |               |               |               |               | Total Pendanaan |
|------------|---|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|            |   | 2018                                 | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |                 |
| <b>1</b>   | <b>Belanja Sanitasi</b>                               |                                      |               |               |               |               |                 |
| <b>1.1</b> | <b>Air Limbah Domestik</b>                            |                                      |               |               |               |               |                 |
| 1.1.1      | Biaya operasional / pemeliharaan ( <i>justified</i> ) | 585.800.000                          | 585.800.000   | 1.122.400.000 | 1.122.400.000 | 1.122.400.000 | 4.538.800.000   |
| <b>1.2</b> | <b>Persampahan</b>                                    |                                      |               |               |               |               |                 |
| 1.2.1      | Biaya operasional/pemeliharaan ( <i>justified</i> )   | 2.097.000.000                        | 2.120.000.000 | 2.120.000.000 | 2.120.000.000 | 2.120.000.000 | 10.577.000.000  |
| <b>1.3</b> | <b>Drainase Lingkungan</b>                            |                                      |               |               |               |               |                 |
| 1.3.1      | Biaya operasional/pemeliharaan ( <i>justified</i> )   | 33.000.000                           | 43.000.000    | 223.000.000   | 343.000.000   | 133.000.000   | 775.000.000     |

Sumber : Analisis Pokja Tahun 2017

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2017-2021

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



Tabel 3.14. Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

| No | Uraian   | Pendanaan (Rp.) |                |                 |                 |                | Total Pendanaan |
|----|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|    |  | 2018            | 2019           | 2020            | 2021            | 2022           |                 |
| 1  | Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan | 2.715.800.000   | 2.748.800.000  | 3.465.400.000   | 3.585.400.000   | 3.375.400.000  | 15.890.800.000  |
| 2  | Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi            | 16.196.000.000  | 23.129.000.000 | 16.196.000.000  | 18.296.000.000  | 19.407.000.000 | 93.224.000.000  |
| 3  | Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi          | 1.017.400.000   | 2.156.700.000  | 2.358.000.000   | 2.516.400.000   | 2.406.000.000  | 10.454.500.000  |
| 4  | Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)      | 13.480.200.000  | 20.380.200.000 | 12.730.600.000  | 14.710.600.000  | 16.031.600.000 | 77.333.200.000  |
| 5  | Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)        | (1.698.400.000) | (592.100.000)  | (1.107.400.000) | (1.069.000.000) | (969.400.000)  | (5.436.300.000) |

Sumber : Analisis Pokja Tahun 2017



## BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang mencakup tidak hanya aspek teknis tetapi juga aspek non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan kepada masyarakat miskin).

Untuk menentukan isu strategis, posisi pengelolaan dan rumusan strategi pembangunan sanitasi diberlakukan sebuah alat bantu untuk memudahkan. Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat) menjadi salah satu alat bantu karena sudah familiar digunakan untuk merumuskan **performa spesifik** yang digunakan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi segala kondisi yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman bagi terwujudnya performa bersangkutan dan sekaligus merumuskan alternatif kebijakan yang seharusnya diambil agar performa spesifik bersangkutan dapat terwujud berdasarkan faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) yang ada pada saat itu;.

- (1) **Kekuatan (Strength)** yang dimaksud dalam analisis SWOT adalah segala faktor/kondisi yang telah ada atau telah dimiliki yang diperkirakan memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang bersangkutan;
- (2) **Kelemahan (Weakness)** adalah segala faktor/kondisi yang belum ada atau belum dimiliki yang diperkirakan memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang bersangkutan;
- (3) **Peluang (Opportunities)** adalah segala faktor/kondisi eksternal yang diperkirakan dapat mendukung terwujudnya performa yang diharapkan dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar performa yang diharapkan tersebut benar-benar dapat terwujud; dan
- (4) **Ancaman (Threat)** adalah faktor/kondisi yang diperkirakan dapat menghambat terwujudnya performa yang diharapkan dan perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya agar performa yang diharapkan tersebut tetap dapat diwujudkan.

Mengenai detail strategi pengembangan sanitasi yang ada di Kabupaten Kuningan akan dijabarkan sebagai berikut :

### 4.1 Air Limbah Domestik

Berdasarkan kondisi permasalahan air limbah, hasil analisa SWOT dan peta tahapan pengembangan air limbah domestik kabupaten kuningan serta berdasarkan kawasan terbangun dan *Central Business Districts* (CBD) dan Peta Area beresiko sanitasi yang terdapat

# ***Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2017-2021***

**KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT**



dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) yang dipadukan dengan SPM, RPJMN, RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kuningan, maka tujuan, sasaran dan strategi untuk pencapaian pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1 Matriks SWOT untuk Merumuskan Strategi Sub Sektor Air Limbah

|                         |  | Kekuatan (S)   |  | Kelemahan (W)  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                         |  |  |  |  |  |  |
| <b>Faktor Internal</b>  |  | 1  | Sudah ada Institusi Pengelola Air Limbah                                       | 1  | Belum adanya perda yang mengatur pengelolaan air limbah                              |  |
|                         |  | 2  | Adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam rangka peningkatan akses sanitasi | 2  | Peran Pokja Sanitasi yang sudah terbentuk masih belum optimal                        |  |
|                         |  | 3  | Adanya Kelompok Kerja Sanitasi   | 3  | Anggaran APBD untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air limbah masih kurang |  |
|                         |  | 4  | Adanya Perda Retribusi   | 4  | Belum memiliki IPLT  |  |
|                         |  | 5  | Adanya anggaran APBD untuk pengelolaan air limbah                              | 5  | Belum memiliki truck tinja   |  |
|                         |  | 6  | Adanya IPAL Komunal  | 6  | Kegiatan sosialisasi / penyuluhan yang rutin dan berkesinambungan masih rendah       |  |
|                         |  | 7  | Adanya MCK Komunal   | 7  | Jumlah SDM yang mengelola Air Limbah masih minim                                     |  |
|                         |  | 8  | Adanya media komunikasi  |  |  |  |
|                         |  | 9  | Adanya SDM yang mengelola air limbah   |  |  |  |
|                         |  | 10   | Adanya kader kesehatan/tim penyuluh STBM                                       |  |  |  |
| <b>Faktor Eksternal</b> | <b>Peluang (O)</b>   |  | <b>Strategi S-O (Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)</b>          |  | <b>Strategi W-O (Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang)</b>                       |  |
|                         | 1  | Belum mempunyai UPTD khusus yang mengelola air limbah                        | 1  | (S101, S601) Perlu dibentuk UPTD yang khusus mengelola air limbah domestik   |  |  |
|                         | 2  | Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi                      | 2  | (S202, S205, S302) Menyiapkan payung hukum/ kebijakan untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan air limbah domestik dan industri  |  |  |
|                         | 3  | Adanya perusahaan yang menyediakan dana CSR untuk sanitasi                   | 3  | (S202, S205, S402) Memaksimalkan potensi APBD serta memenuhi readiness criteria untuk bisa mendapatkan alokasi pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah (Pembangunan IPLT, pembangunan IPAL, MCK++, LLTT, dll) |  |  |
|                         | 4  | Adanya media komunikasi yang bisa dimaksimalkan                              | 4  | (S203, S707) Membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta   |  |  |
|                         | 5  | Adanya program dari pemerintah pusat mengenai air limbah yang belum di akses | 5  | (S204, S304, S504, S804, S806) Perlu dimaksimalkannya sosialisasi kepada khalayak masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka  |  |  |
|                         | 6  | Adanya kader di masyarakat yang peduli lingkungan                            | 6  | (S906, S1006) Perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan air limbah  |  |  |
|                         | 7  | Adanya peluang kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan air limbah          |  |  |  |  |
| <b>Ancaman (T)</b>      |  | <b>Strategi S-T (Menggunakan kekuatan untuk mengatasi Ancaman)</b>           |  | <b>Strategi W-T (Mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman)</b>   |  |  |
| 1                       | Belum memiliki media komunikasi yang potensial untuk penyebaran informasi terkait sanitasi sehingga informasi-informasi terkait sanitasi |  |  |  |  |  |
| 2                       | Kegiatan sosialisasi / penyuluhan dari pihak swasta terkait sanitasi masih rendah  |  |  |  |  |  |
| 3                       | Partisipasi masyarakat masih rendah  |  |  |  |  |  |
| 4                       | Masih ada praktek BABS di masyarakat   |  |  |  |  |  |



Penjelasan Mengenai Strategi Analisa SWOT Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran :

- Strategi 1: Perlu Dibentuk UPTD yang khusus mengelola air limbah domestik

Selama ini belum ada UPTD yang menangani pengelolaan air limbah domestik. Harapan dengan terbentuknya UPTD ini adalah SDM yang menangani pengelolaan air limbah domestik dapat melakukan tugasnya dengan optimal

- Strategi 2 : Menyiapkan payung hukum/ kebijakan untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengelolaan air limbah domestik dan industri

Kabupaten Kuningan belum mempunyai perangkat hukum dalam pengelolaan air limbah domestik maupun industri sehingga dipandang perlu untuk segera menyusun

- Strategi 3 : Pemenuhan readiness criteria untuk bisa mendapatkan alokasi pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah (pembangunan IPLT, pembangunan IPAL, MCK, LLTT, dll)

Dalam perencanaan program dan kegiatan yang membutuhkan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat perlu dipenuhi readiness criteria atau persyaratan-persyaratannya, hal ini penting dilakukan karena jika hanya mengandalkan anggaran dari APBD Kota tidak akan cukup untuk mengatasi kebutuhan

- Strategi 4 : Membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta

Belum adanya sektor swasta untuk bekerja sama dalam pengelolaan air limbah domestik

- Strategi 5 : Perlu dimaksimalkannya sosialisasi kepada khalayak masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka.

Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik sehingga efluen yang dibuang sudah ramah lingkungan

- Strategi 6 : Perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan air limbah domestik

Agar kualitas dari SDM pengelola limbah dapat menjalankan tugasnya dengan baik

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2017-2021

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



Tabel 4.2. Hubungan Strategi SWOT Terhadap Tujuan dan Sasaran Sub Sektor Air Limbah

| No | Strategi SWOT  | SSK Pemutakhiran   |   |
|----|--|--|---|
|    |  | Tujuan   | Sasaran   |
| 1  | (S101, S601) Perlu dibentuk UPTD yang khusus mengelola air limbah domestik   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan air limbah domestik              | Meningkatnya kemampuan SDM dalam pengelolaan air limbah domestik  |
| 2  | (S202, S205, S302) Menyiapkan payung hukum/ kebijakan untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan air limbah domestik dan industri  | Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik dan industri                         | Tersedianya payung hukum dalam pengelolaan air limbah domestik dan industri                                 |
| 3  | (S202, S205, S402) Memaksimalkan potensi APBD serta memenuhi readiness criteria untuk bisa mendapatkan alokasi pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah (Pembangunan IPLT, pembangunan IPAL, MCK++, LLTT, dll) | Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik   | Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan |
| 4  | (S203, S707) Membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta   | Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik   | Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan |
| 5  | (S204, S304, S504, S804, S806) Perlu dimaksimalkannya sosialisasi kepada khalayak masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka)   | Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam menerapkan STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan) | Tidak ada penduduk yang melakukan BABS ditahun 2019   |
| 6  | (S906, S1006) Perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan air limbah  | Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam menerapkan STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan) | Tidak ada penduduk yang melakukan BABS ditahun 2019   |



### **4.2 Pengelolaan Persampahan**

Tujuan pengembangan sanitasi sub sektor persampahan di Kabupaten Kuningan adalah bertambahnya pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Kuningan sebanyak 85% untuk kawasan perkotaan pada tahun 2022. Dari tujuan ini kemudian dirumuskan sasaran dan strategi. Tujuan, sasaran dan strategi ini dirumuskan berdasarkan kondisi permasalahan persampahan, hasil analisa SWOT serta berdasarkan analisa dari tahapan pengembangan pengelolaan persampahan untuk lima tahun mendatang sesuai peta tahapan pengembangan bidang persampahan yang dipadukan dengan SPM, RPJMN, RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kuningan.



Tabel 4.3 Matriks SWOT untuk Merumuskan Strategi Sub Sektor Persampahan

|                         |  | Kekuatan (S)  |  | Kelemahan (W)  |  |
|-------------------------|--|---|--|--|--|
|                         |  |   |  |  |  |
| <b>Faktor Internal</b>  |  | 1   | Sudah ada Institusi Pengelola Persampahan  | 1  | Peran Pokja Sanitasi yang sudah terbentuk masih belum optimal                  |
|                         |  | 2   | Adanya Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan   | 2  | Anggaran APBD untuk pengelolaan persampahan masih terbatas                     |
|                         |  | 3   | Adanya Kelompok Kerja Sanitasi   | 3  | Luas TPA masih belum memadai (perlu perluasan lahan)                           |
|                         |  | 4   | Adanya dokumen masterplan persampahan  | 4  | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih kurang               |
|                         |  | 5   | Adanya Perda Retribusi   | 5  | Daerah layanan persampahan masih terbatas                                      |
|                         |  | 6   | Adanya anggaran APBD untuk pengelolaan persampahan   | 6  | Kegiatan sosialisasi / penyuluhan yang rutin dan berkesinambungan masih rendah |
|                         |  | 7   | Potensi pendapatan dari retribusi persampahan cukup tinggi   | 7  | Jumlah SDM yang mengelola persampahan masih minim                              |
|                         |  | 8   | Sudah memiliki TPA dengan sistem operasi <i>control landfill</i>   |  |  |
|                         |  | 9   | Adanya sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan (truk sampah, TPS, TPST 3R, container, mobil sampah, Alat Berat di TPA)  |  |  |
|                         |  | 10  | Adanya perda yang mengatur pengelolaan persampahan   |  |  |
|                         |  | 11  | Adanya media komunikasi  |  |  |
|                         |  | 12  | Adanya SDM yang mengelola persampahan  |  |  |
| <b>Faktor Eksternal</b> |  |   |  |  |  |
| <b>Peluang (O)</b>      |  | <b>Strategi S-O (Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)</b> |  | <b>Strategi W-O (Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang)</b>         |  |
| 1                       | Adanya Anggaran dari Pusat dan Provinsi, serta sektor Swasta yang bisa ditingkatkan  |   |  |  |  |
| 2                       | Adanya media komunikasi  |   |  |  |  |
| 3                       | Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan (Bank Sampah)  |   |  |  |  |
| 4                       | Adanya peluang kerjasama dengan dengan pihak swasta untuk pengelolaan persampahan  |   |  |  |  |
| <b>Ancaman (T)</b>      |  | <b>Strategi S-T (Menggunakan kekuatan untuk mengatasi Ancaman)</b>    |  | <b>Strategi W-T (Mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman)</b> |  |
| 1                       | Belum memiliki media komunikasi yang potensial untuk penyebaran informasi terkait sanitasi sehingga informasi-informasi terkait sanitasi | 1   | (S1T2, S1T3, S1T4, S2T3, S2T4, S3T2,S3T3,S3T4) Perlu dilakukan sosialisasi terhadap khalayak masyarakat terkait dengan perluasan TPA, penyiapan lahan untuk 3R               |  |  |
| 2                       | Kegiatan sosialisasi / penyuluhan dari pihak lain non pemerintah terkait persampahan masih rendah  | 2   | (S9T4) Perlu peningkatan sarana dan prasarana persampahan agar dapat memperluas cakupan layanan  |  |  |
| 3                       | Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah   | 3   | (S7T3, S7T5) Perlu peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan persampahan untuk dapat meningkatkan retribusi persampahan                |  |  |
| 4                       | Jumlah timbulan sampah yang terus meningkat setiap tahun   | 4   | (S10T3, S10T5, S11T3) Perlu peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan persampahan secara 3R (Reuse, Reduse, Recycle) kepada masyarakat |  |  |
| 5                       | Banyaknya pendatang dari luar daerah   | 5   | (S1S2S3S4T4) Melakukan review terhadap dokumen Master Plan   |  |  |



Penjelasan Mengenai Strategi Analisa SWOT Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran :

- Strategi 1 : Perlu dilakukan sosialisasi terhadap khalayak masyarakat terkait dengan perluasan TPA, penyiapan lahan untuk 3R

Hal ini dilakukan karena luas lahan TPA yang sekarang sudah semakin mengecil sehingga perlu dilakukan perluasan lahan. Penyediaan lahan untuk pengelolaan sampah secara 3 R juga diperlukan agar sampah yang terbuang di TPA benar-benar sampah yang sudah tidak bisa terolah sehingga dapat memperpanjang umur TPA yang sudah ada, selain itu hasil dari 3 R ini juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

- Strategi 2 : Perlu peningkatan sarana dan prasarana persampahan agar dapat memperluas cakupan layanan.

Jika pemerintah Kabupaten Kuningan akan memperluas area layanan persampahan maka harus ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan target universal access sanitasi pada akhir tahun 2019.

- Strategi 3 : Perlu peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan persampahan untuk dapat meningkatkan retribusi persampahan

Jika area layanan persampahan diperluas diharapkan masyarakat dan dunia usaha dapat memanfaatkannya karena akan dapat menambah pendapatan retribusi persampahan

- Strategi 4 : Perlu peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan persampahan secara 3R (Reuse, Reduse, Recycle) kepada masyarakat

Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mengelola sampah yang dihasilkan secara 3R dari sumbernya.

- Strategi 5 : Melakukan review terhadap dokumen Master Plan

Mastepelan yang sudah ada saat ini sudah kurang relevan dengan kondisi eksisting persampahan Kabupaten Kuningan sehingga perlu di review.



Tabel 4.4 Hubungan Strategi SWOT Terhadap Tujuan dan Sasaran Sub Sektor Persampahan

| No | Strategi SWOT   | SSK Pemutakhiran   |   |
|----|---|--|---|
|    |   | Tujuan   | Sasaran   |
| 1  | (S1T2, S1T3, S1T4, S2T3, S2T4, S3T2,S3T3,S3T4) Perlu dilakukan sosialisasi terhadap khalayak masyarakat terkait dengan perluasan TPA, penyiapan lahan untuk 3R  | Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan persampahan                    | Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan skala Kabupaten wilayah perkotaan dari 37% menjadi 85% pada tahun 2019                             |
| 2  | (S9T4) Perlu peningkatan sarana dan prasarana persampahan agar dapat memperluas cakupan layanan   | Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan persampahan                    | Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan skala Kabupaten wilayah perkotaan dari 37% menjadi 85% pada tahun 2019                             |
| 3  | (S7T3, S7T5) Perlu peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan persampahan untuk dapat meningkatkan retribusi persampahan<br>(S10T3, S10T5, S11T3) Perlu peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan persampahan secara 3R (Reuse, Reduse, Recycle) kepada masyarakat | Peningkatan pengelolaan sampah yang bewawasan lingkungan oleh masyarakat dan dunia usaha | Meningkatan pengelolaan persampahan dengan kegiatan 3 R (Reuse,Reduse dan Recycle) secara partisipatif dari 1,48% menjadi 10% pada tahun 2019 |
|    |   | Meningkatkan jalinan kerjasama pengelolaan sampah dengan kalangan swasta                 | Terjalannya kerjasama pengelolaan persampahan dengan kalangan swasta  |
| 4  | (S1S2S3S4T4) Melakukan review terhadap dokumen Master Plan (S1T2, S1T3, S1T4, S2T3, S2T4, S3T2,S3T3,S3T4) Perlu dilakukan sosialisasi terhadap khalayak masyarakat terkait dengan perluasan TPA, penyiapan lahan untuk 3R   | Peningkatan pengelolaan sampah yang bewawasan lingkungan oleh masyarakat dan dunia usaha | Meningkatan pengelolaan persampahan dengan kegiatan 3 R (Reuse,Reduse dan Recycle) secara partisipatif dari 1,48% menjadi 10% pada tahun 2019 |
|    |   | Meningkatkan jalinan kerjasama pengelolaan sampah dengan kalangan swasta                 | Terjalannya kerjasama pengelolaan persampahan dengan kalangan swasta  |
| 5  | (S9T4) Perlu peningkatan sarana dan prasarana persampahan agar dapat memperluas cakupan layanan   | Tersedianya review detail rencana pengelolaan persampahan                                | Tersedianya review Masterplan pengelolaan persampahan   |



### 4.3 Drainase Perkotaan

Prioritas pengembangan pelayanan sistem drainase di Kabupaten Kuningan berada pada kawasan perkotaan dan Pusat Kawasan Komersil atau *Central Bussines Distric (CBD)* sesuai Dokumen RTRW kabupaten Kuningan tahun 2011-2031. Kemudian akan berangsur menuju pengembangan pelayanan drainase pada kawasan permukiman perdesaan terutama diprioritaskan terhadap kawasan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal Promosi.



Tabel 4.5. Matrik SWOT Untuk Merumuskan Strategi Sub Sektor Drainase

|                         |  | Kekuatan (S)   | Kelemahan (W)  |
|-------------------------|--|--|--|
|                         |  | <b>Faktor Internal</b>   | 1 Sudah ada Institusi Pengelola Drainase Lingkungan<br>2 Adanya Pokja Sanitasi<br>3 Sudah ada alokasi APBD untuk pengelolaan drainase<br>4 Sarana dan Prasarana drainase sudah ada<br>5 Adanya media komunikasi<br>6 Adanya SDM yang mengelola drainase lingkungan |
| <b>Faktor Eksternal</b> |  |  |  |
| <b>Peluang (O)</b>      |  | <b>Strategi S-O (Mengggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)</b> | <b>Strategi W-O (Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang)</b>   |
| 1                       | Adanya media komunikasi  |  | 1 (W1O2) Perlu dilakukan koordinasi antar SKPD yang berwenang dalam pengelolaan drainase karena sistem drainase bersifat komprehensif sehingga dukungan program dari pusat dan provinsi dapat dimaksimalkan  |
| 2                       | Adanya dukungan program dari pusat dan provinsi tentang pengelolaan drainase lingkungan  |  | 2 (W1O1, W3O1, W4O1, W4O4, W8O1) Perlu dilakukan sosialisasi kepada khalayak masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka)  |
| 3                       | Peluang kerja sama dengan swasta untuk pengelolaan drainase lingkungan (contoh: MOU dengan Pengembang Perumahan)                         |  | 3 (W2O3) Perlu dibuatkan perangkat hukum yang dapat digunakan untuk pengelolaan drainase serta kemungkinan melakukan kerjasama pengelolaan sistem drainase   |
| 4                       | Adanya kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat   |  | 4 (W4O2, W5O3, W6O4, W7O2, W9O4) Perlu peningkatan anggaran dari APBD untuk dapat menunjang pemeliharaan saluran drainase secara berkala, membuat sistem informasi terpadu tentang drainase serta penambahan tenaga teknis pengelola drainase                      |
|                         |  |  | 5 (W4O2) Membangun saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh desa/kelurahan sampai Tahun 2022  |
|                         |  |  | 6 (W4O2, W7O2) Menyusun masterplan sistem drainase untuk seluruh kecamatan   |
|                         |  |  | 7 (W6O2, W6O3, W6O4) Melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan seluruh saluran drainase terbangun di Kab. Kuningan   |
| <b>Ancaman (T)</b>      |  | <b>Strategi S-T (Mengggunakan kekuatan untuk mengatasi Ancaman)</b>    | <b>Strategi W-T (Mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman)</b>   |
| 1                       | Pihak swasta belum tertarik memberikan CSR dalam bidang pengelolaan drainase   |  |  |
| 2                       | Belum memiliki media komunikasi yang potensial untuk penyebaran informasi terkait sanitasi sehingga informasi-informasi terkait sanitasi |  |  |
| 3                       | Kegiatan sosialisasi / penyuluhan terkait sanitasi masih rendah  |  |  |
| 4                       | Partisipasi masyarakat untuk memelihara saluran drainase masih rendah  |  |  |
| 5                       | Luas wilayah Administratif yang luas   |  |  |
| 6                       | Bencana Alam, dapat merusak sarana prasarana drainase  |  |  |



Penjelasan Mengenai Strategi Analisa SWOT Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran :

- Strategi 1 : Perlu dilakukan koordinasi antar SKPD yang berwenang dalam pengelolaan drainase karena sistem drainase bersifat komprehensif sehingga dukungan program dari pusat dan provinsi dapat dimaksimalkan

Pembangunan system drainase lingkungan tidak bisa dilakukan oleh satu SKPD saja, karena drainase lingkungan nantinya akan mengalir menuju drainase sekunder dan primer yang sudah menjadi kewenangan SKPD yang lain.

- Strategi 2 : Perlu dilakukan sosialisasi kepada khalayak masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka)

Masyarakat agar turut berperan serta dalam pengelolaan drainase lingkungan (contoh : tidak membuang sampah di saluran drainase, tidak mendirikan bangunan di atas saluran drainase, dll)

- Strategi 3 : Perlu dibuatkan perangkat hukum yang dapat digunakan untuk pengelolaan drainase serta kemungkinan melakukan kerjasama pengelolaan sistem drainase

Perangkat hukum perlu dibuat untuk mengatur pengelolaan system drainase serta sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggar.

- Strategi 4 : Perlu peningkatan anggaran dari APBD untuk dapat menunjang pemeliharaan saluran drainase secara berkala, membuat sistem informasi terpadu tentang drainase serta penambahan tenaga teknis pengelola drainase dikarenakan adanya keuntungan luas wilayah administratif yang relatif kecil.

Dengan luas wilayah administrative yang relative kecil diharapkan pemeliharaan saluran drainase dapat dilakukan dengan maksimal. Untuk mendukung kegiatan tersebut perlu dibuat suatu system informasi terpadu tentang drainase serta menyiapkan tenaga teknis untuk mengelola drainase

- Strategi 5 : Membangun saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh desa/kelurahan sampai Tahun 2022

Pembangunan saluran drainase lingkungan yang awalnya hanya dilakukan di beberapa desa/ kelurahan untuk saat ini harus bisa dilakukan di seluruh desa/ kelurahan.



- Strategi 6 : Menyusun masterplan sistem drainase untuk seluruh kecamatan

Penyusunan masterplan drainase untuk setiap kecamatan dianggap penting karena jaringan drainase itu bersifat komprehensif sehingga perlu perencanaan yang menyeluruh.

- Strategi 7 : Melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan seluruh saluran drainase terbangun di Kabupaten Kuningan

Saluran drainase yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki karena dapat mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan, sedangkan saluran drainase yang masih baik perlu juga dipelihara agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.



Tabel 4.11. Hubungan Strategi SWOT Terhadap Tujuan dan Sasaran

| No | Strategi SWOT  | SSK Pemutakhiran  |   |
|----|--|---|---|
|    |  | Tujuan  | Sasaran   |
| 1  | (W1O2) Perlu dilakukan koordinasi antar SKPD yang berwenang dalam pengelolaan drainase karena sistem drainase bersifat komprehensif sehingga dukungan program dari pusat dan provinsi dapat dimaksimalkan                                  | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase kota yang memadai dan berwawasan lingkungan | (1).Cakupan sarana dan prasarana drainase melingkupi seluruh wilayah permukiman a<br>(2).Terbangunnya saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh desa/kelurahan ditahun 2022 |
| 2  | (W1O1, W3O1, W4O1,W4O4, W8O1) Perlu dilakukan sosialisasi kepada khalayak masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka)   | Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase di Kabupaten Kuningan                 | Perbaikan drainase sebesar 100% dari total saluran yang rusak setiap tahun  |
| 3  | (W2O3) Perlu dibuatkan perangkat hukum yang dapat digunakan untuk pengelolaan drainase serta kemungkinan melakukan kerjasama pengelolaan sistem drainase   | Meningkatkan cakupan layanan drainase melalui regulasi.   | Adanya regulasi yang mengatur drainase  |
| 4  | (W4O2, W5O3, W6O4, W7O2,W9O4) Perlu peningkatan anggaran dari APBD untuk dapat menunjang pemeliharaan saluran drainase secara berkala, membuat sistem informasi terpadu tentang drainase serta penambahan tenaga teknis pengelola drainase | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase kota yang memadai dan berwawasan lingkungan | (1).Cakupan sarana dan prasarana drainase melingkupi seluruh wilayah permukiman<br>(2).Terbangunnya saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh desa/kelurahan di Tahun 2022  |
| 5  | (W4O2) Membangun saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh desa/kelurahan sampai Tahun 2022  | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase kota yang memadai dan berwawasan lingkungan | (1).Cakupan sarana dan prasarana drainase melingkupi seluruh wilayah permukiman a<br>(2).Terbangunnya saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh                             |

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2017-2021

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



|   |  |  | desa/kelurahan di Tahun 2022  |
|---|--|--|---|
| 6 | (W4O2, W7O2) Menyusun masterplan sistem drainase untuk seluruh kecamatan   | Tersedianya Masterplan rencana pengelolaan drainase                        | Adanya Masterplan rencana pengelolaan drainase sebagai salah satu acuan dalam pembangunan drainase lingkungan |
| 7 | (W6O2, W6O3, W6O4) Melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan seluruh saluran drainase terbangun di Kab. Kuningan | Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase di Kab. Kuningan | Perbaikan drainase sebesar 100% dari total saluran yang rusak setiap tahun                                    |

*Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017*

POKJA SANITASI KABUPATEN KUNINGAN



## BAB V KERANGKA KERJA LOGIS

Sebuah perencanaan tanpa menggunakan kerangka kerja logis (*logical framework*) dapat berakibat fatal, oleh karena itu semua tahap perencanaan ini harus dibuat secara logis, mempunyai kerangka, dari satu tahap ketahap yang lain. Yang sangat menarik dari kerangka kerja logis ini adalah dengan menggunakan indikator yang jelas, terukur dan spesifik. Intinya kerangka kerja logis adalah suatu pendekatan perencanaan program yang disusun secara logis dengan menggunakan indikator yang jelas dan kerangka ini yang akan dipakai dalam pengorganisasian program bahkan tahap-tahap berikutnya dalam manajemen program yaitu pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program.

Berikut ini adalah tabel kerangka kerja logis pembangunan sanitasi yang ada di Kabupaten Kuningan :

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2018-2022

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



Tabel 5.1 Kerangka Kerja Logis Sektor Air Limbah Kabupaten Kuningan

| No | Permasalahan Mendesak Sanitasi  | Isu Strategis  | Tujuan   | Sasaran  | Strategi  | Indikasi Program  | Indikasi Kegiatan   |
|----|---|--|--|--|---|---|---|
| 1  | Masih ada masyarakat BABS (Buang Air Besar Sembarangan) sebesar 11,77 % pada Tahun 2017 | (1) Tingginya perilaku BABS di masyarakat<br>(2) Belum memiliki IPLT | Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam menerapkan STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan) | Tidak ada penduduk yang melakukan BABS ditahun 2019  | (S204, S304, S504, S804,S806) Perlu dimaksimalkannya sosialisasi kepada khalayak masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka)<br>(S906, S1006) Perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan air limbah                      | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah                       | (1) Sosialisasi Penyuluhan (Kampanye) Pelatihan Fasilitasi<br>(2) Pembangunan jamban keluarga<br>(3) Pembangunan MCK Komunal  |
| 2  | Terbatasnya sarana dan prasarana air limbah   |  | Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah                    | Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan | (S202, S205, S402) Memaksimalkan potensi APBD serta memenuhi readines criteria untuk bisa mendapatkan alokasi pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat dalam peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah (Pembangunan IPLT, pembangunan IPAL, MCK++, LLTT, dll) | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah berwawasan lingkungan | (1).Pengadaan truck pengangkut tinja (Supply)<br>(2).Pembangunan MCK ++ di seluruh Kecamatan<br>(3).Pembuatan IPAL / Penyediaan septik tank komunal di beberapa tempat /kawasan.<br>(4). Pembangunan IPLT.<br>(5). Penyiapan Program LLTT |

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017

POKJA SANITASI KABUPATEN KUNINGAN

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2018-2022

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



|   |   |  |  |   |   |  |   |
|---|---|--|--|---|---|--|---|
|   |   |  |  |   | (S203, S707)<br>Membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta   | Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan   | Penyusunan kebijakan pengelolaan air limbah dengan pihak swasta   |
| 3 | Belum tersedianya payung hukum untuk pengelolaan air limbah secara menyeluruh |  | Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik dan industri | Tersedianya payung hukum untuk pengelolaan air limbah domestik dan industri | (S202, S205, S302)<br>Menyiapkan payung hukum/ kebijakan untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengelolaan air limbah domestik dan industri                    | (1).Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan<br>(2).Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. | (1).Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan<br>(2).Penyusunan perda air limbah domestik dan industri/Perbub tentang limbah B3 |
| 4 | Terbatasnya SDM dalam pengelolaan lingkungan.                                 |  | Kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan lingkungan meningkat. | Meningkatnya SDM dalam pengelolaan lingkungan                               | (S101, S601) Perlu dibentuk UPTD yang khusus mengelola air limbah domestik<br><br>(S906, S1006) Perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan air limbah | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah  | (1).Sosialisasi dan optimalisasi dalam pengelolaan lingkungan .<br>(2).Pelatihan dalam pengelolaan lingkungan.<br>(3) Pembentukan UPTD Air Limbah           |

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017

POKJA SANITASI KABUPATEN KUNINGAN

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2018-2022

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



Tabel 5.2 Kerangka Kerja Logis Sektor Persampahan Kabupaten Kuningan

| No | Permasalahan Mendesak Sanitasi   | Isu Strategis   | Tujuan   | Sasaran  | Strategi  | Program   | Kegiatan   |
|----|--|---|--|--|---|---|--|
| 1  | Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah  | (1). Masih belum maksimalnya anggaran untuk pengelolaan sampah<br>(2). Area layanan persampahan wilayah perkotaan masih minim | Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan persampahan                    | Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan skala Kabupaten wilayah perkotaan dari 37% menjadi 85% pada tahun 2019                              | (S1T2, S1T3, S1T4, S2T3, S2T4, S3T2,S3T3,S3T4) Perlu dilakukan sosialisasi terhadap khalayak masyarakat terkait dengan perluasan TPA, penyiapan lahan untuk 3R<br><br>(S9T4) Perlu peningkatan sarana dan prasarana persampahan agar dapat memperluas cakupan layanan   | Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan                                    | (1).Pengadaan Dump Truck /Armroll Truk/Eksavator/Land Compaktor,Kendaraan roda tiga(motor sampah) ,Gerobak tarik,<br>(2).Pembuatan landasan Container dan Container.<br>(3).Pengadaan tong sampah dorong ,Tong pemilah sampah.<br>(4).Pengadaan lahan untuk penunjang pengelolaan sampah melalui pola 3 R dan Revitalisasi/Perluasan TPA |
| 2  | Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah melalui pola 3 R |   | Peningkatan pengelolaan sampah yang bewawasan lingkungan oleh masyarakat dan dunia usaha | Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan kegiatan 3 R (Reuse,Reduse dan Recycle) secara partisipatif dari 1,48% menjadi 10% pada tahun 2019 | (S10T3, S10T5, S11T3) Perlu peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan persampahan secara 3R (Reuse, Reduse, Recycle) kepada masyarakat<br><br>(S7T3, S7T5) Perlu peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan persampahan untuk dapat meningkatkan retribusi persampahan | Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan oleh seluruh pemangku kepentingan. | (1).Pelatihan/Workshop perangkat pengelolaan sampah.<br>(2).Bimbingan Teknis Persampahan kepada subyek pengelola persampahan.<br>(3).Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan pola 3 R untuk Aparat pengelola dan Masyarakat dan dunia usaha  |
| 3  | Belum tersedianya perencanaan persampahan secara menyeluruh                                    |   | Tersedianya review detail rencana pengelolaan persampahan                                | Tersedianya review Masterplan pengelolaan persampahan  | (S1S2S3S4T4) Melakukan review terhadap dokumen Master Plan  | Program pengembangan kinerja pengelolaan sistem persampahan                     | Pelaksanaan Review Masterplan sistem persampahan   |

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2018-2022



## KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT

|   |  |  |  |   |   |  |
|---|--|--|--|---|---|--|
| 4 | Masih kurang terjalannya kerjasama pengelolaan persampahan dengan kalangan Swasta. | Meningkatkan jalinan kerjasama pengelolaan sampah dengan kalangan swasta | Terjalannya kerjasama pengelolaan persampahan dengan kalangan swasta | (S10T3, S10T5, S11T3) Perlu peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan persampahan secara 3R (Reuse, Reduse, Recycle) kepada masyarakat<br><br>(S7T3, S7T5) Perlu peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan persampahan untuk dapat meningkatkan retribusi persampahan | Program pengembangan kinerja pengelolaan sistem persampahan | (1).Promosi tentang produk daur ulang sampah oleh Pemerintah kepada Pelaku Usaha/Bisnis.<br>(2).Peningkatan Sinergi antara Pemkab dengan pelaku usaha<br>(3).Pengelolaan dan penerimaan hasil pengolahan sampah. |
|---|--|--|--|---|---|--|

*Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017*

POKJA SANITASI KABUPATEN KUNINGAN

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2018-2022

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



Tabel 5.3 Kerangka Kerja Logis Sektor Drainase Lingkungan Kabupaten Kuningan

| No | Permasalahan Mendesak Sanitasi                             | Isu Strategis   | Tujuan  | Sasaran  | Strategi   | Program  | Kegiatan   |
|----|--|---|---|--|--|--|--|
| 1  | Pelayanan saluran drainase masih kurang                    | Masih terjadi genangan jika ada hujan yang deras dan berlangsung lama | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase kota yang memadai dan berwawasan lingkungan | (1).Cakupan sarana dan prasarana air limbah melingkupi seluruh wilayah kabupaten<br>(2).Terbangunnya saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh desa/kelurahan ditahun 2022 | (W1O2) Perlu dilakukan koordinasi antar SKPD yang berwenang dalam pengelolaan drainase karena sistem drainase bersifat komprehensif sehingga dukungan program dari pusat dan provinsi dapat dimaksimalkan<br><br>(W4O2, W5O3, W6O4, W7O2,W9O4) Perlu peningkatan anggaran dari APBD untuk dapat menunjang pemeliharaan saluran drainase secara berkala, membuat sistem informasi terpadu tentang drainase serta penambahan tenaga teknis pengelola drainase<br><br>(W4O2) Membangun saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh desa/kelurahan sampai Tahun 2022 | Program Pengembangan Saluran Drainase dan Air Limbah | (1). Pembuatan sistem informasi drainase<br>(2).Pembangunan saluran drainase di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan |
| 2  | Belum adanya regulasi yang mengatur tentang drainase.      |   | Meningkatkan cakupan layanan drainase melalui regulasi.   | Adanya regulasi yang mengatur drainase   | (W2O3) Perlu dibuatkan perangkat hukum yang dapat digunakan untuk pengelolaan drainase serta kemungkinan melakukan kerjasama pengelolaan sistem drainase   | Program Pengembangan Saluran Drainase dan Air Limbah | Penyusunan perda tentang drainase  |
| 3  | Perlu tersedianya perencanaan drainase yang sesuai/memadai |   | Tersedianya detail rencana pengelolaan drainase   | Tersedianya masterplan sistem pengelolaan drainase   | (W4O2, W7O2) Menyusun masterplan sistem drainase untuk seluruh kecamatan   | Program Pengembangan Saluran Drainase dan Air Limbah | (1). Penyusunan Masterplan sistem drainase untuk tiap Kecamatan<br>(2).Perencanaan DED saluran drainase .          |

*Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017*

POKJA SANITASI KABUPATEN KUNINGAN

# Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2018-2022

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



|   |  |  |   |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|--|---|
| 4 | Saluran drainase mengalami kerusakan dan memerlukan pemeliharaan |  | Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase | Perbaikan drainase sebesar 100% dari total saluran yang rusak setiap tahun | <p>(W602, W603, W604)<br/>Melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan seluruh saluran drainase terbangun di Kab. Kuningan</p> <p>(W101, W301, W401, W404, W801) Perlu dilakukan sosialisasi kepada khalayak masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka</p> | Program Pengembangan Saluran Drainase dan Air Limbah | Perbaikan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/ Normalisasi saluran drainase |
|---|--|--|---|--|---|--|---|

*Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017*

POKJA SANITASI KABUPATEN KUNINGAN



## BAB VI PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

### 6.1 Ringkasan

Bab 6 ini berisi tentang rencana pembiayaan sanitasi selama baik dari anggaran pemerintah maupun non pemerintah

**Tabel 6.1**  
**Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun**

X Rp. 1 Juta

| No.                                       | Uraian Kegiatan     | Tahun Anggaran |        |        |        |        | Total Anggaran |
|---|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
|   |                     | n+1            | n+2    | n+3    | n+4    | n+5    |                |
| 1   | Air Limbah Domestik | 16.237         | 28.472 | 33.629 | 29.849 | 34.507 | 142.694        |
| 2   | Persampahan         | 14.659         | 15.597 | 16.607 | 15.137 | 23.825 | 85.825         |
| 3   | Drainase            | 13.550         | 6.850  | 8.050  | 6.450  | 7.550  | 42.450         |
| Jumlah (a)                                |                     | 44.446         | 50.919 | 58.286 | 51.436 | 65.882 | 270.969        |
| Perkiraan APBD Murni untuk sanitasi (b)   |                     |                |        |        |        |        |                |
| Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi (c) |                     |                |        |        |        |        |                |
| Gap 1 (a – b)                             |                     |                |        |        |        |        |                |
| Gap 2 (a – c)                             |                     |                |        |        |        |        |                |

Sumber : Lampiran 3 Dokumen SSK 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rencana pembiayaan sanitasi selama 5 Tahun ke depan untuk sektor Air Limbah Domestik Rp. 145.694.000.000,- , sektor Persampahan Rp. 85.825.000.000,- , sektor Drainase Rp. 42.450.000.000,-



**Tabel 6.2**  
**Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran**

X Rp. 1 Juta

| No.           | Sumber Anggaran       | Tahun Anggaran |        |        |        |        | Total Anggaran |
|---------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
|               |                       | n+1            | n+2    | n+3    | n+4    | n+5    |                |
| <b>A.</b>     | <b>Pemerintah</b>     |                |        |        |        |        |                |
| 1             | APBD Kabupaten        | 16.196         | 23.129 | 16.196 | 18.296 | 19.407 | 93.224         |
| 2             | APBD Provinsi         | 23.450         | 14.990 | 19.790 | 12.840 | 13.540 | 84.610         |
| 3             | APBN                  | 1.800          | 12.800 | 23.300 | 21.300 | 33.935 | 93.135         |
| Jumlah A      |                       | 41.446         | 50.919 | 59.286 | 52.436 | 66.882 | 270.969        |
| <b>B.</b>     | <b>Non-Pemerintah</b> |                |        |        |        |        |                |
| 1             | CSR Swasta            | 0              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0              |
| 2             | Masyarakat            | 0              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0              |
| Jumlah B      |                       | 0              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0              |
| Total (A + B) |                       | 41.446         | 50.919 | 59.286 | 52.436 | 66.882 | 270.969        |

Sumber : Lampiran 3 Dokumen SSK 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui proporsi rencana anggaran ayaasanitasi dari berbagai sumber anggaran. Untuk APBD Kabupaten sebesar Rp. 93.224.000.000,-, APBD Provinsi sebesar Rp. 84.610.000.000,-, APBN sebesar Rp. 93.135.000.000,-, sedangkan dari CSR/Swasta maupun dari Masyarakat Rp 0,-

**Tabel 6.3**  
**Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten**

X Rp. 1 Juta

| No.    | Uraian Kegiatan     | Tahun Anggaran |        |        |        |        | Total Anggaran |
|--------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
|        |                     | n+1            | n+2    | n+3    | n+4    | n+5    |                |
| 1      | Air Limbah Domestik | 3.187          | 10.732 | 6.339  | 7.859  | 9.442  | 37.559         |
| 2      | Persampahan         | 9.259          | 8.447  | 9.407  | 10.087 | 8.515  | 45.715         |
| 3      | Drainase            | 3.750          | 3.950  | 450    | 350    | 1.450  | 9.950          |
| Jumlah |                     | 16.196         | 23.129 | 16.196 | 18.296 | 19.407 | 93.224         |

Sumber : Lampiran 3 Dokumen SSK 2017

Berdasarkan tabel diatas rencana anggaran sanitasi dari APBD Kabupaten untuk tiap sub sektor Sanitasi adalah : Air Limbah Domestik Rp. 37.559.000.000,-, Persampahan Rp. 45.715.000.000,-, Drainase Rp. 9.950.000.000,-



**Tabel 6.4**  
**Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi**

X Rp. 1 Juta

| No.    | Uraian Kegiatan     | Tahun Anggaran |        |        |        |        | Total Anggaran |
|--------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
|        |                     | n+1            | n+2    | n+3    | n+4    | n+5    |                |
| 1      | Air Limbah Domestik | 12.500         | 8.990  | 11.790 | 8.840  | 9.040  | 51.160         |
| 2      | Persampahan         | 1.900          | 3.900  | 3.900  | 1.900  | 2.400  | 14.000         |
| 3      | Drainase            | 9.050          | 2.100  | 4.100  | 2.100  | 2.100  | 19.450         |
| Jumlah |                     | 23.450         | 14.990 | 19.790 | 12.840 | 13.540 | 84.610         |

Sumber : Lampiran 3 Dokumen SSK 2017

Berdasarkan tabel diatas rencana anggaran sanitasi dari APBD Provinsi untuk tiap sub sektor Sanitasi adalah : Air Limbah Domestik Rp. 51.160.000.000,- ,Persampahan Rp. 14.000.000.000,- , Drainase Rp. 19.450.000.000,-.

**Tabel 6.5**  
**Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN**

X Rp. 1 Juta

| No.    | Uraian Kegiatan     | Tahun Anggaran |        |        |        |        | Total Anggaran |
|--------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
|        |                     | n+1            | n+2    | n+3    | n+4    | n+5    |                |
| 1      | Air Limbah Domestik | 550            | 8.750  | 15.500 | 13.150 | 16.025 | 53.975         |
| 2      | Persampahan         | 500            | 3.250  | 4.300  | 4.150  | 13.910 | 26.110         |
| 3      | Drainase            | 750            | 800    | 3.500  | 4.000  | 4.000  | 13.050         |
| Jumlah |                     | 1.800          | 12.800 | 23.300 | 21.300 | 33.935 | 93.135         |

Sumber : Lampiran 3 Dokumen SSK 2017

Berdasarkan tabel diatas rencana anggaran sanitasi dari APBN untuk tiap sub sektor Sanitasi adalah : Air Limbah Domestik Rp. 53.975.000.000,- ,Persampahan Rp. 26.110.000.000,- , Drainase Rp. 13.050.000.000,-.



**Tabel 6.6**  
**Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK**

X Rp. 1 Juta

| No.    | Uraian Kegiatan     | Tahun Anggaran |     |     |     |     | Total Anggaran |
|--------|---------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
|        |                     | n+1            | n+2 | n+3 | n+4 | n+5 |                |
| 1      | Air Limbah Domestik |                |     |     |     |     |                |
| 2      | Persampahan         |                |     |     |     |     |                |
| 3      | Drainase            |                |     |     |     |     |                |
| Jumlah |                     |                |     |     |     |     |                |

Sumber : Lampiran 3 Dokumen SSK 2017

Rekapitulasi rencana anggaran sanitasi dari Sumber DAK = Rp. 0

**Tabel 6.6**  
**Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR**

X Rp. 1 Juta

| No.    | Uraian Kegiatan     | Tahun Anggaran |     |     |     |     | Total Anggaran |
|--------|---------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
|        |                     | n+1            | n+2 | n+3 | n+4 | n+5 |                |
| 1      | Air Limbah Domestik |                |     |     |     |     |                |
| 2      | Persampahan         |                |     |     |     |     |                |
| 3      | Drainase            |                |     |     |     |     |                |
| Jumlah |                     |                |     |     |     |     |                |

Sumber : Lampiran 3 Dokumen SSK 2017

Rekapitulasi rencana anggaran sanitasi dari Sumber Partisipasi Swasta/ CSR = Rp. 0



**Tabel 6.7**  
**Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat**

X Rp. 1 Juta

| No.    | Uraian Kegiatan     | Tahun Anggaran |     |     |     |     | Total Anggaran |
|--------|---------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
|        |                     | n+1            | n+2 | n+3 | n+4 | n+5 |                |
| 1      | Air Limbah Domestik |                |     |     |     |     |                |
| 2      | Persampahan         |                |     |     |     |     |                |
| 3      | Drainase            |                |     |     |     |     |                |
| Jumlah |                     |                |     |     |     |     |                |

Sumber : Lampiran 3 Dokumen SSK 2017

Rekapitulasi rencana anggaran sanitasi dari Sumber Partisipasi Masyarakat = Rp. 0

**Tabel 6.8**  
**Funding Gap**

X Rp. 1 Juta

| No. | Uraian                               | Tahun Anggaran |     |     |     |     | Total Anggaran |
|-----|--------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
|     |                                      | n+1            | n+2 | n+3 | n+4 | n+5 |                |
| 1   | Air Limbah Domestik                  |                |     |     |     |     |                |
| 2   | Persampahan                          |                |     |     |     |     |                |
| 3   | Drainase perkotaan                   |                |     |     |     |     |                |
| 4   | Daftar tunggu ( <i>Funding Gap</i> ) |                |     |     |     |     |                |
| 5   | Kebutuhan Pendanaan Sanitasi         |                |     |     |     |     |                |
| 6   | Gap (%)                              |                |     |     |     |     |                |

Sumber : Lampiran 3 Dokumen SSK 2017

Rekapitulasi Funding Gap = Rp 0,-



## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK perlu dilakukan secara rutin oleh pokja kabupaten/ kota. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK dilaksanakan sebagai usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya :

1. Monev partisipatif :  
Proses di mana stakeholder pada semua tingkatan terlibat dalam pemantauan atau evaluasi sebuah proyek, program atau kebijakan, berbagi kendali atas isi, proses dan hasil dari kegiatan M&E tersebut, dan terlibat dalam mengambil tindakan perbaikan
2. Monev internal:  
Proses Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD terkait pada semua bagian dan tingkatan,
3. Monev eksternal  
Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi/SKPD yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Monev di instansi/SKPD lainnya,
4. Monev khusus  
Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim khusus atas permintaan sendiri atau pihak lainnya

Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.



Adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut :

1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut.
2. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi
3. Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.
4. Prinsip sah, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur.
5. Prinsip penggunaan kritis
6. Prinsip kegunaan atau manfaat

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil Monitoring dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan:

1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.
2. Bentuk usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.
3. Kelembagaan untuk Monitoring dan Evaluasi Sanitasi.

Adapun mengenai prinsip-prinsip evaluasi, yaitu:

1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut;
2. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi
3. Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.
4. Prinsip sah, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur
5. Prinsip penggunaan kritis
6. Prinsip kegunaan atau manfaat

Bab VII tentang Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK, berisi mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK 5 (lima) tahun kedepan. Informasi pada Bab ini dituangkan dalam bentuk Tabel yang meliputi Tabel Capaian Strategis, Tabel Infrastruktur dan Akses, Pelaporan Monev Implementasi SSK, dan Tabel Jadwal Monitoring dan Evaluasi



berdasarkan masing-masing sub sektor sanitasi yaitu Sub Sektor Air Limbah Domestik, Persampahan, dan Drainase Perkotaan).

Tabel Capaian strategis SSK ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari sektor sanitasi dan rencana output, belanja maupun outcome yang akan dilakukan pada tahun 2017 serta realisasi yang dihasilkan. Capaian strategis untuk masing-masing subsektor sanitasi dapat dilihat pada tabel 7.1a; 7.1b, 7.1c.



**Tabel 7.1. Capaian Strategis Pembangunan Sektor Air Limbah Domestik**

- Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam menerapkan STOP BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
- Tujuan :**
- Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
  - Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah domestik dan industri
  - Kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan lingkungan meningkat
  - Tidak ada penduduk yang melakukan BABS ditahun 2019
- Sasaran :**
- Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan
  - Tersedianya payung hukum untuk pengelolaan air limbah domestik dan industri
  - Meningkatnya SDM dalam pengelolaan lingkungan
  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
  - Program Pengembangan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan
- Program :**
- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Kegiatan :**

| No | Sub Kegiatan   | Rencana                        |           |                | Realisasi                      |        |                |
|----|--|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|--------|----------------|
|    |  | Indikasi Investasi (xRp. Juta) | Output    | Outcome (jiwa) | Indikasi Investasi (xRp. Juta) | Output | Outcome (jiwa) |
| 1  | Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK   |                                |           |                |                                |        |                |
| a  | Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik | 75                             | 16 paket  |                |                                |        |                |
| b  | Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK Umum kepada masyarakat oleh Dinas Terkait                  | 75                             | 16 paket  |                |                                |        |                |
| c  | Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS)  | 75                             | 16 paket  |                |                                |        |                |
| d  | Pembebasan Lahan/Tanah   | 160                            | 16 paket  |                |                                |        |                |
| e  | Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK Umum  | 960                            | 56 paket  |                |                                |        |                |
| f  | Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.      | 315                            | 315 paket |                |                                |        |                |
| g  | Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS)                                      | 80                             | 80 paket  |                |                                |        |                |
| h  | Pembangunan MCK Umum   | 25.200                         | 56 unit   |                |                                |        |                |
| i  | Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK Umum  | 62                             | 31 paket  |                |                                |        |                |
| 2  | Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK ++  |                                |           |                |                                |        |                |
| a  | Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik | 150                            | 16 paket  |                |                                |        |                |



|   |  |        |           |  |  |  |  |
|---|--|--------|-----------|--|--|--|--|
| b | Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas Terkait                     | 75     | 16 paket  |  |  |  |  |
| c | Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS)  | 75     | 16 paket  |  |  |  |  |
| d | Pembebasan Lahan/Tanah   | 75     | 16 paket  |  |  |  |  |
| e | Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++   | 150    | 16 paket  |  |  |  |  |
| f | Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.      | 75     | 16 paket  |  |  |  |  |
| g | Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS)                                      | 75     | 16 paket  |  |  |  |  |
| h | Pembangunan MCK++  | 8.000  | 16 unit   |  |  |  |  |
| i | Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++   | 75     | 16 paket  |  |  |  |  |
| 3 | Pembangunan IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal   |        |           |  |  |  |  |
| a | Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik | 200    | 4 paket   |  |  |  |  |
| b | Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal kepada masyarakat oleh Dinas Terkait              | 200    | 4 paket   |  |  |  |  |
| c | Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS)  | 217    | 217 paket |  |  |  |  |
| d | Pembebasan Lahan/Tanah   | 1.085  | 217 paket |  |  |  |  |
| e | Perencanaan Jaringan perpipaan   | 434    | 217 paket |  |  |  |  |
| f | Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.      | 400    | 4 paket   |  |  |  |  |
| g | Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS)                                      | 20     | 4 paket   |  |  |  |  |
| h | Pembangunan IPAL Komunal   | 27.125 | 217 paket |  |  |  |  |
| i | Pembangunan Jaringan Perpipaan   | 18.200 | 217 paket |  |  |  |  |
| j | Pembangunan Sambungan Rumah (pilot project)  | 18.275 | 217 paket |  |  |  |  |
| k | Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal (Sanimas).   | 108    | 217 paket |  |  |  |  |
| 4 | Pembangunan IPLT   |        |           |  |  |  |  |
| a | Studi AMDAL Pembangunan IPLT   | 200    | 1 paket   |  |  |  |  |
| b | Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPLT  | 100    | 1 paket   |  |  |  |  |
| c | Pembebasan Lahan/Tanah   | 1.000  | 1 paket   |  |  |  |  |
| d | Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT  | 200    | 1 paket   |  |  |  |  |
| e | Pelatihan bagi Pengelola IPLT  | 50     | 1 paket   |  |  |  |  |
| f | Pembangunan IPLT   | 6.000  | 1 paket   |  |  |  |  |
| g | Supervisi Pembangunan IPLT   | 200    | 1 paket   |  |  |  |  |
| h | Operasi dan Pemeliharaan IPLT  | 100    | 2 paket   |  |  |  |  |
| i | Pengadaan Truk Tinja   | 1.500  | 10 unit   |  |  |  |  |

# Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2018-2022

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



|    |  |        |          |  |  |  |  |
|----|--|--------|----------|--|--|--|--|
| j  | Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja   | 40     | 10 paket |  |  |  |  |
| 5  | Pembangunan SPALD Terpusat Skala Kawasan   |        |          |  |  |  |  |
| a  | Studi Pra Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kawasan                               | 100    | 1 paket  |  |  |  |  |
| b  | Studi Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kawasan                                   | 150    | 1 paket  |  |  |  |  |
| c  | Preliminary Design Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kawasan                                | 100    | 1 paket  |  |  |  |  |
| d  | Studi AMDAL Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kawasan                                       | 150    | 1 paket  |  |  |  |  |
| f  | Sosialisasi dan Kampanye "Rencana" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kawasan    | 75     | 1 paket  |  |  |  |  |
| g  | Pembebasan Lahan/Tanah   | 500    | 1 paket  |  |  |  |  |
| h  | Perencanaan Detail (DED) Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kawasan                          | 100    | 1 paket  |  |  |  |  |
| i  | Sosialisasi "Pembangunan" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kawasan             | 75     | 1 paket  |  |  |  |  |
| j  | Pembentukan Lembaga Pengelola Sistem Pengolah Limbah Terpusat  | 50     | 1 paket  |  |  |  |  |
| k  | Pelatihan Pengelolaan Sistem Pengolah Limbah Terpusat  | 50     | 1 paket  |  |  |  |  |
| l  | Pembangunan Sistem Pengolah Air Limbah terpusat skala Kawasan  | 2.000  | 1 paket  |  |  |  |  |
| m  | Supervisi Pembangunan Sistem Pengolah Air Limbah terpusat skala Kawasan                                | 100    | 1 paket  |  |  |  |  |
| n  | Pembangunan Sistem Perpipaan Primer  | 500    | 1 paket  |  |  |  |  |
| o  | Supervisi Pembangunan Sistem Perpipaan Primer  | 50     | 1 paket  |  |  |  |  |
| p  | Pembangunan Sistem Perpipaan Sekunder  | 400    | 1 paket  |  |  |  |  |
| q  | Supervisi Pembangunan Sistem Perpipaan Sekunder  | 50     | 1 paket  |  |  |  |  |
| r  | Pembangunan Sistem Perpipaan Tersier   | 400    | 1 paket  |  |  |  |  |
| s  | Supervisi Pembangunan Sistem Perpipaan Tersier   | 50     | 1 paket  |  |  |  |  |
| t  | Pembangunan Sambungan Rumah (SR)   | 400    | 1 paket  |  |  |  |  |
| u  | Supervisi Pembangunan Sambungan Rumah (SR).  | 50     | 1 paket  |  |  |  |  |
| v  | Perluasan/Penambahan Sambungan Rumah (SR).   | 500    | 1 paket  |  |  |  |  |
| w  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolah Air Limbah Terpusat termasuk perpipaan                        | 50     | 1 paket  |  |  |  |  |
| 6  | Pembangunan SABERMAS/ SANIMAS  | 3.600  | 9 paket  |  |  |  |  |
| 7  | Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) - Pembangunan MCK dan Tangki Septik Komunal | 19.750 | 34 paket |  |  |  |  |
| 8  | Pembangunan SPAL   | 1.300  | 13 paket |  |  |  |  |
| 9  | Pembinaan Sekolah Sehat  | 1.000  | 5 paket  |  |  |  |  |
| 10 | PHBS Rumah Tangga  | 500    | 5 paket  |  |  |  |  |



|    |  |       |         |  |  |  |
|----|--|-------|---------|--|--|--|
| 11 | PHBS Institusi Pendidikan  | 500   | 5 paket |  |  |  |
| 12 | Sosialisasi Hygiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum                    | 500   | 5 paket |  |  |  |
| 13 | Sosialisasi Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 500   | 5 paket |  |  |  |
| 14 | Pengembangan Lingkungan Sehat (Studi EHRA)                         | 500   | 2 paket |  |  |  |
| 15 | Implementasi Lingkungan Sehat (Jambanisasi)                        | 250   | 5 paket |  |  |  |
| 16 | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Lingkungan Sekolah   | 2.088 | 4 paket |  |  |  |
| 17 | Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah                            | 500   | 1 paket |  |  |  |
| 18 | Penyusunan Peraturan Pengelolaan Limbah B3                         | 400   | 1 paket |  |  |  |

Sumber : Lampiran 3 SSK

**Tabel 7.1. Capaian Strategis Pembangunan Sektor Persampahan**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>Tujuan</b>   | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan persampahan</li> <li>Peningkatan pengelolaan sampah yang bewawasan lingkungan oleh masyarakat dan dunia usaha</li> </ul>  |
| <b>Sasaran</b>  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya review detail rencana pengelolaan persampahan</li> <li>Meningkatkan jalinan kerjasama pengelolaan sampah dengan kalangan swasta</li> <li>Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan skala Kabupaten wilayah perkotaan dari 37% menjadi 85% pada tahun 2019</li> </ul>  |
| <b>Program</b>  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya review Masterplan pengelolaan persampahan</li> <li>Terjalinnnya kerjasama pengelolaan persampahan dengan kalangan swasta</li> <li>Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur</li> <li>Program Peningkatan Informasi Pembangunan</li> <li>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</li> <li>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</li> </ul> |
| <b>Kegiatan</b> | : |  |

| No | Sub Kegiatan   | Rencana                        |               |                | Realisasi                      |               |                |
|----|--|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|
|    |  | Indikasi Investasi (xRp. Juta) | Output (Unit) | Outcome (jiwa) | Indikasi Investasi (xRp. Juta) | Output (Unit) | Outcome (jiwa) |
| 1  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional                 | 9.227                          | 5 paket       |                |                                |               |                |
| 2  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala TPSA   | 1.250                          | 5 paket       |                |                                |               |                |
| 3  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tempat Sampah dan Landasan Kontainer         | 100                            | 5 paket       |                |                                |               |                |
| 4  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kebersihan Tugu dan Trotoar di Jalur Layanan | 1.000                          | 5 paket       |                |                                |               |                |
| 5  | Pameran Pembangunan Tahunan Hari Jadi Kab. Kuningan                      | 200                            | 5 paket       |                |                                |               |                |



|    |  |       |          |  |  |  |  |
|----|--|-------|----------|--|--|--|--|
| 6  | Review Masterplan Persampahan Skala Kabupaten                        | 500   | 1 paket  |  |  |  |  |
| 7  | Studi Kualitas dan Kuantitas Sampah                                  | 300   | 1 paket  |  |  |  |  |
| 8  | Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan                              | 300   | 1 paket  |  |  |  |  |
| 9  | Promosi Penggunaan Produk Daur Ulang Sampah                          | 100   | 2 paket  |  |  |  |  |
| 10 | Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan Skala Kota | 200   | 4 paket  |  |  |  |  |
| 11 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan                           | -     | -        |  |  |  |  |
| 12 | Pilot Project Model Pengelolaan Sampah Terpadu                       | 675   | 1 paket  |  |  |  |  |
| 13 | Penataan TPSA  | 700   | 2 paket  |  |  |  |  |
| 14 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan K3                  | 780   | 5 paket  |  |  |  |  |
| 15 | Pembentukan Bank Sampah  | 500   | 5 paket  |  |  |  |  |
| 16 | Pengadaan Mesin Pengelolaan Sampah                                   | 1.000 | 10 paket |  |  |  |  |
| 17 | Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu                        | 100   | 1 paket  |  |  |  |  |
| 18 | Pengadaan Tempat Pengelolaan Pembuangan Sampah Akhir                 | 150   | 1 paket  |  |  |  |  |
| 19 | Pengelolaan Sampah   | 50    | 1 paket  |  |  |  |  |
| 20 | <b>Pengelolaan Sampah Dari Sumbernya</b>                             |       |          |  |  |  |  |
| a  | Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat                     | 500   | 5 paket  |  |  |  |  |
| b  | Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya                           | 375   | 15 paket |  |  |  |  |
| c  | Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya        | 375   | 15 paket |  |  |  |  |
| d  | Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga.                 | 150   | 15 unit  |  |  |  |  |
| e  | Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan                 | 300   | 200 unit |  |  |  |  |
| f  | Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah    | 180   | 12 paket |  |  |  |  |
| g  | Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan        | 180   | 12 paket |  |  |  |  |
| h  | Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan                       | 225   | 15 paket |  |  |  |  |
| i  | Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW             | 225   | 15 paket |  |  |  |  |
| j  | Pengadaan Gerobag Sampah bersekat                                    | 40    | 40 unit  |  |  |  |  |
| k  | Pengadaan Gerobag Sampah bermotor bersekat                           | 750   | 5 paket  |  |  |  |  |
| l  | Pengadaan Mobil Pick Up Sampah                                       | 600   | 4 paket  |  |  |  |  |
| 21 | <b>Pengelolaan Sampah Dari Stasiun Antara Sampai TPA</b>             |       |          |  |  |  |  |



|   |   |        |          |  |  |  |
|---|---|--------|----------|--|--|--|
|   | <b>- TPS</b>                                    |        |          |  |  |  |
| a | Pembangunan TPS                                 | 900    | 41 unit  |  |  |  |
| b | Peningkatan TPS Menjadi TPS Terpilah            | -      | -        |  |  |  |
| c | Rehabilitasi TPS                                | -      | -        |  |  |  |
|   | <b>- Transfer Depo</b>                          |        |          |  |  |  |
| a | Pembebasan Lahan                                | 63     | 17 paket |  |  |  |
| b | Penyusunan DED Transfer Depo                    | 200    | 5 paket  |  |  |  |
| c | Pembangunan Unit Transfer Depo                  | 500    | 5 unit   |  |  |  |
| d | Supervisi Pembangunan Unit Transfer Depo        | 150    | 1 paket  |  |  |  |
| e | Pemeliharaan Unit Transfer Depo                 | 100    | 5 paket  |  |  |  |
|   | <b>- Unit Landasan Kontainer</b>                |        |          |  |  |  |
| a | Pembebasan Lahan                                | 375    | 75 paket |  |  |  |
| b | Penyusunan DED Landasan Kontainer               | 250    | 75 paket |  |  |  |
| c | Pembangunan Unit Landasan Kontainer             | 2.500  | 75 unit  |  |  |  |
| d | Supervisi Pembangunan Unit Landasan Kontainer   | 150    | 75 paket |  |  |  |
| e | Pemeliharaan Unit Landasan Kontainer            | 75     | 75 unit  |  |  |  |
|   | <b>- Alat Angkut Dari Stasiun Antara ke TPA</b> |        |          |  |  |  |
| a | Pengadaan Truck Biasa                           | 1.250  | 5 unit   |  |  |  |
| b | Pengadaan Dump Truck                            | 4.500  | 10 unit  |  |  |  |
| c | Pengadaan Compactor Truck                       | -      | -        |  |  |  |
| d | Pengadaan Truck Penyapu Jalan (Street Sweeper)  | -      | -        |  |  |  |
| e | Pengadaan Kontainer (terpilah)                  | 2.500  | 75 unit  |  |  |  |
| f | Pengadaan Amroll Truck                          | 5.000  | 10 unit  |  |  |  |
| g | Operasional dan Pemeliharaan Alat Angkut        | 5.000  | 5 paket  |  |  |  |
|   | <b>- TPS/TPST 3 R</b>                           |        |          |  |  |  |
| a | Pembebasan Lahan                                | 1.200  | 16 paket |  |  |  |
| b | Penyusunan DED TPS 3R                           | 800    | 16 paket |  |  |  |
| c | Pembentukan Lembaga Pengelola TPS 3R            | 100    | 16 paket |  |  |  |
| d | Pelatihan Bagi Pengelola TPS 3R                 | 900    | 18 paket |  |  |  |
| e | Pembangunan TPS 3R                              | 11.500 | 23 unit  |  |  |  |



|   |  |       |         |  |  |  |  |
|---|--|-------|---------|--|--|--|--|
| f | Supervisi Pembangunan TPS 3R                           | 600   | 4 paket |  |  |  |  |
| g | Operasional dan Pemeliharaan TPS 3R                    | 800   | 4 paket |  |  |  |  |
| h | Rehabilitasi TPS 3R                                    |       | -       |  |  |  |  |
|   | <b>- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)</b>                 |       |         |  |  |  |  |
| a | Penyusunan Studi Pra-kelayakan TPA                     | 100   | 1 paket |  |  |  |  |
| b | Penyusunan Studi Kelayakan TPA                         | 100   | 1 paket |  |  |  |  |
| c | Penyusunan UKL/UPL TPA atau AMDAL                      | 200   | 1 paket |  |  |  |  |
| d | Pembebasan Lahan                                       | 800   | 1 paket |  |  |  |  |
| e | Penyusunan DED TPA                                     | 300   | 1 paket |  |  |  |  |
| f | Sosialisasi Pembangunan TPA Kepada Masyarakat          | 50    | 1 paket |  |  |  |  |
| g | Pembangunan TPA  | 5.000 | 1 paket |  |  |  |  |
| h | Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA         | 1.000 | 5 paket |  |  |  |  |
| i | Pembangunan Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA      | 3.460 | 7 paket |  |  |  |  |
| j | Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA                    | 375   | 3 paket |  |  |  |  |
| k | Pengadaan Fasilitas Operasional TPA                    |       |         |  |  |  |  |
|   | - Pengadaan Bulldozer                                  | 2.400 | 2 unit  |  |  |  |  |
|   | - Pengadaan Excavator                                  | 3.600 | 3 unit  |  |  |  |  |
|   | - Pengadaan Land Compactor                             |       | -       |  |  |  |  |
|   | - Pengadaan Loader                                     |       | -       |  |  |  |  |
|   | - Pengadaan Dump truck                                 |       | -       |  |  |  |  |
| l | Pelatihan Pengelolaan TPA                              |       |         |  |  |  |  |
| m | Penyuluhan dan Bimbingan Kepada Masyarakat Sekitar TPA | 50    | 1 paket |  |  |  |  |
| n | Pemantauan dan Evaluasi TPA                            | 100   | 1 paket |  |  |  |  |
| o | Operasional dan Pemeliharaan TPA                       |       |         |  |  |  |  |
|   | <b>- Revitalisasi TPA</b>                              |       |         |  |  |  |  |
| a | Penyusunan Studi Kelayakan Revitalisasi TPA            | 200   | 1 paket |  |  |  |  |
| b | Penyusunan UKL/UPL TPA atau AMDAL                      | 500   | 1 paket |  |  |  |  |
| c | Pembebasan Lahan                                       | 2.000 | 1 paket |  |  |  |  |
| d | Sosialisasi Rencana Revitalisasi TPA Kepada Masyarakat | 50    | 1 paket |  |  |  |  |
| e | Penyusunan DED Revitalisasi TPA                        | 200   | 1 paket |  |  |  |  |



|    |  |       |         |  |  |  |  |
|----|--|-------|---------|--|--|--|--|
| f  | Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi TPA | 2.000 | 1 paket |  |  |  |  |
| g  | Supervisi Revitaliasasi TPA            | 100   | 1 paket |  |  |  |  |
| 22 | Koordinasi Penilaian Adipura           | 1.000 | 5 paket |  |  |  |  |
| 23 | Pemantauan Kualitas Lingkungan         | 500   | 5 paket |  |  |  |  |
| 24 | Pembangunan TPS dan Daur Ulang Sampah  | 395   | 30 unit |  |  |  |  |
| 25 | Pengadaan Alat Pengelola Sampah        | 100   | 5 paket |  |  |  |  |
| 26 | Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah   | 100   | 5 paket |  |  |  |  |
| 27 | Penyusunan Status Lingkungan Hidup     | 250   | 5 paket |  |  |  |  |
| 28 | Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan | 500   | 5 paket |  |  |  |  |

Sumber : Lampiran 3 SSK

**Tabel 7.3. Capaian Strategis Pembangunan Sektor Drainase Lingkungan**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Tujuan</b>   | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase kota yang memadai dan berwawasan lingkungan</li> <li>Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase di Kabupaten Kuningan</li> <li>Meningkatkan cakupan layanan drainase melalui regulasi</li> <li>Tersedianya Masterplan rencana pengelolaan drainase</li> </ul>   |
| <b>Sasaran</b>  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Cakupan sarana dan prasarana drainase melingkupi seluruh wilayah permukiman</li> <li>Terbangunnya saluran drainase dari sebagian desa/kelurahan menjadi seluruh desa/kelurahan ditahun 2022</li> <li>Perbaikan drainase sebesar 100% dari total saluran yang rusak setiap tahun</li> <li>Adanya regulasi yang mengatur drainase</li> <li>Adanya Masterplan rencana pengelolaan drainase sebagai salah satu acuan dalam pembangunan drainase lingkungan</li> </ul> |
| <b>Program</b>  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengendalian Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</li> <li>Program Pengembangan Saluran Drainase dan Sanitasi Lingkungan</li> </ul>  |
| <b>Kegiatan</b> | : |   |

# Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2018-2022

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



| No | Sub Kegiatan  | Rencana                         |           |           | Realisasi          |        |         |
|----|---|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------|---------|
|    |   | Indikasi Investasi (x Rp. Juta) | Output    | Outcome   | Indikasi Investasi | Output | Outcome |
| 1  | Penyusunan Master Plan dan DED Drainase                 | 1500                            | 1 Pkt     | 1.153.962 |                    |        |         |
| 2  | Penyusunan outlineplan drainase perkotaan Kab. Kuningan | 800                             | 17 paket  | 1.153.962 |                    |        |         |
| 3  | Penyusunan Data Base Sistem Drainase Perkotaan/Kawasan  | 150                             | 17 paket  | 1.153.962 |                    |        |         |
| 4  | Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong          | 3650                            | 19 paket  | 1.153.962 |                    |        |         |
| 5  | Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong         | 35.500                          | 122 paket | 1.153.962 |                    |        |         |
| 6  | Pemeliharaan Saluran Drainase                           | 150                             | 3 Paket   | 1.153.962 |                    |        |         |
| 7  | Kelembagaan dan Pengaturan                              | 700                             | 3 Paket   | 1.153.962 |                    |        |         |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>42.450</b>                   |           |           |                    |        |         |

Sumber : Lampiran 3 SSK

# Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2018-2022

KABUPATEN KUNINGAN – PROVINSI JAWA BARAT



Tabel 7.4. Infrastruktur dan Akses

| No | Infrastruktur            | Rencana       |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      | Realisasi     |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
|----|--------------------------|---------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|
|    |                          | Output (unit) |      |      |      |      |      | Outcome (jiwa) |      |      |      |      |      | Output (unit) |      |      |      |      |      | Outcome (jiwa) |      |      |      |      |      |
|    |                          | 2017          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | SPALD S Skala Individual | 2             | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 2  | SPALD S Skala Komunal    | -             | -    | -    | -    | -    | -    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 3  | SPALD T Skala Permukiman | 145           | 16   | 13   | 14   | 14   | 14   |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 4  | SPALD T Skala Kota       | -             | -    | -    | -    | -    | -    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 5  | IPLT                     | -             | -    | 1    | -    | -    | -    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 6  | Truk Tinja               | -             | -    | -    | -    | 5    | 5    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 7  | Gerobak                  | 65            | -    | 20   | 20   | -    | -    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 8  | Motor                    | 9             | -    | 5    | -    | -    | -    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 9  | TPS Biasa                | 118           | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 10 | TPS Transfer Depo        | 34            | -    | -    | -    | 5    | -    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 11 | TPS3R                    | 14            | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 12 | TPST                     | -             | -    | -    | -    | -    | -    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 13 | TPA                      | 1             | -    | -    | -    | -    | 1    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
| 14 | Truk Sampah:             | -             |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
|    | - Dump Truk              | 15            | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
|    | - Compactor Truk         | -             | -    | -    | -    | -    | -    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |
|    | - Arm roll Truk          | 6             | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |                |      |      |      |      |      |               |      |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |



### Pelaporan Monev Implementasi SSK Sektor Air Limbah Domestik

| No | Objek Pemantauan              | Penanggung Jawab       |                                |                        | Waktu Pelaksanaan                   | Pelaporan        |
|----|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|
|    |                               | Penanggung Jawab Utama | Pengumpul Data dan Dokumentasi | Pengolah Data/Pemantau |                                     | Penerima Laporan |
| 1  | Tabel Capaian Strategis       | DPRPP                  | DPRPP                          | DPRPP                  | Selama implementasi proram kegiatan | Kepala Dinas     |
| 2  | Tabel Infrastruktur dan Akses | DPRPP                  | DPRPP                          | DPRPP                  | Selama implementasi proram kegiatan | Kepala Dinas     |

### Pelaporan Monev Implementasi SSK Sektor Persampahan

| No | Objek Pemantauan              | Penanggung Jawab       |                                |                        | Waktu Pelaksanaan                   | Pelaporan        |
|----|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|
|    |                               | Penanggung Jawab Utama | Pengumpul Data dan Dokumentasi | Pengolah Data/Pemantau |                                     | Penerima Laporan |
| 1  | Tabel Capaian Strategis       | DLH                    | DLH                            | DLH                    | Selama implementasi proram kegiatan | Kepala Dinas     |
| 2  | Tabel Infrastruktur dan Akses | DLH                    | DLH                            | DLH                    | Selama implementasi proram kegiatan | Kepala Dinas     |

### Pelaporan Monev Implementasi SSK Sektor Drainase Lingkungan

| No | Objek Pemantauan              | Penanggung Jawab       |                                |                        | Waktu Pelaksanaan                   | Pelaporan        |
|----|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|
|    |                               | Penanggung Jawab Utama | Pengumpul Data dan Dokumentasi | Pengolah Data/Pemantau |                                     | Penerima Laporan |
| 1  | Tabel Capaian Strategis       | DPRPP                  | DPRPP                          | DPRPP                  | Selama implementasi proram kegiatan | Kepala Dinas     |
| 2  | Tabel Infrastruktur dan Akses | DPRPP                  | DPRPP                          | DPRPP                  | Selama implementasi proram kegiatan | Kepala Dinas     |



### Jadwal Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota

| No | Kegiatan                 | Rencana Monev |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |
|----|--------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|
|    |                          | Jan           | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
| 1  | Input menu investasi     | ➡             |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |
| 2  | Input menu akses         |               |     | ➡   |     |     |     |      |     |      |     |     |     |
| 3  | Input menu infrastruktur |               |     | ➡   |     |     |     |      |     |      |     |     |     |
| 4  | Input menu progress      |               |     |     |     |     | ➡   |      |     |      |     |     |     |
| 5  | Pelatihan Nawasis        |               |     | ➡   |     |     |     |      |     |      |     |     |     |
| 6  | Dsb.....                 |               |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |